RENCANA STRATEGIS

FAKULTAS ILMU SOSIAL

2020-2024

UNIVERSITAS NEGERI PADANG
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2020

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN **halaman**

A Kondisi Internal

1 Sejarah Perkembangan UNP
2 Perkembangan dan Perbandingan Rencana Strategis
3 Capaian Program dan Kegiatan Periode 2015-2019
4 Tata Pamong (Kekuatan dan Kelemahan)
5 Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan
6 Keuangan, Sarana dan Prasarana
7 Pendidikan/Pembelajaran
8 Penelitian
9 Pengabdian Kepada Masyarakat
10 Luaran dan Capaian Tridharma

B Kondisi Eksternal

1 Perubahan Regulasi
2 Kompetisi
3 Keadaan ekonomi
4 Perkembangan Sosial Budaya
5 Perkembangan Teknologi
6 Persaingan Kerja

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A Visi UNP
B Misi UNP
C Tujuan Strategis UNP
D Sasaran Strategis UNP
E Visi FIS
F Misi FIS
G Tujuan Strategis FIS
H Sasaran Strategis FIS
I Tata Nilai

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A Arah Kebijakan
B Strategi
C Kerangka Regulasi
D Kerangka Kelembagaan

BAB IV TARGET KINERJA

A Target Kinerja
B Kerangka Pendanaan

BAB I
PENDAHULUAN

A. Kondisi Internal

Membicarakan perkembangan Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP) tidak bisa dipisahkan dari sejarah perkembangan UNP itu sendiri sebagai sebuah institusi, mengingat Fakultas Ilmu Sosial adalah salah satu fakultas tertua di UNP. Fakultas ini berkembang seiring dengan perubahan nomenklaturnya, mulai dari Fakultas Keguruan Pendidikan Sosial (FKPS), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) keduanya waktu masih di bawah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP Padang), Fakultas Ilmu-ilmu Sosial (FIS), sampai akhirnya saat ini menjadi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) pada era Universitas Negeri Padang.

1. Sejarah Perkembangan UNP

Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu universitas hasil kebijakan perluasan mandat (*wider mandate*) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Padang. Secara resmi pendirian (dies natalis) UNP ditetapkan yaitu pada tanggal 23 Oktober 1954. UNP mengalami berbagai perubahan nomenklatur dan kelembagaan yang dapat dibagi ke dalam enam periode. Perubahan yang dilalui UNP dapat diklasifikasikan dalam enam periode, yaitu: (1) Periode PTPG Batusangkar (1954 - 1956); (2) Periode FKIP Unand Bukittinggi di Batusangkar (1956 - 1958); (3) Periode FKIP Unand Padang (1958 - 1964); (4) Periode IKIP Jakarta Cabang Padang (1964 - 1965); (5) Periode IKIP Padang (1965-1999); dan (6) Periode IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (1999 s/d sekarang).

Keputusan Presiden Nomor 093 Tahun 1999 tentang penugasan perluasan mandat IKIP Padang menjadi Universitas Negeri Padang (selanjutnya disingkat UNP) memberikan tugas untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi dalam spektrum yang lebih luas di bidang ilmu non-kependidikan di samping tetap mengembangkan ilmu kependidikan sebagai tugas utama (*core competency*). Saat ini UNP dikelola secara lebih otonom dengan status pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015. Saat ini UNP memiliki 8 fakultas yaitu FBS, FIP, FMIPA, FIS, FT, FIK, FE dan FPP di samping satu Program Pascasarjana (PPs). Secara keseluruhan UNP terdiri dari 103 program studi, mulai dari D3, D4, S1, S2, S3 dan program studi profesi.

2. Perkembangan dan Perbandingan Rencana Strategis

Sesuai dengan pasal 1 UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dinyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang akhirnya dilanjutkan dengan misi sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya untuk mewujudkan misi. Visi UNP berkembang seiring dengan konteks, waktu dan prioritas yang ditetapkan secara holistik dan partisipatif. Langkah-langkah program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Lima Tahunan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

a. RENSTRA 2000-2004

Renstra 2000-2004 merupakan dasar arah kebijakan dalam melakukan penguatan amanat wider mandate, sekaligus merupakan Rencana Strategis pertama UNP. Dalam proses transisi menjadi universitas dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki 963 dosen dan 508 tenaga kependidikan, maka visi UNP pada tahun 2001 adalah:

Universitas Negeri Padang Sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Yang Mampu Menghasilkan Lulusan Berkualitas

Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam bentuk misi sebagai berikut.

1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas sesuai standar pendidikan nasional bidang pendidikan tinggi;
2) Melaksanakan penelitian ilmiah yang berkualitas dan memanfaatkannya dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran;
3) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sehingga UNP berperan dalam membantu pembangunan Nasional;
4) Melakukan penguatan kelembagaan sebagai Universitas yang diperluas mandat oleh pemerintah; dan
5) Melaksanakan kerjasama yang menguntungkan untuk percepatan pembangunan UNP.

b. RENSTRA 2005-2009

Visi UNP pada 2009 adalah:

Menjadi Universitas Unggul, Berbasis Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Berlandaskan Nilai-Nilai Ketaqwaan Kepada Allah Yang Maha Kuasa

Untuk mencapai visi tersebut UNP dituangkan dalam misi, yang terdiri dari maksud untuk ”mengembangkan kemampuan, membentuk watak, serta melestarikan peradaban bangsa yang bermartabat melalui pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

c. RENSTRA 2010-2014

Visi UNP tahun 2014 adalah:

Menjadi Universitas unggul di Asia Tenggara dalam ilmu kependidikan berbasis sains, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai moral dan agama

Berdasarkan visi itu dikembangkan misi:

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang pendidikan, sains, teknologi, seni berlandaskan nilai-nilai moral, dan agama.
2) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, dan model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional dan internasional.
3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sebagai upaya penerapan ilmu pendidikan, sains, teknologi, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4) Meningkatkan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).
5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional.
6) Mengembangkan kerangka landasan untuk menuju *world class university*.

d. RENSTRA 2015-2019

Visi tahun 2019:

Menjadi universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2020 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Berdasarkan visi di atas, maka dikembangkan misi UNP sebagai berikut:

1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan nilai-nilai moral, agama dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional.
3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa.
4) Meningkatkan tata kelola universitas (*good university governance*).
5) Meningkatkan kerjasama lokal, nasional, dan internasional.
6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Universitas Bertaraf Internasional.

Jika dicermati perkembangan visi dan misi UNP selama 2000-2015 (sekitar 15 tahun) ini kita akan dapat melihat beberapa perubahan penting. Visi 2001-2005 sangat mencerminkan ciri UNP sebagai perguruan tinggi yang memiliki basis ilmu kependidikan (LPTK) dan memiliki maksud untuk menghasilkan tenaga kependidikan. Hal ini diteruskan dengan visi 2005-2009, namun sudah memiliki komitmen untuk membenahi mutu dengan menambahkan nomenklatur “unggul” dalam visinya. Visi 2010-2014 memperlihatkan komitmen UNP untuk melaksanakan *outward looking* terutama di kawasan Asia Tenggara serta mulai mengangkat ilmu sains, teknologi dan seni disamping masih berpijak kepada bidang kependidikan. Selanjutnya Visi 2015-2019 sudah menempatkan UNP dalam konteks global dan mengakui adanya persaingan yang semakin ketat. Adapun misi yang dirumuskan dalam 3 Renstra terakhir memiliki pola untuk meningkatkan fungsi tridarma perguruan tinggi dilengkapi dengan pembenahan kelembagaan (*good university governance*) dan penyiapan menuju universitas bertaraf dunia (*world class university*).

Sejak tahun 2015 terjadi perubahan kelembagaan yang sangat penting dan menentukan dengan dipisahkannya Kementrian Pendidikan Nasional dengan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti). Kemristekdikti kemudian menyusun Renstra yang harus menjadi rujukan bagi rumusan Renstra perguruan tinggi. Karena itu tahun 2015 dirumuskan visi dan misi UNP yang baru yang sampai saat ini berlaku.Renstra baru kebanyakan berubah dari sisi format tujuan, sasaran dan program, namun tidak banyak merubah visi. Visi yang baru dengan menambahkan *timeline* tahun 2020 sebagai sasaran pengembangan UNP. Kesemua misi memberikan penekanan kepada religiusitas dengan mencantumkan kalimat “berlandaskan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”. Sesuai dengan budaya Minangkabau yang memiliki prinsip *“adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”*.

Meskipun demikian dalam perwujudan visi dan misi yang didasari oleh kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki disadari adanya faktor eksternal yang cukup memberikan pengaruh. Faktor eksternal merupakan kondisi di luar yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan UNP dalam mencapai tujuannya.

Dinamika faktor eksternal tidak mudah dikendalikan sesuai dengan apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal dalam pengembangan UNP tersebut dapat tergambarkan pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi, dan SDM serta bidang sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh:

1) Perubahan regulasi

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk peningkatan layanan publik atau *public service agency*. Peraturan perundang-undangan layanan dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lain kebijakan yang dikterbitkan pemerintah.

2) Persaingan (kompetisi)

Dengan adanya arus globalisasi membuat persaingan diberbagai bidang termasuk bidang pendidikan tidak dapat terelakkan. Pihak asing dapat mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia, berkembangnya kuantitas dan kualitas perguruan tinggi di sekitar UNP. Dengan demikian ini merupakan ancaman sekaligus peluang, jika UNP tidak melakukan pembenahan terus menerus serta inovasi, makan kompetitor lain dan perguruan swasta akan mengancam keberadaan UNP di masa depan.

3) Keadaan ekonomi

a) Perekonomian nasional

Perekonomian nasional yang bergantung pada perekonomian global membuat perekonomian nasional mengalami tekanan. Walaupun konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, negara telah mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN dengan nilai rupiah dan juga sangat tergantung dari nilai mata uang asing yang membuat pembiayaan pendidikan menjadi lebih berat.

b) Perekonomian internasional

Pengaruh ekonomi internasional, bahkan negara-negara tertentu memberikan pengaruh kepada kondisi makroekonomi sperti nilai mata uang Rupiah terhadap nilai mata uang asing. Beberapa faktor lain seperti kondisi pasar minyak dunia, pasar emas dan pasar saham, menjadikan persaingan bebas dan konflik antar negara yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian dalam negeri.

4) Perkembangan Sosial Budaya

Perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat strategis, hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang diapit dua benua Asia dan Australia dan dua samudera yaitu samudera Pasific dan samudra Indonesia, sehingga hal ini sangat berpengaruh pada sosial budaya kita yang mudah berubah dan berkembang. Lintasan ini dapat dilihat dari keadaan pasar pariwisata yang membawa budaya baru disamping warga Indonesia yang mudah beradaptasi dengan perpaduan Indonesia dengan budaya barat melalui media sosial.

5) Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat dengan berbagai sistem Teknologi Informasi (TI) yang semakin modern, sangat berpengaruh pada kemudahan pelayanan yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan peralatan TI ini berbagai informasi akan mudah diakses, cepat diperoleh sehingga informasi bisa diterima dengan instan.

3. Capaian Program dan Kegiatan Periode 2015-2019

Upaya mewujudkan visi UNP yang dirancang dalam suatu rencana strategis 5 tahunan, dilaksanakan melalui implementasi tri dharma perguruan tinggi. Keberhasilan pencapaian visi diukur dengan indikator pada beberapa sasaran strategis yang dicanangkan sesuai keadaan aktual UNP dan rencana strategis Kementerian Ristek Dikti. Selama jangka waktu 2015-2019, UNP telah mengalami lompatan-lompatan yang menggembirakan, meskipun tetap dengan berbagai catatan yang masih memerlukan peningkatan, penguatan dan pengembangan. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan UNP dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai bahan evaluasi untuk keberlanjutan program, maka digambarkan ketercapaian sasaran strategis seperti berikut.

a. Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan merupakan salah satu sasaran strategis dalam rencana strategis UNP. Untuk mengukur kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan ini ditetapkan beberapa indikator kinerja yang meliputi rasio afirmasi, jumlah mahasiswa yang berwirausaha, persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi, persentase prodi terakreditasi minimal B, persentase lulusan yang langsung bekerja sesuai bidangnya, jumlah mahasiswa berprestasi, persentase lulusan tepat waktu dan rata-rata IPK lulusan. Secara umum realisasi capaian tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Target dan Capaian Indikator Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Reali-sasi 2016	2017		2018		2019	
			Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi
Meningkatnya Kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan	Rasio Afirmasi (%)	19	17	31,04	31	31.86	32	33.02
	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	147	150	304	250	261	261	282
	Persentase lulusan bersetifikat kompetensi & profesi (%)	2,35	6,92	5,72	85	82	85	52.86
	Persentase prodi terakreditasi minimal B (%)	80	85	97,5	-	-	-	85.15
	Persentase lulusan yang langsung bekerja (%)	5,68	7,25	15,00	15	15,98	17,50	28,40
	Jumlah mahasiswa berprestasi	59	57	146	70	85	85	58

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Reali-sasi 2016	2017		2018		2019	
			Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi	Tar-get	Reali-sasi
	Persentase lulusan tepat waktu (%)	48	80	54,90	80	72	81	80
	Rata-rata IPK lulusan	3,34	3,35	3,36	3,35	3,37	3,38	3,40

Berdasarkan data, realisasi rasio afirmasi mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Untuk meningkatkan rasio afirmasi tahun 2019 dan beberapa tahun ke depan, UNP menargetkan peningkatan persentase afirmasi melalui perolehan beasiswa oleh mahasiswa. Target ini akan dicapai dengan mencari sponsor beasiswa dari pihak pemerintah maupun swasta, baik di daerah tingkat kota/kabupaten, provinsi dan pusat melalui kerjasama dengan walikota/bupati, Gubernur dan sumber lainnya. Beberapa MoU ini sudah ditandatangani oleh Rektor UNP dengan pemerintah daerah.

Dari data juga terlihat, sebagian besar mahasiswa UNP saat ini juga sudah mulai menyadari pentingnya berwirausaha. Namun demikian, jumlah mahasiswa yang berwirausaha sesungguhnya belum menunjukkan angka yang cukup berarti, jika dibandingkan dengan jumlah mahasiswa UNP secara keseluruhan. UNP masih perlu mendorong mahasiswa untuk terlibat dalam program mahasiswa wirausaha, agar selain jumlah mahasiswa yang terlibat semakin besar, juga luaran usahanya kian signifikan. Target ini akan dilakukan dengan program pembinaan kepada mahasiswa dalam pembuatan proposal-proposal kegiatan kewirausahaan dan pelatihan-pelatihan kewirausahaan. Keterlibatan dunia usaha dan pihak eksternal lainnya juga masih perlu terus ditingkatkan melalui kerjasama kemitraan strategis.

Di samping menyelenggarakan pendidikan akademik, Universitas Negeri Padang juga membuka akses penyelenggaraan pendidikan bersetifikat kompetensi sesuai keahlian yang dapat dikembangkan masing-masing prodi dan program profesi Pendidikan, yaitu program sertifikasi pendidik dan Program Profesi Guru (PPG). Program pendidikan profesi yang diselenggarakan pertama kali di UNP, yaitu profesi konselor yang berada di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan. Sekarang program ini telah terakreditasi B oleh Ban-PT. Program PPG SM3T adalah program kemenristek Dikti yang pelaksanaanya dilakukan di UNP. Tahun 2018 PPG SM3T bertambah dengan PPG bersubsidi. Adapun jumlah lulusan bersertifikat kompetensi & profesi mengalami peningkatan cukup signifikan, terutama dari 2016 ke 2017. Tahun 2018 Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi sebesar 7.36%, atau 82% dari peserta ujian (sebanyak 613 orang), dan yang dinyatakan lulus sebanyak 502 orang. Capaian ini masih di bawah yang targetkan sebesar 85%. Hal ini disebabkan banyaknya peserta Program Pendidikan Profesi Guru khusus bersubsidi yang tidak lulus karena pesertanya banyak yang akan memasuki masa pensiun. Diharapkan pada akhir tahun 2019, diperoleh capaian lulusan bersertifikat sekitar 12%.

Kualitas pembelajaran dilihat dari akreditasi prodi sebagai pengakuan dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kemenristek Dikti, terus menjadi fokus UNP. UNP selalu berupaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, memperkenalkan serta menyebarluaskan "Paradigma Baru dalam Pengelolaan Pendidikan Tinggi", dan meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, pengelolaan institusi, efisiensi dan keberlanjutan pendidikan

tinggi untuk meraih akreditasi terbaik.

Hingga 2019, prodi terakreditasi minimal B ada 44 atau sekitar 43,14%, terakreditasi A sebanyak 39 atau sekitar 39%, dan sisanya (19 prodi) masih dalam proses pengusulan akreditasi atau re-akreditasi. Peningkatan jumlah prodi yang terakreditasi minimal B mengalami lonjakan sangat berarti dibanding awal tahun 2016. Secara kumulatif, sekitar 82% dari 102 prodi yang ada di UNP telah terakreditasi unggul. Adapun sisa 19 prodi adalah umumnya merupakan prodi baru yang akan dire-akreditasi (dalam proses pengusulan), dengan perkiraan hasil minimal terakreditasi B. Untuk selanjutnya, UNP menargetkan capaian 60 s.d. 80% prodinya terakreditasi A.

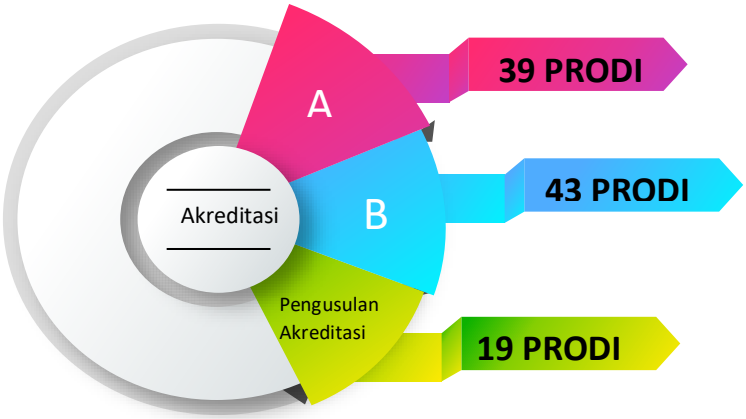

Gambar 1. Capaian Akreditasi Prodi UNP Tahun 2019

Sementara itu, akreditasi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Sosial pada saat ini, dapat dilihat dari tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2. Capaian Akreditasi Prodi FIS UNP Tahun 2019

No	Jurusan	Program Studi	Akreditasi
1	Sejarah	Pendidikan Sejarah	A
2	Ilmu Administrasi Negara	Ilmu Administrasi Publik	B
3	Sosiologi Antropologi	Pendidikan Sosiologi	A
4	Geografi	Pendidikan Geografi	A
		Geografi	A
		Teknologi Penginderaan Jauh	B
5	Ilmu Sosial Politik	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	A
6	Ilmu Agama Islam	Pendidikan Keagamaan Islam	C
7	Pascasarjana	S2 Magister Pendidikan Geografi	B
		S2. Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	B
		S2 Magister Administrasi Publik	B

Salah satu tolak ukur keberhasilan perguruan tinggi juga dapat dilihat dari serapan lulusan yang bekerja. UNP telah melakukan terobosan-terobosan dalam memperkenalkan lapangan pekerjaan bagi lulusannya, antara lain dengan mendatangkan praktisi dalam bentuk kuliah umum dan jobfair oleh beberapa perusahaan di UNP. Setiap tahun, persentase lulusan UNP yang langsung bekerja mengalami peningkatan signifikan dan selalu melebihi target yang dicanangkan. Sampai pada semester 1 2019, capaian persentase lulusan yang langsung bekerja telah mencapai 28,40%. Angka ini pun telah melebihi target akhir tahun yakni 20%. Namun demikian, beberapa hal yang perlu terus diperhatikan adalah relevansi bidang pekerjaan dengan kompetensi lulusan, KKNI, dan dinamika dunia usaha dunia industri. Isu-isu global seperti revolusi industri 4.0 juga patut dicermati dan direspon secara cepat dan tepat. Disruption technology sebagai salah satu hasilnya, perlu ditindaklanjuti dengan pengembangan kurikulum berkelanjutan, sarpras pembelajaran yang maju dan technology-based, hingga kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik yang memadai.

Sementara pada aspek mahasiswa berprestasi, UNP cukup membanggakan beberapa tahun terakhir. Memang jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yang sebanyak 146 orang mahasiswa, capaian di tahun 2016 dan 2018 lebih rendah. Hal ini disebabkan event nasional seperti PIMNAS, POMNAS yang banyak mendulang medali, dilaksanakan pada tahun ganjil. Pada tahun 2019 ditargetkan sebanyak 85 orang mahasiswa berprestasi. Target tersebut diharapkan tercapai karena adanya event nasional PIMNAS dan POMNAS dimaksud. UNP dari tahun ke-tahun selalu meningkatkan target dan capaiannya, dan secara umum, prestasi mahasiswa juga mengalami trend positif. UNP menyadari akan pentingnya usaha yang lebih terstruktur dan cukup masif untuk menggenjot prestasi mahasiswa, terutama di ajang nasional dan internasional.

Persentase lulusan tepat waktu yang menunjukkan jumlah mahasiswa yang dapat menempuh masa studi sesuai dengan waktu yang ditentukan, mengalami trend positif meskipun belum mencapai target maksimal. Semakin besar persentase lulusan tepat waktu, maka kinerja UNP semakin baik. Jumlah student body setiap tahun juga akan relatif lebih baik, biaya pelaksanaan dan pengelolaan pendidikan juga kian efisien, serta akses calon mahasiswa bisa terbuka semakin lebar. Perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran dianalisis ikut memperbaiki lama waktu penyelesaian studi mahasiswa. Selain itu makin banyaknya dosen-dosen yang melibatkan mahasiswa dalam payung penelitannya, menyebabkan kendala menemukan topik skripsi/TA menjadi terkoreksi dan proses penyelesaian tugas akhir menjadi lebih cepat. Lebih jelas dapat terlihat pada Gambar 1.4.

Berbeda dengan lulusan tepat waktu, rerata IPK lulusan sedikit mengalami penurunan dan belum mencapai target pada akhir tahun 2019. Berdasarkan data pada wisuda bulan September 2017 dan 2018 diperoleh rata rata realisasi IPK 3.36 dan 3.37. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan sarana belajar seperti Perolehan ini menunjukkan bahwa makin membaiknya proses pembelajaran dan pengelolaan di prodi masing masing. Beberapa program telah dilakukan oleh UNP untuk memperbaiki mutu akademik antara lain perbaikan proses pembelajaran dengan metode *e-learning*, perbaikan sarana dan prasarana pembelajaran seperti peningkatan *bandwidth* (nilai *bandwidth* 2017 adalah 1200 Mbps), pembuatan *hotspot-hotspot* tempat belajar, pengembangan perangkat pembelajaran dan evaluasi proses pembelajaran tiap semester.

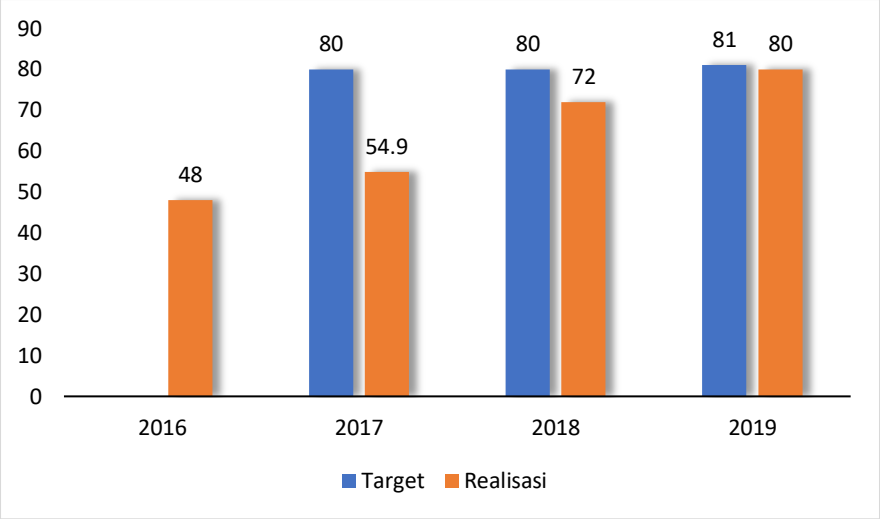

Gambar 2. Capaian jumlah lulusan tepat waktu

b. Kualitas Kelembagaan

Rangking PT Nasional ditetapkan sebagai indikator kinerja sasaran strategis untuk mengukur mutu dan tingkat daya saing perguruan tinggi di tingkat nasional dan membangun kesadaran pentingnya perguruan tinggi hadir dalam pemeringkatan kualitas perguruan tinggi Indonesia. Persaingan untuk menjadi yang terbaik akan mendorong perguruan tinggi selalu mengacu pada kriteria yang digunakan dalam menentukan pengembangan universitas dan programnya. Sehingga apapun kriteria yang digunakan oleh lembaga pemeringkat, secara otomatis akan diadopsi sebagai panduan dalam menyusun program kerja sekaligus sistem penilaian kinerja internal. Sejalan dengan rencana strategis Kemenristekdikti, program ini dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya perguruan tinggi berkualitas, dikelola secara otonom dalam lingkungan organisasi yang sehat, sehingga mampu menghasilkan luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi. Secara khusus ini ditujukan untuk mendorong peningkatan reputasi akademik perguruan tinggi menuju *World Class University* (WCU).

Meningkatnya kualitas kelembagaan UNP merupakan sasaran yang harus dicapai dengan indikator kinerja yang akan terus ditingkatkan yaitu rangking PT Nasional, dan nilai akreditasi institusi. Nilai akreditasi institusi UNP, terhitung sejak 2016, sudah mencapai target indikator kinerja Unggul (A) berdasarkan SK BANPT 2989/SK/BAN-PT/Akred/PT/XII/2016, meskipun sebenarnya ditargetkan pada 2017. Adapun indikator kinerja tentang rangking PT Nasional, UNP mentargetkan pada posisi rangking 50 besar hingga 2018. Namun dengan kerja keras dan peningkatan kinerja kelembagaan diberbagai sisi, UNP berhasil melampaui target yakni berada pada rangking ke-26 di tahun 2018. Tahun 2019, UNP menargetkan masuk 24 besar rangking PT Nasional, namun realisasinya hanya mencapai rangking 25. Meningkatnya peringkat Universitas Negeri Padang dapat dilihat pada Gambar 1.5.

Meskipun di tahun 2019 UNP menargetkan peringkat 24, namun rangking 25 bukan hal yang buruk mengingat di tahun 2018 peringkat UNP mencapai peringkat 26 dari target masuk 50 besar. Bila dibandingkan dengan daerah-daerah terdekat di Pulau Sumatera, peringkat UNP di 25 besar, masih berada di bawah PTN-PTN lainnya, seperti; Universitas Andalas (11), Universitas Sumatera Utara (13), dan Universitas Syiah Kuala (23).

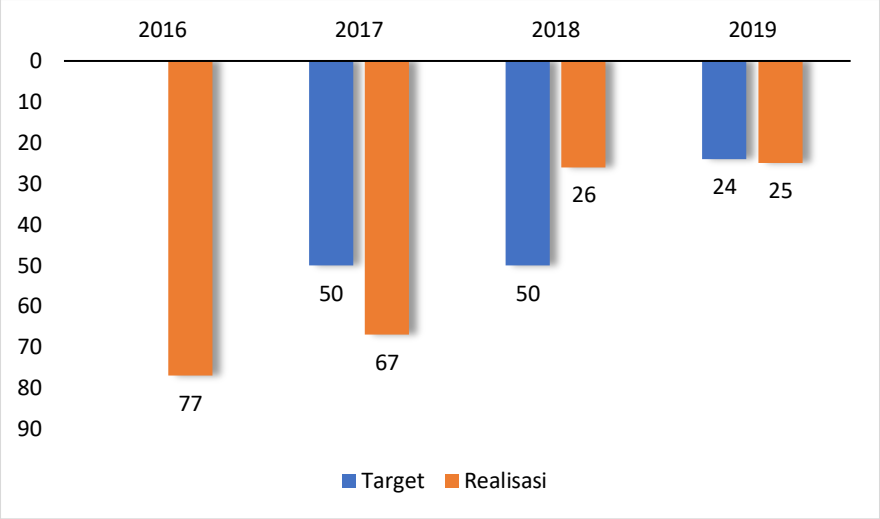

Gambar 3. Peringkat UNP secara nasional

Di sisi lain, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas publik, UNP secara aktif membangun sistem penjaminan mutu internal hingga eksternal, bahkan internasional. Untuk membuktikan bahwa sistem penjaminan mutu internal telah dilaksanakan dengan baik dan benar, UNP diakreditasi oleh lembaga penjaminan mutu eksternal. Sampai akhir 2019, ada 4 program studi di UNP yang sudah diakreditasi melalui AUN-QA (*Asia University Network-Quality Assurance*) dan dinyatakan dengan hasil BAIK. Sementara itu, ada 4 prodi lagi yang sedang menunggu waktu untuk divisitasi, diluar beberapa prodi yang juga diakreditasi melalui ASIIN (lembaga akreditasi internasional dari Jerman untuk disiplin ilmu rekayasa, matematika dan sains, pertanian dan biologi). Selain prodi, UNP juga mengajukan sertifikasi untuk optimalisasi layanan seperti sertifikasi laboratorium, perpustakaan dan layanan lainnya.

c. Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya

UNP menyadari bahwa peningkatan kualitas SDM sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, proses belajar mengajar, dan pelayanan yang memuaskan, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu UNP secara terus menerus berupaya meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan setiap waktu. Peningkatan kompetensi menjadi salah satu investasi penting untuk kebijakan menunjang ketersediaan SDM yang profesional, pelaksanaan tridharma yang berkualitas, dan pelayanan yang prima. Sementara itu, penambahan kuantitas juga penting untuk memberikan pelayanan memadai kepada mahasiswa dan masyarakat.

Peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas sumberdaya sebagai salah satu sasaran utama program dan kegiatan dalam rencana strategis UNP digambarkan oleh beberapa indikator. Tabel berikut menunjukkan bahwa secara umum, sasaran strategis ini relatif telah tercapai sesuai target yang ditetapkan khususnya di tahun 2017 dan 2018, terutama mengenai persentase dosen S3, persentase dosen bersertifikat pendidik, serta jumlah buku teks ber-ISBN karya dosen. Tabel 3 menampilkan data capaian kinerja sasaran meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya.

Tabel 3. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	2017		2018		Target 2019
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya Relevansi, Kualitas, dan Kuantitas Sumber Daya	Persentase dosen berkualifikasi S3	25.65%	28%	30.86%	33%	33.07%	35
	Persentase dosen bersertifikat pendidik	92.20%	93%	95.73%	95%	89.31%	96
	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa	1:30	1:26	1:33			1:28
	Jumlah buku teks karya dosen dengan ISBN	80	70	75			80
	Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala				35%	30%	35%
	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar				6%	6.50%	7%

Muncul sejumlah persoalan terkait rasio dosen mahasiswa yang kian melebar menjauhi target 1:26. Bahkan capaian untuk 2017, cenderung menurun dibanding 2016. Demikian halnya dengan karya dosen dalam bentuk buku teks, terlihat bahwa capaian 2016 masih lebih baik dibanding 2017, meski melebih target yang direncanakan. Berdasarkan analisis data, naiknya rasio dosen-mahasiswa disebabkan dua hal. Pertama, adanya sejumlah dosen yang memasuki masa purna tugas dengan jumlah signifikan. Kedua, penambahan jumlah mahasiswa yang diterima sebagai konsekuensi dari pertambahan jumlah prodi baru, fasilitas dan sarana gedung perkuliahan dan target penerimaan BLU. Dari fenomena ini, UNP perlu melakukan analisis dan kajian faktual, untuk merencanakan program dan kegiatan di tahun-tahun berikutnya agar capaian unjuk kerja semakin baik dan unggul.

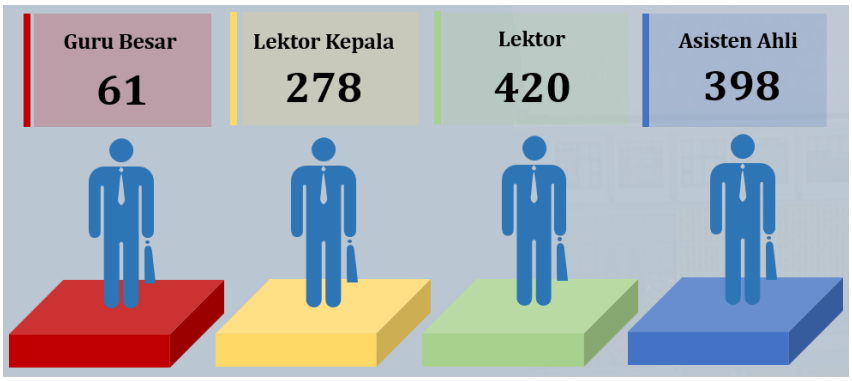

Gambar 4. Komposisi Jabatan Fungsional Dosen UNP 2019

Sementara itu komposisi dosen FIS UNP dapat dilihat dari gambar 5 di bawah ini

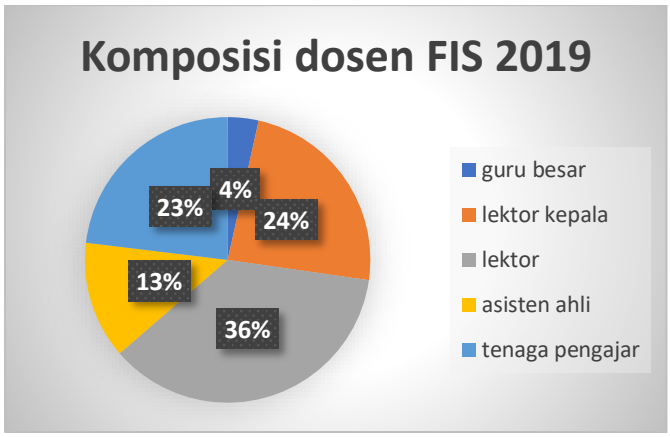

Gambar 5. Komposisi Kepangkatan Fungsional Dosen FIS

Komposisi tersebut didadapat dari 143 dosen yang terdiri dari 5 guru besar, 34 lektor kepala, 52 lektor, 19 asisten ahli dan 33 orang tenaga pengajar

Sebagai sebuah *teaching university* menuju *research university*, indikator dosen berkualifikasi S3 menjadi sangat penting untuk eksistensi UNP dimasa datang. Semakin besar jumlah staf pengajar berkualifikasi S3, maka semakin baik reputasi UNP dalam pembelajaran. Hingga pertengahan 2019, persentase dosen berkualifikasi S3 baru 33.93% atau sebanyak 302 dari 891 dosen PNS UNP. Adanya peningkatan dari tahun 2016 lebih dari 5% (dari 236 menjadi 275 orang) hingga melewati target 28% di tahun 2017, tidak diikuti oleh capaian yang sama di tahun 2018 dan 2019. Hal ini menunjukkan bahwa angka 35% pada tahun 2019 agak sulit untuk dicapai, apalagi dengan bertambahnya jumlah dosen CPNS secara signifikan ditahun 2018. Jika ditambahkan dengan dosen baru, maka persentase dosen S3 hanya mencapai 30% saja. Namun demikian, UNP terus mendorong staf agar menyelesaikan studi doktoral dan atau melanjutkan pendidikan ke jenjang S3 bagi dosen yang masih S2, agar persentase sekitar 60% tahun 2020 bisa terpenuhi. FIS memiliki 44 orang dosen dengan kualifikasi pendidikan S3, dengan demikian sebesar 31%

Hal lain yang sebenarnya juga menjadi beban moral sekaligus kewajiban dosen adalah menulis buku. Seorang dosen, pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari aktivitas menulis, baik buku ataupun artikel di jurnal. Indikator ini bukan hanya menentukan kualitas keilmuan seorang dosen, tetapi menunjukkan adanya warisan pemikiran untuk membangun peradaban masyarakat di masa datang melalui pendidikan. Realisasi karya dosen berupa buku teks ber-ISBN hingga 2017 adalah 75 buku. Angka ini telah melampaui target yakni 70, namun lebih rendah dari realisasi tahun 2016. Mengingat pentingnya karya dosen ini, serta keterkaitan langsungnya dengan karir, pangkat dan eksistensi dosen dimasa datang, UNP masih perlu terus mendorong staf pengajar agar menghasilkan karya-karya berkualitas. Penulisan bahan ajar dan buku ajar/diktat/modul untuk mata kuliah tertentu, perlu didorong dan dikembangkan agar bermuara pada lahirnya karya berupa buku teks. Dengan demikian, reputasi dan karir dosen sebagai staf pengajar serta UNP sebagai lembaga pendidikan akan semakin cemerlang.

d. Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

Riset merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan berpengaruh pada

perkembangan sebuah perguruan tinggi dan bangsa pada umumnya. Sebagai salah satu universitas, posisi rangking UNP saat ini di urutan 25 menggambarkan bahwa produksi karya ilmiah masih perlu terus ditingkatkan. Untuk mengukur produktivitas penelitian atau riset dan pengembangan, UNP menetapkan enam indikator yang meliputi jumlah HKI yang didaftarkan, jumlah publikasi internasional, jumlah sitasi karya ilmiah, jumlah prototype R&D, jumlah prototype industri dan jumlah publikasi nasional. Gambaran tingkat ketercapaian sasaran meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan di UNP diuraikan dalam Tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2016	2017		2018		2019	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Relevansi dan Produktivitas Riset dan Pengembangan	Jumlah HKI yg didaftarkan	14	10	101	100	142	143	20
	Jumlah publikasi internasional	55	120	547	520	650	675	828
	Jumlah sitasi karya ilmiah	177	300	900	1067	3352	2900	4620
	Jumlah *prototype* R&D	14	20	86	30	61	65	0
	Jumlah *prototype* industri	1	4	21	6	5	7	0
	Jumlah publikasi nasional	750	500	804	-	-	-	-

Berdasarkan Tabel 4, capaian yang telah diperoleh pada tahun 2016 hingga 2018 untuk semua indikator menunjukkan peningkatan yang signifikan. Namun pada tahun 2019, beberapa aspek perlu mendapatkan perhatian agar UNP tetap berkinerja baik, seperti jumlah HKI, prototipe R&D dan prototipe industri. Adapun jumlah publikasi nasional dan internasional biasanya mengalami kenaikan signifikan di setiap akhir tahun.

Jika beranjak dari jumlah dosen UNP sebanyak 1074 orang, maka jumlah publikasi yang dihasilkan masih belum memuaskan dan karenanya perlu ditingkatkan. Data ini menunjukan bahwa belum semua dosen menghasilkan publikasi ditingkat internasional. Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas publikasi, UNP terus melakukan berbagai upaya diantaranya memprogramkan 2 seminar internasional tiap fakultas, coaching clinic penulisan artikel, dan mewajibkan publikasi internasional untuk mahasiswa S2 dan S3. Melalui berbagai program ini, diharapkan jumlah publikasi internasional UNP terus meningkat dan melampaui target jumlah publikasi yang dicanangkan pada tahun 2019.

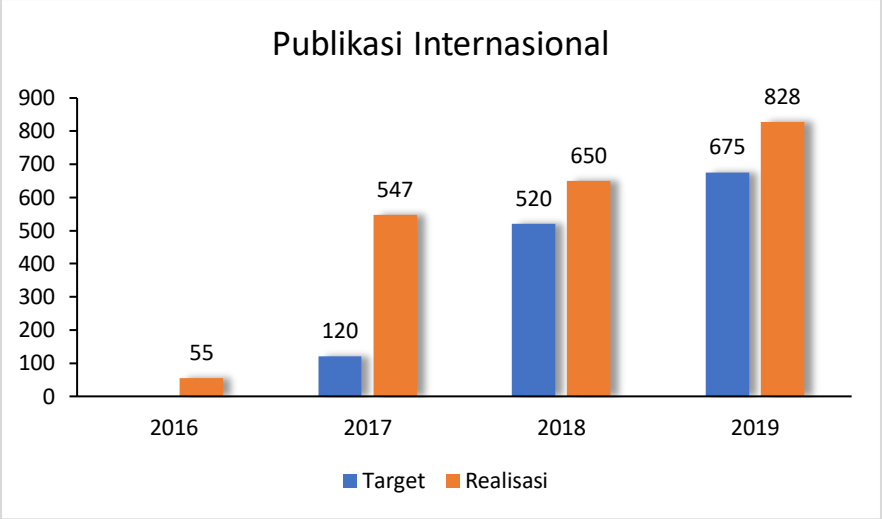

Gambar 6. Target dan realisasi jumlah publikasi Internasional

Adapun terkait jumlah sitasi karya ilmiah yang merupakan tolak ukur tingkat keterpakaian atau kemanfaatan suatu karya yang dihasilkan, menunjukkan perkembangan yang meyakinkan hingga tahun 2019.

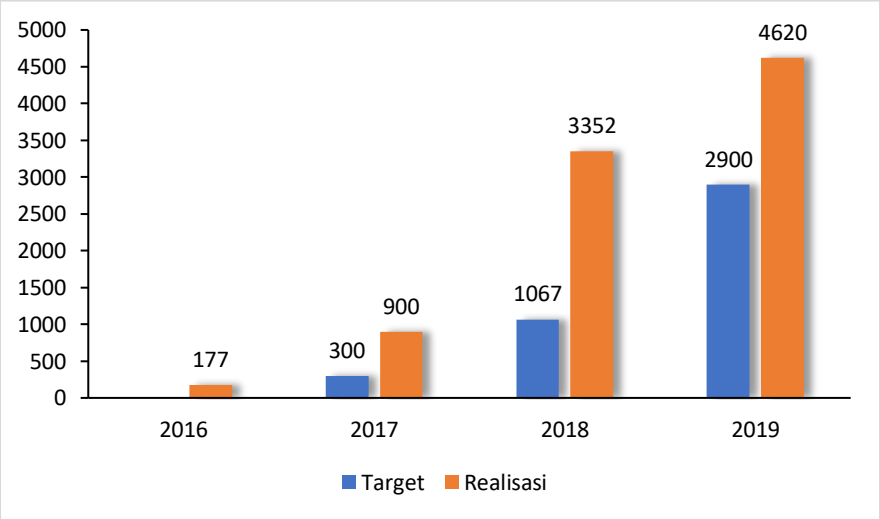

Gambar 7. Target dan realisasi jumlah sitasi karya ilmiah

Peningkatan jumlah sitasi karya ilmiah dosen di UNP memang sangat menggembirakan. Tahun 2017 jumlah sitasi mencapai 900 jauh melampau target yang ditetapkan yaitu sebesar 300, demikian halnya untuk 2018 dan akhir 2019. Berdasarkan realisasi ini dapat disimpulkan capaian kinerja UNP untuk indikator jumlah sitasi mencapai 200 s.d. 300%. Capaian ini juga sudah melewati jumlah sitasi yang ditargetkan dalam renstra UNP untuk tahun 2019. Gambaran jumlah sitasi UNP di Google Scholar tahun 2019 terlihat pada Gambar 1.10.

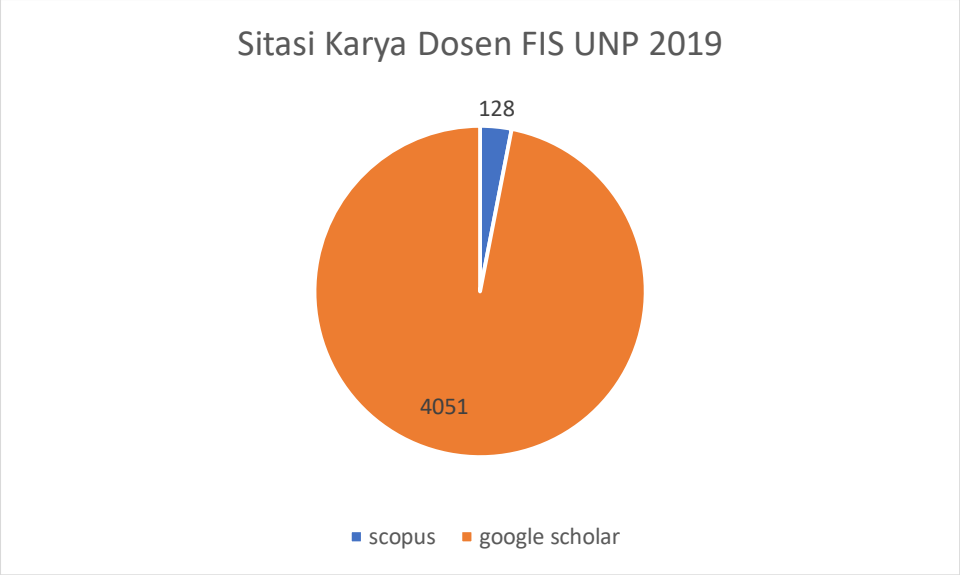

Gambar 8. Sitasi Karya Dosen FIS UNP 2019

Data sitasi ini sebenarnya belum mencapai jumlah yang maksimal, jika saja setiap dosen di UNP membuat satu karya ilmiah dan disitasi oleh satu karya lainnya. Beberapa catatan permasalahan penyebab belum optimalnya jumlah sitasi adalah jumlah publikasi dosen yang belum optimal dan karya dosen belum semuanya dijadikan referensi oleh mahasiswa yang berada di bawah bimbingannya. Di samping itu, kualitas publikasi masih perlu ditingkatkan agar karya yang dihasilkan memberikan konstribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dirujuk oleh banyak orang. Untuk menjaga jumlah sitasi tiap tahun tetap tercapai dan mengalami peningkatan, UNP merencanakan berbagai program antara lain melaksanakan seminar internasional, *coaching clinic* penulisan artikel ilmiah dan mewajibkan publikasi karya ilmiah bagi mahasiswa yang akan diwisuda.

Indikator lain dari produktivitas riset dan pengembangan diukur melalui prototipe sebagai luaran penelitian, dengan Tingkat Kesiapan Teknologi (*Technology Readiness Level, TRL*) yang tinggi. Prototipe R&D dapat dijadikan tolak ukur tingkat kematangan suatu topik penelitian. UNP memiliki sejumlah prototype R&D berupa perangkat pembejalaran maupun produk teknologi lainnya. Jumlah prototype R&D di UNP relatif baik, realisasi melebihi target yang ditetapkan. Hanya saja, untuk tahun 2019 belum ada data pendukung yang menjelaskan capaian akhir. Adapun capaian prototipe industri UNP tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan atau belum mencapai target. Karena itu, secara umum, UNP masih perlu mendorong hilirisasi hasil-hasil penelitian, baik jumlah maupun TRL-nya melalui program-program yang komprehensif dan kolaboratif.

Dengan potensi SDM berkualitas yang dimiliki UNP, jumlah publikasi, prototipe dan luaran lainnya yang dihasilkan melalui penelitian, masih dapat ditingkatkan. Jika satu dosen menghasilkan satu publikasi pertahun maka jumlah publikasi dapat meningkat. Budaya meneliti dan publikasi masih perlu terus dibangun. Untuk itu, berbagai program perlu terus digalakkan. Di tingkat lembaga, LP2M secara lebih luas perlu memfasilitasi diseminasi dan pemanfaatan hasil penelitian, termasuk mengokohkan Pusat Unggulan Iptek yang ada, menuju terbangunnya *Science & Techno Parks*. Selain itu, regulasi terkait kewajiban lulusan program S1, S2 dan S3 yang mengharuskan menulis publikasi di jurnal nasional sebagai salah satu syarat untuk wisuda, perlu ditegakkan secara konsisten.

e. Kapasitas Inovasi

Sasaran strategis tentang menguatnya kapasitas inovasi UNP merupakan target yang dicanangkan untuk menjamin hasil penelitian dan pengembangan dapat diproduksi dan dimanfaatkan oleh pengguna. Hilirisasi hasil penelitian harus terus diupayakan agar luaran penelitian memberikan manfaat ekonomi secara langsung pada masyarakat luas. UNP terus berupaya mendorong dosen untuk menghasilkan luaran penelitian yang bermuara pada produk inovasi.

Pada tahun 2016, jumlah produk inovasi belum terdeteksi. Tahun 2017 UNP menargetkan 2 unit produk inovasi dan berhasil merealisasikan hingga 10 unit produk inovasi. Untuk tahun 2018, pencapaian UNP memenuhi target (4 produk), namun untuk 2019, target belum dapat dipenuhi hingga akhir tahun. Mengingat tidak semua hasil riset bermuara pada produk inovasi, pada target jangka menengah tahun 2019 ditetapkan 4 unit jumlah produk inovasi. Dibanding dengan lembaga lain dan upaya UNP untuk mengokohkan PUI dan membangun STP, UNP perlu terus mengembangkan program untuk penguatan produk inovasi.

f. Kualitas Pelayanan

Peningkatan mutu akademik juga dilakukan melalui peningkatan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan staf pengajar. Mutu layanan administrasi akademik bermuara kepada peningkatan mutu akademik secara kesuluruhan. Layanan administrasi akademik yang dilakukan oleh UNP baik untuk mahasiswa maupun staf pengajar dipermudah melalui pemanfaatan media teknologi informasi yang dilaksanakan secara online. Bentuk layanan administrasi akademik tersebut adalah:

1) Melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru mulai dari proses pendaftaran sampai pemberitahuan hasil seleksi;
2) Pengisian lembar rencana studi dan pemberitahuan hasil studi mahasiswa;
3) Pengisian hasil belajar mahasiswa oleh staf pengajar;
4) Pemberitahuan informasi akademik kepada mahasiswa dan dosen;
5) Bimbingan akademik staf pengajar kepada mahasiswa dilakukan secara tatap muka dan komunikasi melalui media online;
6) Beberapa progam studi sudah mulai melaksanakan perkuliahan melalui e-learning.

g. Tata Kelola

Upaya mewujudkan tata kelola yang baik bukanlah suatu hal yang mudah seperti membalik telapak tangan. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan perjuangan dan waktu cukup panjang. Sekalipun memiliki kelemahan, penyelenggaraan pelayanan dan pengelolaan keuangan yang baik merupakan sarana untuk mewujudkan good governance. Ini merupakan implementasi dari Permenpan dan RB Nomor 60 tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga.

Tingkat ketercapaian sasaran terwujudnya tata kelola yang baik UNP dengan indikator kinerja opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik, sejak tahun 2016 hingga 2019 mendapatkan predikat WTP. Penilaian atas Laporan Keuangan UNP dilakukan dengan Audit oleh akuntan publik, yang mana, audit tersebut dilakukan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Indeks kepuasan layanan UNP kepada stakeholders mencapai rata-rata 85% setiap tahun. Indeks ini masih perlu dikuatkan untuk menguatkan kedudukan UNP sebagai satker BLU. Tindak lanjut temuan BPK sebagai wujud

kepatuhan UNP, diimplementasikan hingga 100%, meskipun konsekuensi pengembalian keuangannya baru mencapai 50% hingga 2019.

Pokok pokok kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum UNP yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) di Indonesia. Laporan Keuangan UNP disusun berdasarkan basis akrual terdiri atas Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut berbeda dengan laporan keuangan untuk entitas bisnis pada umumnya. Untuk penilaian atas Laporan Keuangan pada pelaporan tahun anggaran 2017, telah mulai dilakukan oleh Auditor Publik di akhir bulan Februari 2018.

4. Tata Pamong (Kekuatan dan Kelemahan)

a. Statuta

Statuta UNP disahkan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 67 tahun 2016. Statuta 2016 disusun untuk mengakomodasi perkembangan kelembagaan yang terjadi dan antisipasi terhadap tantangan, peluang dan ancaman di masa depan. Jika dilihat secara sistematika Statuta ini terdiri dari 98 pasal 17 bab, dengan pembagian materi yang berisikan:

1) Visi, Misi, Dan Tujuan
2) Identitas
3) Penyelenggaraan Pendidikan
4) Penyelenggarakan Pendidikan Akademik, Vokasi, Dan Profesi.
5) Kebebasan Akademik Dan Otonomi Keilmuan
6) Gelar Dan Penghargaan
7) Susunan Organisasi
8) Tatacara Pengangkatan Pimpinan, Senat, Pelaksana Akademik, Pelaksana Administrasi
9) Dosen Dan Tenaga Kependidikan
10) Mahasiswa Dan Alumni
11) Kerjasama
12) Sarana Dan Prasarana
13) Pembiayaan
14) Pengawasan Dan Akreditasi

Aktivitas dan kinerja pengelolaan akademik dan non-akademik di UNP harus sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi global dengan tetap memperhatikan Statuta, Organisasi dan Tata Kerja serta Renstra.

Seiring dengan dinamika Lembaga Perguruan Tinggi di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dengan adanya PP No. 66 tahun 2018 dan UU No. 12 tahun 2012. Perubahan eksternal ini memerlukan review terhadap status pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan. Sejak tahun 2015, UNP berubah status menjadi salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No. 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015.

Struktur organisasi dan tata kelola keuangan menyesuaikan sesuai peraturan Kemenristekdikti dan Kementerian Keuangan. Agar tugas pokok maupun tujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas berjalan dengan lancar serta tercapai sesuai dengan yang diharapkan diperlukan layanan unggul dan berkualitas. Penataan organisasi dan tata kerja dilakukan agar responsif terhadap kebutuhan dan perkembangan universitas serta

perkembangan global.

Struktur organisasi dan tata kerja UNP berdasarkan Keputusan Menristekdikti Nomor 10 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) UNP. dirasakan tidak sesuai lagi dengan beban tugas dan kerja. Karena itu diperlukan adanya penyesuaian dan perubahan OTK. Perubahan menimbang berbagai aspek, seperti: (1) Perkembangan jumlah mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan; (2) Perkembangan jumlah fakultas, Program Pascasarjana, jurusan, program studi, dan laboratorium/studio/ bengkel/workshop/¬kebun percobaan; (3) Perkembangan sarana, prasarana sebagai aset universitas. Sementara permasalahan yang muncul yakni: (1) Beban kelembagaan yang tinggi dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; (2) tidak seimbangnya beban kerja antara unit yang satu dengan unit yang lain, (3) diperlukan adanya unit kerja baru yang sangat dibutuhkan namun belum tercantum dalam OTK UNP, (4) ketidaksesuaian antara unit kerja yang ada dengan kegiatan yang harus dilaksanakan, serta (5) diperlukan organ baru dalam rangka menunjang kegiatan seperti Badan Pengelola dan Pengembangan Usaha (BPPU), Badan Penjaminan Mutu Internal, Badan Pengawas, dan Unit lainnya.

Perubahan yang diusulkan tahun 2013 sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan lembaga dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan tinggi yang baik bagi masyarakat, serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 pasal 32 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, kemudian diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan beberapa aturan lainnya yang terkait.

Perubahan OTK keempat diusulkan pada tahun 2018 guna menyesuaikan dengan organ-organ pengelolaan BLU UNP. Dasar utama dari perubahan ini adalah Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor. 335/KMK.05/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Penetapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU. Perubahan OTK ini juga menyesuaikan dengan Perubahan yang terjadi di Tingkat Kementerian yaitu semula berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sekarang berada dibawah naungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagaimana dituntut oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015.

Perubahan struktur organisasi UNP diarahkan pada pembagian dan pendelegasian tugas dan fungsi yang lebih jelas untuk masing-masing unit/unsur yang ada termasuk beberapa penambahan seperti; Dewan Pengawas dan BPPU, dilengkapi dengan pengaturan kembali Tugas Pokok Satuan dan Unit Kerja di Tingkat Biro, usulan penambahan Fakultas Pendidikan Psikologi yang sebelumnya belum ada dalam SOTK.

Pembentukan Dewas BLU UNP merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Dewas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU UNP oleh Pejabat BLU UNP terutama mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana Strategis Bisnis Jangka Panjang, dan ketaatan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pembentukan BPPU bertujuan untuk membantu UNP melakukan optimalisasi

pemanfaatan asset dan inventarisasi sumberdaya berupa sarana prasarana, aset sumber daya manusia, pembuatan rencana program kegiatan pengembangan usaha, dan inisiator kerjasama dengan unit atau lembaga lain didalam ataupun dari luar UNP yang tujuan utamanya adalah peningkatan pendapatan income generating BLU UNP.

Penataan tugas dan fungsi di lingkungan Biro ditujukan guna menghindari tumpang tindih tugas dan fungsi sehari-hari diantara bagian satu dengan bagian lainnya dalam Biro Umum dan Keuangan (BUK). Pemindahan ini didasarkan terdapatnya tumpang tindih tugas dan fungsi subbagian hukum dan tatalaksana dengan subbagian tenaga kependidikan di bidang tugas melaksanakan analis jabatan, pembuatan surat-surat keputusan atau peraturan Rektor, bidang ketatalaksanaan yaitu pelaksanaan pengambilan sumpah jabatan.

Setelah berdirinya Fakultas Pariwisata dan Perhotelan pada tahun 2015, usulan penambahan dan penataan yang dilakukan di tingkat fakultas terdiri dari Penambahan Fakultas Pendidikan Psikologi, sehingga dengan demikian secara keseluruhan UNP memiliki 9 (sembilan) fakultas yaitu;

a) Fakultas Ilmu Pendidikan disingkat FIP;
b) Fakultas Bahasa dan Seni disingkat FBS;
c) Fakultas Ilmu Sosial disingkat FIS;
d) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam disingkat FMIPA;
e) Fakultas Teknik disingkat FT;
f) Fakultas Ilmu Keolahragaan disingkat FIK;
g) Fakultas Ekonomi disingkat FE;
h) Fakultas Pariwisata dan Perhotelan disingkat FPP;
i) Fakultas Pendidikan Psikologi disingkat FPPsi.

1) Penataan Biro Umum dan Keuangan

Penataan dan Pengaturan Tugas pada Bagian unit kerja dibawah Biro Umum dan Keuangan, dilakukan pada tingkat subbagian pada Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara (UHBMN) dan Bagian Kepegawaian. Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja UNP, Subbagian Hukum dan Tatalaksana berada dibawah Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara pindah ke Bagian Hukum dan Kepegawaian. Sehingga Bagian Umum, Hukum dan Barang Milik Negara (UHBMN) berubah nama menjadi Bagian Umum dan Barang Milik Negara (UBMN) dan Bagian Kepegawaian berubah nama menjadi Bagian Hukum dan Kepegawaian.

2) Penataan Badan

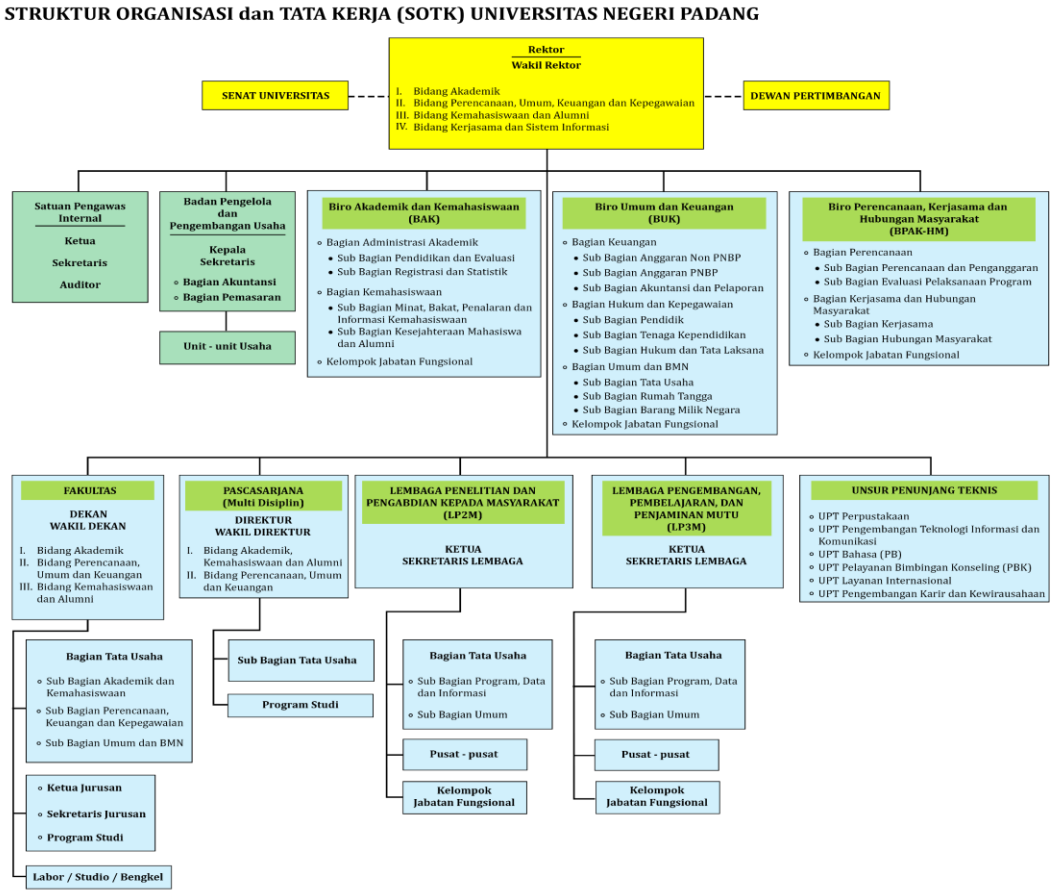

Gambar 9. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Universitas Negeri Padang

Sebagai bagian dari sebuah sistem yang bernama Universitas Negeri Padang, maka saat ini Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pengelola program studi diploma mengacu kepada Statuta UNP yang telah ditetapkan melalui Permenristek Dikti Nomor 67 tahun 2016 tanggal 12 Oktober 2016. Mengacu kepada Statuta ini, maka SOTK pengelola program studi diploma dalam hal ini FIS UNP telah memiliki organ yang lengkap, yaitu (1) Dekan dan Wakil Dekan I, II, dan III ; (2) Kepala Bagian (Kabag) dan 3 buah Kepala Sub Bagian (Kasubag) serta Tenaga Kependidikan ; (3) Pimpinan Jurusan dan Program Studi (Prodi), serta para dosen ; (4) Senat Akademik Fakultas ; (5) Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas serta Unit Penjaminan Mutu (UPM) di tingkat jurusan/prodi.

Kelengkapan SOTK yang dimiliki unit pengelola program diploma sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya, selama ini telah berhasil mewujudkan program kerja yang disusun sebagai upaya mencapai visi-misi unit pengelola secara efektif dan efisien. Hal ini terindikasi dengan semakin baiknya pengelolaan kegiatan akademik serta non akademik yang ditandai oleh : (1) program studi terakreditasi unggul (A) saat ini berjumlah 5 (lima) dari sebelumnya hanya 3 (tiga) ; (2) IPK lulusan saat ini 3,3 dari sebelumnya 3,21 ; (3) serapan anggaran dalam realisasi program kerja saat ini 98,9% dari sebelumnya hanya dalam kisaran 90% ; (4) *Key Performance Index (KPI)* dari sebelumnya 0,8 saat ini telah menjadi 0,85 ; dan (5) raihan prestasi di bidang

kemahasiswaan dalam skala regional dan nasional juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dari sebelumnya 3 (tiga) menjadi 7 (tujuh), demikian juga dengan keterlibatan mahasiswa dalam program kreatifitas kemahasiswaan. Demikianlah beberapa ilustrasi yang menunjukkan bahwa dengan SOTK yang lengkap telah berimplikasi terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja yang dihasilkan FIS UNP sebagai unit pengelola program diploma. Adapun gambaran dari SOTK tersebut dapat dilihat pada bagan SOTK berikut ini.

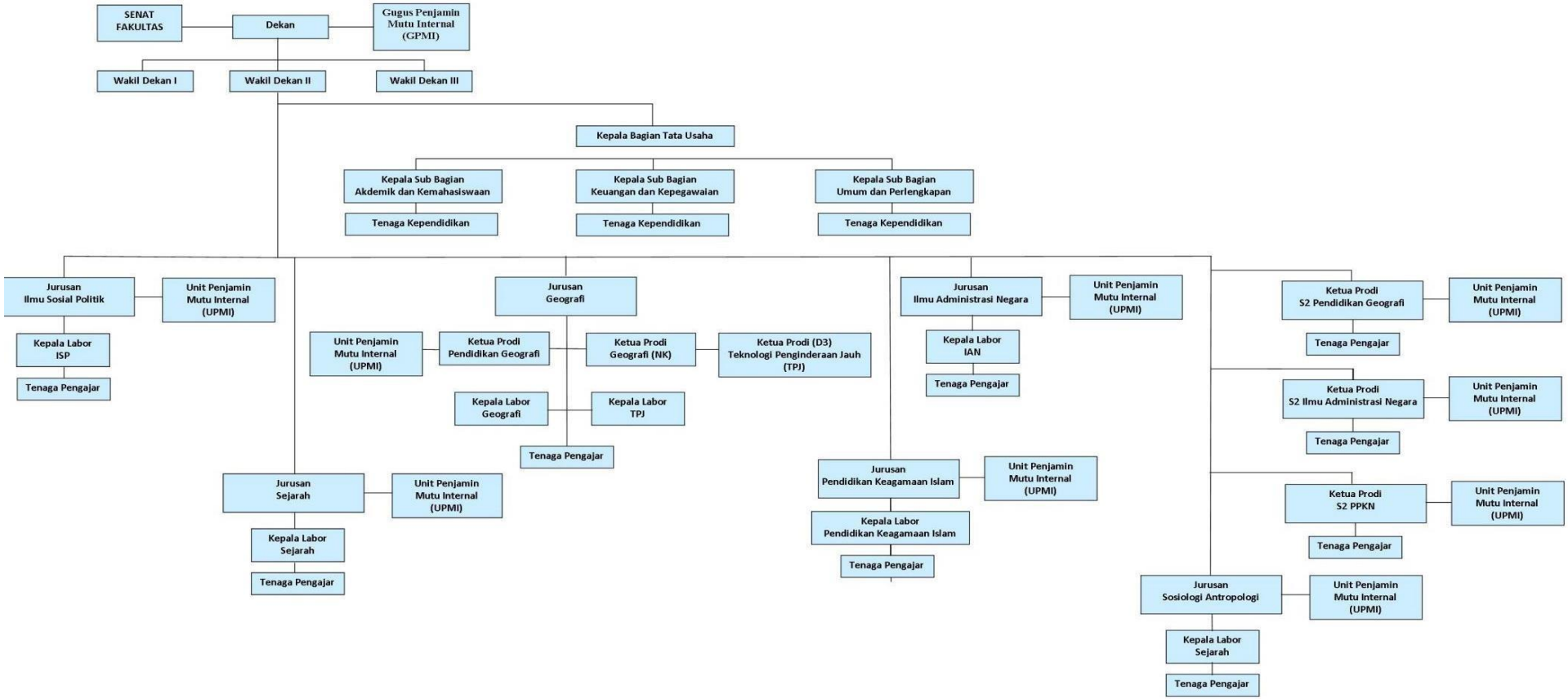
SENAT FAKULTAS
Dekan
Gugus Penjamin Mutu Internal (GPMI)
Wakil Dekan I
Wakil Dekan II
Wakil Dekan III
Kepala Bagian Tata Usaha
Kepala Sub Bagian Akdemik dan Kemahasiswaan
Tenaga Kependidikan
Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian
Tenaga Kependidikan
Kepala Sub Bagian Umum dan Perlengkapan
Tenaga Kependidikan
Jurusan Ilmu Sosial Politik
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Kepala Labor ISP
Tenaga Pengajar
Jurusan Geografi
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Ketua Prodi Pendidikan Geografi
Ketua Prodi Geografi (NK)
Ketua Prodi (D3) Teknologi Penginderaan Jauh (TPJ)
Kepala Labor Geografi
Kepala Labor TPJ
Tenaga Pengajar
Jurusan Sejarah
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Kepala Labor Sejarah
Tenaga Pengajar
Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Kepala Labor IAN
Tenaga Pengajar
Jurusan Pendidikan Keagamaan Islam
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Kepala Labor Pendidikan Keagamaan Islam
Tenaga Pengajar
Ketua Prodi S2 Pendidikan Geografi
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Tenaga Pengajar
Ketua Prodi S2 Ilmu Administrasi Negara
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Tenaga Pengajar
Ketua Prodi S2 PPKN
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Tenaga Pengajar
Jurusan Sosiologi Antropologi
Unit Penjamin Mutu Internal (UPMI)
Kepala Labor Sejarah
Tenaga Pengajar

b. Penjaminan Mutu

Untuk melakukan kegiatan pengkajian dan pengembangan sistem serta mutu pembelajaran. Lembaga khusus Pusat Kajian Kurikulum (PKK) yang dibentuk oleh rektor UNP dengan SK Rektor No.131/UN35/PP/2012 kemudian dilengkapi dengan Tim pengembang kurikulum UNP dengan SK Rektor No. 31/UN35/PP/2012. Pusat Kajian Kurikulum dan Pembelajaran di tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/program studi mempunyai tugas mengkaji dan mengembangkan model, metode, dan media pembelajaran yang efektif, serta memberikan pelatihan atau sosialisasi model-model pembelajaran yang efektif tersebut kepada para dosen di lingkungan UNP. Model pembelajaran yang sudah dihasilkan oleh pusat kajian pengembangan kurikulum dan pembelajaran UNP dan sudah diimplementasikan antara lain adalah model pembelajaran pengembangan karakter mahasiswa, model pembelajaran berbasis web (e-learning), dan model pembelajaran berbasis komputer. Kebijakan pembelajaran pembelajaran e-learning tertuang Buku Panduan Akademik tahun 2015 dengan SK Rektor No. 80/UN35/PP/2015. Pusat IT membuat sistem e-learning yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa melaui website http://elearning.unp.ac.id. Hal ini akan membuat model pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa akan menjadi budaya di lingkungan UNP.

Penjaminan mutu dikordinasikan oleh LP3M di tingkat universitas melalui Pusat Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu (GMPI) ditingkat fakultas dan Unit Penjaminan Mutu (UPMI) ditingkat jurusan/prodi serta Pusat Kajian Kurikulum. Secara rinci tugas penjaminan mutu terdiri dari:

1) Menyusun perangkat dan panduan penjaminan mutu, baik program kegiatan akademik maupun non akademik.
2) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di lingkungan universitas.
3) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kemahasiswaan.
4) Melakukan analisis terhadap pencapaian hasil pelaksanaan penjaminan mutu dari setiap unsur dan atau satuan organ universitas.

Unit pengkajian dan pengembangan sistem mutu dan mutu pembelajaran mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, bereksplorasi, bereskpresi, bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber yang hasilnya dimaanfaatkan oleh universitas dengan sangat baik. Unit-unit penjamin mutu ini bekerjasama dengan tim Unit Pelaksana Teknis Pengembang Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT-PTIK) di bawah koordinasi Wakil Rektor IV untuk peningkatan Learning Outcome (LO).

Panduan akademik universitas dijabarkan dengan menetapkan serangkaian standar prosedur mutu (SOP) pembelajaran, diantaranya SOP No BSPK-01 tentang penyusunan kurikulum , SOP No BSPK-04 tentang penyusunan silabus, SOP No BSPK-05 tentang pelaksanaan perkuliahan, SOP No BSPK-11 tentang pelaksanaan evaluasi hasil belajar, SOP No BSPK-23 tentang penyusunan skripsi, SOP No BSPK-22 tentang Pelaksanaan PL Kependidikan, dan SOP No BSPK-23 tentang pelaksanaan ujian skripsi. Pengendalian standar mutu terkait perencanaan sumber daya pembelajaran mencakup pengendalian standar mutu silabus, standar mutu satuan acara

perkuliahan (SAP), dan standar mutu sarana prasarana perkuliahan. Dalam standar mutu perencanaan tersebut telah diatur bahwa sebelum pelaksanaan perkuliahan dimulai, semua mata kuliah yang ditawarkan, jadwal perkuliahan, dosen pengampu, dan ruang kuliah sudah ditentukan dan sudah di-upload ke SIA UNP.

Standar mutu proses pembelajaran terkait dengan syarat-syarat kekelulusan dan dilakukan secara konsisten. Pengendalian mutu evaluasi perkuliahan atau penilaian hasil belajar mahasiswa mencakup pengendalian tentang ketepatan jenis evaluasi yang digunakan, yang berupa ujian tulis, pemberian tugas, dan pengamatan dosen; kelengkapan evaluasi (evaluasi tengah dan akhir semester); ketepatan waktu pelaksanaan ujian, di mana ujian tengah semester dilaksanakan pada minggu ke 8, dan ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke 16; persyaratan untuk mengikuti ujian (mahasiswa yang dapat mengikuti ujian akhir adalah mahasiswa yang kehadirannya mengikuti perkuliahan minimal 80%); penetapan persyaratan dan kriteria kelulusan mahasiswa; dan ketepatan waktu dosen meng-upload penilaian hasil belajar mahasiswa ke dalam portal Sistem Informasi Akademik (SIA) UNP sebagaimana waktu yang telah ditentukan (tiga minggu setelah ujian akhir semester berakhir).

Penulisan tugas akhir (skripsi/tesis/disertasi) mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir dan telah menetapkan standar SOP tersendiri. Rinciannya terdiri dari penyusunan tugas kahir, pelaksanaan ujian, pengajuan dan bimbingan skripsi, dan SOP ujian tugas akhir.UNP memiliki pedoman pelaksanaan tridarma, serta pengintegrasian kegiatan penelitian dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat kedalam proses pembelajaran, serta dokumen-dokumen pendukung.

Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Negeri Padang dilakukan sesuai dengan pedoman pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh Rektor UNP dalam bentuk Pedoman Akademik, Rencana Induk Penelitian, Panduan Penelitian dan Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat. Pedoman dijadikan acuan unit pelaksana yang mewajibkan pengintegrasian hasil penelitian dan PKM ke dalam proses pembelajaran, serta dilaksanakan secara konsisten.

Pengintegrasian kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam kebijakan yang tercantum di dalam Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat dan diperkuat dengan SK Rektor Nomor 201/UN3535/AK2012 tentang etika penelitian dan SK Rektor Nomor 049/UN35/AK/2014 tentang Panduan Pelaksanaan Program Penelitian. Dalam panduan tersebut, dinyatakan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan implementasi dari hasil penelitian. Selain itu, kebijakan ini juga terdapat dalam Peraturan Akademik dengan SK. No. 39/UN35/AK/2012 dan SK. No.86/UN35/AK/2015 dengan lampiran berupa Pedoman Akademik UNP.

Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, baik untuk dosen dan mahasiswa, serta Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diatur dalam panduan yang telah disiapkan oleh Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, dan Bagian Kemahasiswaan BAAK. Panduan penelitian dan pengabdian tersebut diturunkan dari Panduan DRPM Dikti, Dokumen Hibah, dan Rencana Induk Penelitian UNP. Panduan penelitian yang diturunkan tersebut dapat diakses melalui Website: http://lp2m.unp.ac.id/

Berbagai pedoman pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi ini

dilaksanakan secara konsisten oleh sivitas akademika UNP, di mana pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi oleh Badan Penjaminan Mutu Internal UNP. Sedangkan implementasi hasil-hasil kegiatan penelitian ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan implementasi hasil-hasil penelitian ke dalam kegiatan pembelajaran sebagaimana yang telah dikemukakan di atas juga sudah dilaksanakan oleh para dosen. Universitas Negeri Padang menyadari betul akan perlunya pembelajaran yang berbasis penelitian dan berpusat pada mahasiswa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dan dalam rangka mencapai visi menjadi universitas unggul di kawasan Asia Tenggara, sebagaimana yang dinyatakan di dalam visi UNP.

c. Implementasi dan Dampak Kerjasama

Kerjasama merupakan salah satu aspek yang diberikan perhatian khusus dalam upaya pengembangan UNP. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya jabatan Wakil Rektor bidang Kerjasama. Dalam beberapa tahun terkahir terjadi akselerasi peningkatan jumlah dan kualitas kerjasama yang dilakukan UNP, sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Kerjasama Antara UNP dengan Perguruan Tinggi Dan Instansi Pemerintah/Swasta Dalam Dan Luar Negeri

NO.	NAMA FAKULTAS	KEADAAN (Yang masih berjalan)			KEADAAN SELURUHNYA (Termasuk habis masa berlaku)		
		DN	LN	TOTAL	DN	LN	TOTAL
1	Tingkat Universitas	118	18	136	140	22	162
5	Fakultas Ilmu Sosial	15	0	15	20	1	21

Tabel 6. Mitra Kerjasama Dalam dan Luar Negeri di tingkat universitas Yang Masih Aktif

Jenis Mitra	2016	2017	2018
University to University	43	31	40
Non-Government Organization	3	3	3
School	9	2	1
Government	24	18	34
Corporation	13	8	16
Total	**92**	**62**	**94**

Untuk lebih jelasnya, sebaran kerjasama dalam dan luar negeri dapat kita lihat pada Gambar 10.

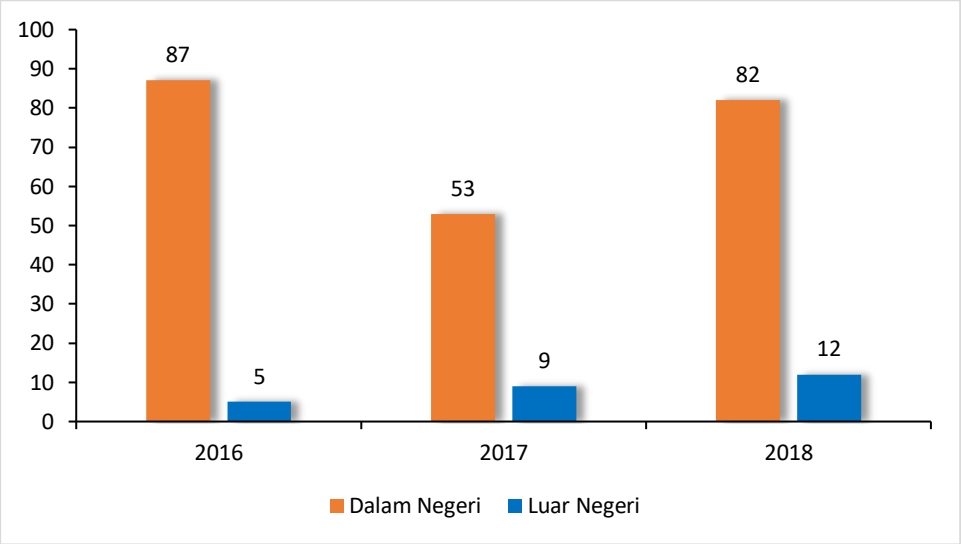

Gambar 10. Sebaran kerjasama UNP dalam dan luar negeri Yang Masih Aktif

Sesuai dengan Visi dan Misinya, UNP telah menjalin banyak kerjasama dengan berbagai instansi dan lembaga, seperti Perguruan Tinggi, SLTA, Perusahaan, LSM dan lain sebagainya. Dari segi pendanaan, UNP melalui pemerintah Indonesia bekerja sama dengan World Bank dalam program IMHERE, Islamic Development Bank (IDB), Pertamina, dan lain sebagainya.

Guna menjamin keberlanjutan kerjasama UNP dengan pihak mitra, UNP selalu melakukan *need assessment* terhadap mitra yang sedang melakukan kerjasama dengan UNP dan calon mitra kerja sama yang disasar oleh UNP. Di samping itu, UNP telah membuat SOP kerja sama dalam negeri dan SOP kerjasama luar negeri. SOP ini antara lain meliputi tata cara pelaksanaan kerja sama, tata cara penerimaan tamu, tata cara pengurusan ijin perjalanan dinas luar negeri, tata cara penandatanganan MoU, tata cara pelaksanaan seminar internasional, dan tata cara pembukaan program dual degree. SOP ini telah disosialisasikan baik di tingkat universitas maupun unit-unit yang lebih rendah.

Pengembangan kerja sama dalam negeri dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kerja sama bidang pendidikan dilakukan dengan perguruan tinggi negeri dan swasta, sekolah-sekolah menengah, serta dinas pendidikan kabupaten/kota. Kerja sama bidang penelitian dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan badan/lembaga yang membutuhkan hasil penelitian dalam rangka pengambilan keputusan, pengembangan wilayah atau peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kerja sama bidang pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Pengabdian yang dilakukan oleh dosen berupa pelatihan penelitian, pelatihan metode mengajar, pelatihan penggunaan media pembelajaran, dan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Pengabdian yang dilakukan mahasiswa adalah praktik kerja industri, praktik kerja lapangan, dan kuliah kerja nyata (KKN).

Berbagai kerjasama akademik ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang riset akademik dan pendidikan. Ruang

lingkup kerjasama meliputi kolaborasi dalam hal studi pasca sarjana, pelaksanaan proyek penelitian bersama, pertukaran staf pengajar dan staf peneliti antar kedua universitas, pertukaran mahasiswa, penyelenggaraan forum pertemuan ilmiah, dan pertukaran informasi akademik. Berbagai kerjasama ini semakin meningkatkan kualifikasi dosen dan mahasiswa serta terbitan artikel dan sitasi yang dimiliki UNP.

Peningkatan kinerja sebagai hasil dari kerjasama yang dibangun dapat dilihat dari berbagai indikator baik berupa program maupun performa hasil karya civitas akademika. Program SEA-Teacher dalam bidang pengajarantelah berlangsung dalam 6 batch bersama Thailand dan Philipina sebagaimana juga Program SEA-Tvet yang lebih bersifat praktis dalam bentuk praktek kerja industri. UNP terlibat dalam program standardisasi internasional melalui Asian University Network Quality Assurance (AUN-QA) sejak tanggal 12 Januari 2018. Program ini melibatkan 8 buah program studi. Terhitung sejak tahun 2019, 4 (empat) program studi yang sudah terstandar AUN-QA yaitu Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Kimia, Manajemen dan Pendidikan Teknik Elektro. Tahun 2020 UNP mengajukan 4 (empat) lagi program studi untuk akreditasi AUN-QA yaitu Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta Pendidikan Bimbingan dan Konseling.

Untuk merumuskan perencanaan strategis ke depan, diperlukan identifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki pada saat ini dalam aspek tata pamong universitas (*university governance*). Penempatan dosen dan tenaga kependidikan merupakan aspek yang cukup mendukung, disamping system kepemimpinan dan pengalihan tugas. Tidak kalah pentingnya aspek partisipasi dalam pengambilan keputusan, baik keputusan strategis maupun operasional dan keterlibatan dalam evaluasi dan monitoring yang dilakukan dalam bidang tridharma. UNP menjalin kerjasama demi peningkatan mutu baik dengan berbagai organisasi profesi, BAN PT, lembaga penjaminan mutu (ISO) dan pada saat terakhir mulai mengembangan system standar mutu dengan lembaga akreditasi internasional seperti AUN-QA dan ISIIN. Meskipun demikian keterbatasan rekrutmen sumberdaya manusia dan pemanfaatan hasil kajian yang komprehensif secara maksimal, masih memerlukan pengembangan dan optimalisasi di masa depan.

5. Sumber Daya Manusia dan Kemahasiswaan

a. Layanan Kemahasiswaan

Di samping meningkatkan akses dan mutu pendidikan, Universitas Negeri Padang juga memberikan perhatian khusus kepada kesejahteraan mahasiswa, pengembangan kecakapan hidup mahasiswa (*soft skills*), keterlibatan mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, dan keterlibatan dalam kegiatan lomba akademik dan non-akademik.

Universitas Negeri Padang senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan mahasiswa dengan berusaha mendapatkan beasiswa dari berbagai sumber yang berasal dari pemerintah maupun swasta. Rata-rata 19% mahasiswa UNP menerima beasiswa. Gambar 1.13 menunjukkan jenis beasiswa dan jumlah penerima beasiswa periode 2015-2019.

Jumlah mahasiswa UNP yang menerima beasiswa dalam lima tahun terakhir cenderung meningkat. Keadaan tahun 2015 menunjukkan terdapat 6.937 mahasiswa penerima beasiswa, dan jumlah penerima beasiswa pada tahun 2019 meningkat 39%

menjadi 9652. Pada tahun 2019 jumlah mahasiswa UNP sebanyak 41.079 orang, jumlah ini menunjukkan lebih kurang 24% mahasiswa UNP menerima beasiswa. Sumber beasiswa, disamping dari program Bidik Misi dan PPA, juga berasal dari 17 sumber pemberi beasiswa lainnya.

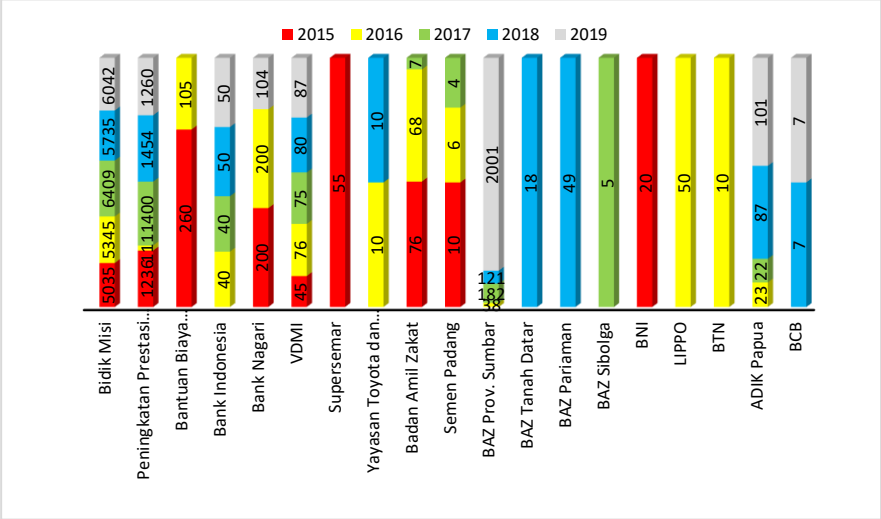

Gambar 11. Jenis Beasiswa dan Jumlah Penerima Beasiswa Periode 2015-2019

Di samping itu, UNP berupaya senantiasa mengembangkan kecakapan hidup mahasiswa. Bentuk kecakapan hidup yang dilaksanakan, antara lain: kewirausahaan, latihan kepemimpinan, dan pembentukan sikap dan mental melalui kegiatan ketahanmalangan survival. Pengembangan kecakapan hidup mahasiswa dilaksanakan pada tingkat program studi, fakultas, dan universitas.

Mahasiswa FIS terlibat dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNP didorong melaksanakan berbagai kegiatan yang melibatkan banyak mahasiswa. Organisasi ini berperan sebagai wadah pembinaan minat, bakat dan penalaran mahasiswa, baik di tingkat jurusan, fakultas, maupun universitas. Gambar 12 menunjukkan daftar nama organisasi kemahasiswaan, jenis kegiatan dan jumlah keterlibatan mahasiswa tahun 2019.

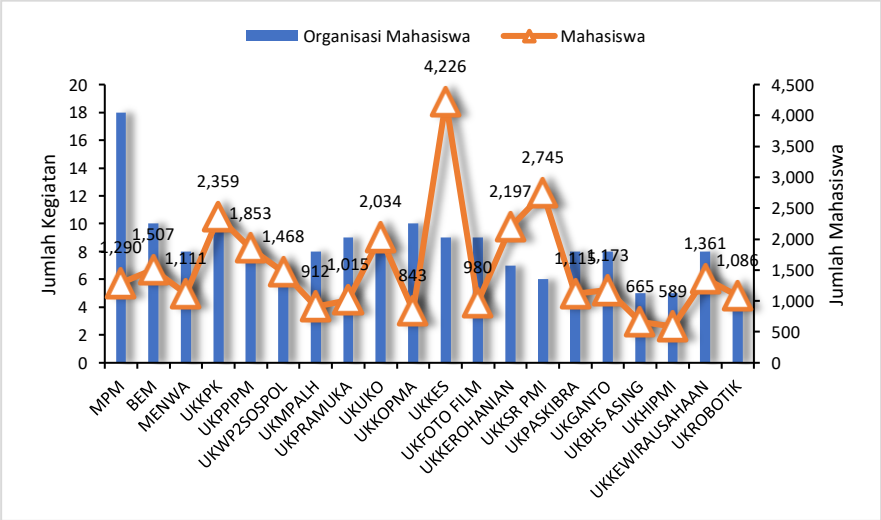

Gambar 12. Daftar Nama Organisasi Kemahasiswaan, Jenis Kegiatan,

dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2019

Di samping mengikuti kegiatan perkuliahan, mahasiswa UNP juga terlibat secara aktif mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler di bawah dua puluh payung unit kegiatan kemahasiswaan di tingkat UNP. Keadaan tahun 2018 menunjukkan sebanyak 29.940 mahasiswa terlibat dalam 166 kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini menunjukkan 73% dari jumlah mahasiswa UNP mengikuti kegiatan ekstrakurikuler.

Di samping melalui unit kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, UNP juga memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang kecakapan hidup (*soft skill*), kepemimpinan, dan ketahanmalangan serta ajang prestasi, baik di tingkat provinsi, nasional, maupun internasional seperti yang terlihat pada Gambar 1.15. Jumlah mahasiswa UNP yang mengikuti program kecakapan hidup sangat mengembirakan. Keadaan tahun 2019 menunjukkan sebanyak 17.630 mahasiswa mengikuti program kecakapan hidup yang diselenggaran di tingkat fakultas dan UNP dengan tujuan untuk meningkatkan kecapan hidup mahasiwa.

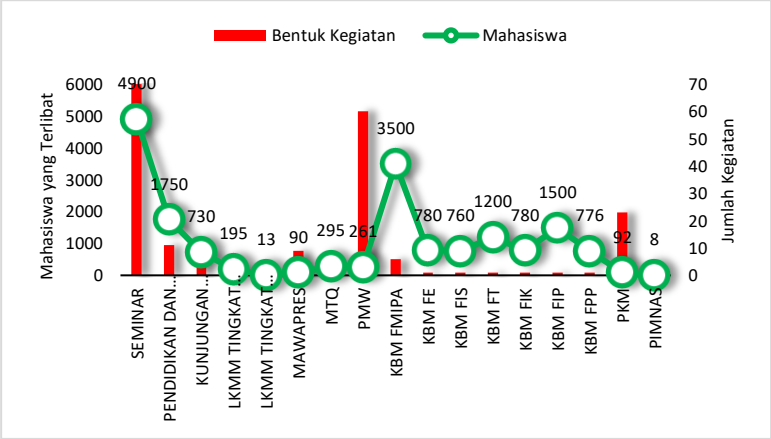

Gambar 13. Kegiatan Kecakapan Hidup dan Jumlah Keterlibatan Mahasiswa Tahun 2019

Mahasiswa UNP telah berhasil mengukir prestasi dengan mendapatkan medali emas, perak dan perunggu pada tingkat nasional dan internasional, seperti yang terlihat pada Gambar 13.

Semenjak tahun 2017 sampai 2019, penghargaan yang diperoleh mahasiswa berupa prestasi yang diperoleh tingkat nasional maupun internasional terus meningkat. Gambar 14 menunjukkan bahwa penghargaan yang diperoleh mahasiswa pada tahun 2017 adalah sebanyak 82 buah dengan kriteria 36 emas, 27 perak dan 19 perunggu. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2018 adalah 75 dengan kriteria 25 emas, 38 perak dan 12 perunggu. Selanjutnya pada tahun 2019 (sampai bulan September), pengahrgaan yang diperoleh mahasiswa sebanyak 63 dengan kriteria 14 emas, 32 perak dan 17 perunggu.

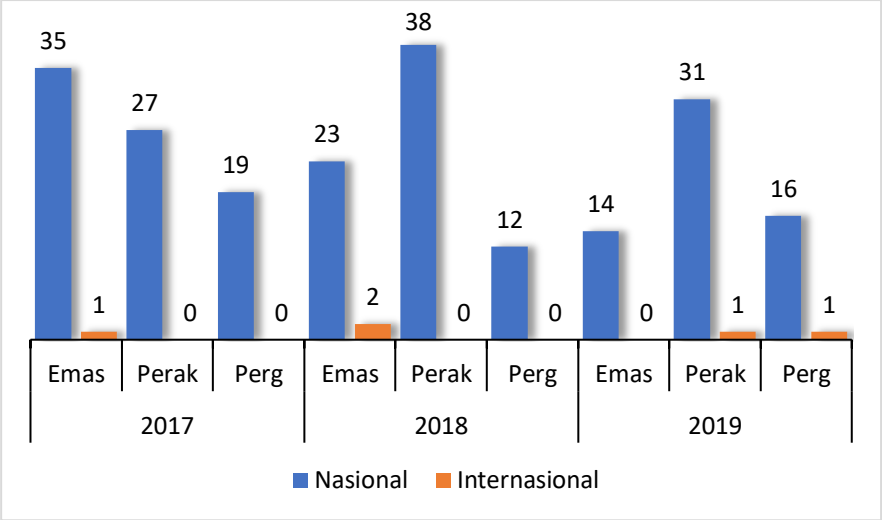

Gambar 14. Penghargaan yang Diperoleh Mahasiswa pada Tahun 2017-2019

b. Dosen dan Tenaga Kependidikan

1) Dosen

Kondisi Dosen UNP tahun 2015 berjumlah 949 orang, tahun 2016 berjumlah 924 orang, tahun 2017 berjumlah 1.086 orang, tahun 2018 berjumlah 1.164 orang, dan tahun 2019 berjumlah 1226 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa jumlah dosen dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2016. Angka statistik menunjukkan kita memiliki 56 orang Guru Besar, 965 orang dosen yang mana 262 orang diantaranya berkualifikasi Doktor, dengan diperkuat oleh dosen tetap non-PNS untuk melayani sekitar 45.000 orang mahasiswa yang tersebar di 103 buah program studi diploma, profesi, sarjana, magister dan doktor.

Pada tahun 2018 dan 2019 kondisi Dosen UNP mengalami kenaikan cukup tinggi karena penyediaan formasi dan pengangkatan Dosen tetap non PNS. Di samping itu, sebagian dosen juga mengikuti studi lanjut dengan status tugas belajar dan izin belajar di dalam dan di luar negeri. Semua dosen memang sudah diwajibkan berkualifikasi minimal Magister (S2) dan UNP akan mewajibkan S3 bagi Dosen-dosen muda terutama yang berumur dibawah dari 35 Tahun. Pada saat ini tercatat 29 orang dosen FIS UNP yang sedang mengambil gelar doktor.

Tabel 7. Dosen FIS UNP yang Sedang Menjalankan Studi Program Doktoral

NO	NAMA	Program Studi	Bulan & Tahun Berangkat	Jurusan	Status (Tugas atau Izin Belajar)
1	Drs. Helfia Edial, MT	S3	2016	Geografi	Izin Belajar
2	Triyatno, S.Pd, M.Si	S3	2016	Geografi	Izin Belajar
3	Febriandi, S.Pd, M.S	S3	2016	Geografi	Izin Belajar
4	Hendri Frananda, S.Pi, M.Sc	S3	2019	Geografi	Tugas belajar
5	Widya Prarikeslan, S.Si, M.Si	S3	2019	Geografi	Izin Belajar

6	Ahyuni, ST, M.Si	S3	2019	Geografi	Izin Belajar
7	Ratna Wilis, S.Pd., M.P	S3	2019	Geografi	Izin Belajar
8	Deded Chandra, S.Si., M.Si	S3	2019	Geografi	Izin Belajar
9	Lailatur Rahmi, M. Pd	S3	2019	Geografi	Izin Belajar
10	Rahmadani Yusran, S.Sos, M.Si	S3	2010	IAN	Izin Belajar
11	Lince Magriasti, S.IP,M.Si	S3	2013	IAN	Izin Belajar
12	Siska Sasmita, S. IP, M.PA	S3	2017	IAN	Tugas belajar
13	Adil Mubarak, S.IP, M.Si	S3	2017	IAN	Izin Belajar
14	Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	S3	2019	IAN	Izin Belajar
15	Indah Muliati, M.Ag	S3	2013	IAI	Izin Belajar
16	Rini Rahman, M.Ag	S3	2013	IAI	Izin Belajar
17	Edi Saputra, M.Pd	S3	2017	IAI	Tugas belajar
18	Dra. Al Rafni, M.Si	S3	2013	PKN	Izin Belajar
19	Drs. Zul Asri, M.Hum	S3	2017	Sejarah	Izin Belajar
20	Hendra Naldi, SS, M.Hum	S3	2018	Sejarah	Izin Belajar
21	Abdul Salam, S.Ag, M.Hum	S3	2019	Sejarah	Izin Belajar
22	Ridho Bayu Yefterson, M.Pd	S3	2019	Sejarah	Izin Belajar
23	Ike Sylvia, S.IP., M.Si	S3	2013	Sosiologi	Izin Belajar
24	Adri Febrianto, S.Sos,M.Si	S3	2016	Sosiologi	Tugas belajar
25	Drs. Ikhwan, M.Si	S3	2016	Sosiologi	Izin Belajar
26	Eka Asih Febriani, S.Pd.,M.Pd	S3	2017	Sosiologi	Tugas belajar
27	Mohammad Isa Gautama, S. Pd, M.Si	S3	2019	Sosiologi	Izin Belajar
28	Reno Fernandes, S.Pd, M.Pd	S3	2019	Sosiologi	Izin Belajar
29	Desri Nora AN, S .Pd., M.Pd	S3	2019	Sosiologi	Izin Belajar

Penerimaan dan pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan secara demokratis dan transparan berdasarkan formasi yang tersedia. Selanjutnya formasi tersebut dikirim ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonenesia untuk ditetapkan sebagai formasi CPNS secara nasional. Formasi pendidik dan tenaga kependidikan yang dijatahkan kepada UNP disosialisasikan secara terbuka melalui koran daerah dan website UNP. Sesuai dengan waktu dan jadwal yang telah ditetapkan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI melaksanakan seleksi secara serentak dan online. Setelah lulus seleksi dari Kemenristekdikti RI, selanjutnya dilakukan seleksi pembidangan oleh UNP. Proses penerimaan berlangsung secara terbuka dan transparan. Dosen dan Tenaga kependidikan setelah lulus seleksi diarahkan untuk mendukung rencana pengembangan jangka panjang jurusan dan program studinya masing-masing. Umumnya, pendanaan sekolah lanjut berasal dari LPDP dan Pemerintah Daerah serta bantuan dari UNP. Penyelesaian studi Dosen yang sedang S3 tersebut sangat variatif.

Sebagian besar diperkirakan akan menyelesaikan studinya dalam waktu lima tahun mendatang.

Pemberdayaan dosen yang baru selesai studi lanjut diarahkan untuk membina perkuliahan yang sesuai dengan spesialisasinya. Di samping itu, dosen tersebut ditugaskan untuk membimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa. Selain itu dosen juga didorong untuk meneliti dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Secara umum semua dosen tersebut diarahkan melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi secara baik.

Sebagai perwujudan kualifikasi profesional pendidik, UNP mengirimkan nama dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk disertifikasi. Dosen UNP tahun 2015 berjumlah sebanyak 949 orang dan disertifikasi sebagai pendidik profesional sebanyak 839 orang (88,41%) dan belum disertifikasi sebanyak 110 orang (11,59%). Selanjutnya dari tahun 2016 sampai 2017 dosen yang telah disertifikasi semakin meningkat, namun pada tahun 2018 dan 2019 menurun menjadi 66,58% dan 63,30%. Bertitik tolah dari data tersebut di atas, dosen UNP yang belum disertifikasi sebagai pendidik profesional semakin berkurang sampai tahun 2017. Namun tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi 389 orang (33,42%) dan 450 orang (36,70%). Kondisi ini disebabkan karena belum terpenuhinya persyaratan sesuai peraturan yang berlaku (diantaranya: dosen tersebut yang sedang melanjutkan studi dan baru diangkat menjadi dosen tetap Non PNS).

2) Tenaga Kependidikan

Terdapat peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kependidikan yang berkualfikasi Magister (S2), S1/DIV dan DIII cendrung meningkat, sedangkan tenaga kependidikan yang berkualifikasi SLTA, SLTP dan SD terus menurun. Kondisi ini disebabkan karena Tenaga Kependidikan yang ada telah mengikuti pendidikan Sarjana (S1), di samping UNP tidak menerima formasi tenaga kependidikan yang berlatar belakang pendidikan SLTA, SLTP, dan SD. Sejak tahun 2015 sampai tahun 2019, persentase terbesar tenaga kependidikan berkualifikasi SLTA dan S1/DIV.

6. Keuangan, Sarana dan Prasarana

a. Keuangan

Sumber anggaran di UNP terdiri dari rupiah murni dan PNBP. Penggunaan anggaran ini dibagi ke dalam tiga kelompok sebagai berikut : (1) Anggaran penyelenggaraan kegiatan dan usaha pendidikan tinggi (PKUPT); (2) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum (Rutin), dan (3) Penyelenggaraan kegiatan sumber anggaran yang dibiayai PNBP. Ketiga kelompok mata anggaran ini tergabung dalam satu dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah dikelola dengan prinsip terpadu, efisiensi, efektif, one door one policy, terkendali, transparan, dan selektif menurut prioritas yang telah ditentukan.

1) PNBP

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh UNP berasal dari SPP, fee kerjasama, sewa aset dan lain-lain.

Berdasarkan data pada Gambar 1.23, terlihat ada kecenderungan peningkatan secara signifikan target penerimaan dana PNBP dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan realisasi penerimaan yang selalu meningkat dalam lima tahun terakhir. Hal

ini terutama disebabkan oleh bertambahnya jumlah mahasiswa dan besaran SPP, serta jumlah kerjasama dan jumlah sewa aset yang meningkat setiap tahun.

Dari Gambar 1.24, terlihat kemampuan UNP untuk melakukan penyerapan anggaran PNBP secara rata-rata adalah 76.89% yang dapat dimaknai cukup bagus. Untuk PNBP yang masih bersisa dari tahun sebelumnya dihitung sebagai dana luncuran pada tahun berikutnya. PNBP UNP selama ini banyak berasal dari dana sumbangan pendidikan (SPP) mahasiswa. Karena itu sangat dipengaruhi oleh jumlah penerimaan mahasiswa baru dan kebijakan penetapan SPP. Salah satu penyebab sisa penyerapan anggaran adalah perbedaan tahun anggaran yang berakhir tanggal 31 Desember setiap tahun dan tahun akademik berakhir pada bulan Februari setiap tahunnya.

2) Rupiah Murni

Rupiah murni merupakan anggaran yang diperoleh dari Pemerintah Pusat. Besarnya realisasi dan daya serap dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Gambar 1.25 menunjukkan perkembangan data tersebut. Setiap tahun realisasi belanja UNP yang berasal dari rupiah murni selalu mengalami kenaikan, dengan rata-rata sebesar 92,16, walaupun besaran penerimaan berfluktuasi setiap tahunnya. Sumber dana yang berasal dari rupiah murni atau APBN-RM digunakan untuk Program Penyediaan Dana Bantuan Operasional untuk Perguruan Tinggi Negeri dan Bantuan Pendanaan PTN-BH (BOPTN), Program Dukungan Manajemen PTN/Kopertis (RUTIN), Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti (PDD-AK) dan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti (Sarpras). Kinerja keuangan dengan sumber dana rupiah murni ini juga dianalisis dengan mengukur tingkat capaian target APBN-RM dengan membandingkan realisasi APBN-RM dengan pagu APBN-RM yang ada di DIPA. Adapun capaian kinerja anggaran APBN-RM tahun 2019 dapat dilihat pada Gambar 15

Ini memberikan gambaran bahwa realisasi anggaran APBN-RM sampai dengan akhir September 2019 atau triwulan III yaitu sebesar Rp. 151.434.576.752,- atau sekitar 71,38% dari total pagi DIPA yaitu sebesar Rp. 212.139.905.000,-. Realisasi anggaran sampai akhir tahun diprediksi akan mencapai 98,07% atau sekitar RP. 208.038.112.414,-.

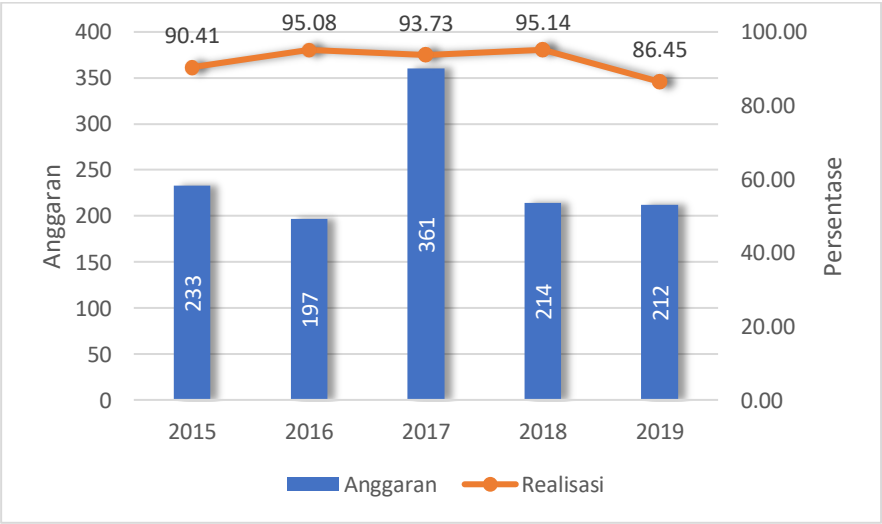

Keadaan s.d. 11 November 2019

Gambar 15. Realisasi Belanja Anggaran Rupiah Murni Tahun Anggaran 2015 – 2019

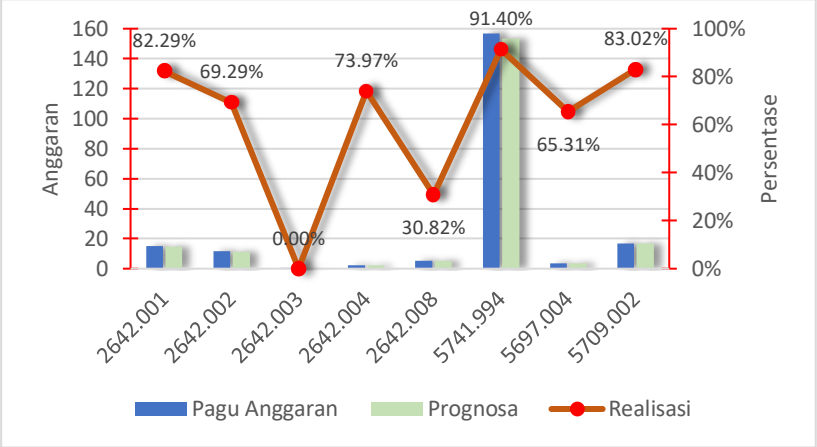

Gambar 16. Capaian Kinerja Anggaran Rupiah Murni APBN Unversitas Negeri Padang Tahun 2019

3) *Cost Recovery*

Cost recovery dihitung berdasarkan hasil prosentase PNBP dengan biaya operasional; sedangkan biaya operasional dihitung dari biaya operasional secara keseluruhan PNBP dan APBN-RM. *Cost recovery* merupakan gambaran kemampuan UNP dalam membiayai biaya operasional (keseluruhan belanja di luar belanja modal dan bantuan sosial) dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Jika dilihat realisasi dari tahun 2015 sampai dengan 2019, ternyata kemampuan *cost recovery* PNBP UNP cukup baik yang ditandai dengan pencapaian persentase selalu di atas 70%.

b. Sarana Prasarana

1) Perpustakaan

Perpustakaan merupakan jantung dari perguruan tinggi. Oleh karena itu, denyut nadi UNP ditentukan oleh kelengkapan koleksi dan layanan perpustakaannya. Itulah sebabnya, UNP secara terus menerus membangun dan mengembangkan perpustakaan. Di UNP, perpustakaan terdapat di tingkat program studi, fakultas, dan universitas. Dengan demikian, UNP memiliki satu perpustakaan di tingkat universitas, sementara di tingkat FIS, setiap jurusan memiliki ruang baca dan satu perpusatakaan di gedung dekanat.

Perpustakaan UNP dilengkapi dengan *Saudi Center for Culture and Arabic Language* (lantai 1), Bank Indonesia Corner, KPK Corner, dan BKKBN Corner (lantai 2). Sivitas akademika juga dapat memanfaatkan layanan koleksi digital di lantai 5 perpustakaan. Koleksi digital menyediakan layanan pengaksesan tugas akhir (makalah, skripsi, tesis, dan disertasi) secara full-text yang hanya bisa dilakukan secara luring (offline). Sementara, karya ilmiah (dosen dan tenaga kependidikan) disediakan secara daring (online) melalui alamat http://repository.unp.ac.id/.

Layanan perpustakaan dibuka mulai pukul 07.30 s.d. 16.00 (Senin s.d. Jumat), ditambah dengan hari Sabtu dari pukul 07.30 s.d. 13.00. Untuk peningkatan

pelayanan, telah dikembangkan sistem automasi yang terangkai dalam jaringan internet. Dengan adanya jaringan tersebut, koleksi Perpustakaan UNP dapat diakses oleh sivitas akademika tanpa dibatasi ruang dan waktu.

Sivitas akademika UNP dapat memanfaatkan Situs Web Perpustakaan UNP melalui alamat http://pustaka.unp.ac.id/ yang memiliki fasilitas akses ke karya ilmiah digital, buku elektronik (e-book), artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional (e-journal). Dapat ditambahkan, melalui situs web itu, para pengguna perpustakaan (pemustaka) dapat mengakses jurnal berbayar dalam database yang dilanggan oleh UNP, seperti ProQuest dan EBSCO, serta jurnal tak berbayar, seperti IET Digital Library, e-Resources Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jurnal Elektronik (e-Journal) Universitas Negeri Padang, dan Garda Rujukan Digital (Garuda) Dirjendikti Kemristekdikti. Melalui situs ini pula, pemustaka dapat menelusuri koleksi Perpustakaan UNP dengan alamat http://opac.unp.ac.id/. Perkembangan koleksi Perpustakaan UNP lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 1.28.

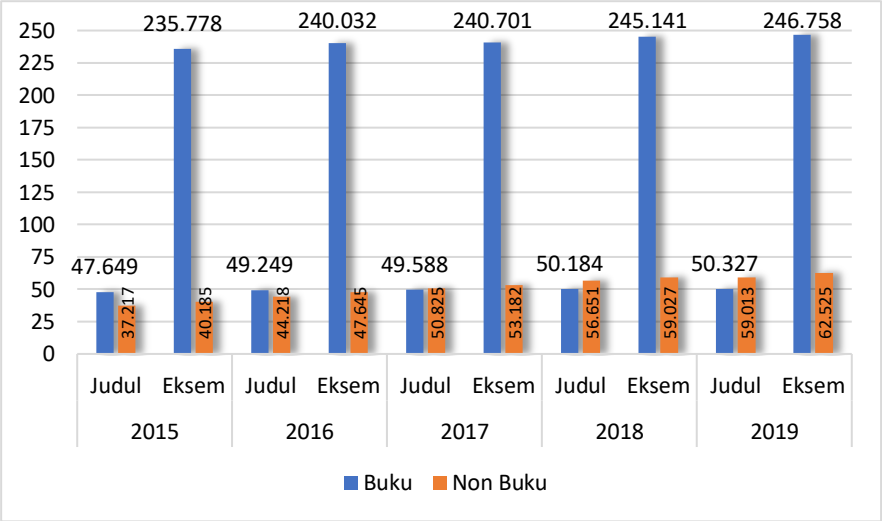

Gambar 17. Bahan Bacaan yang terdapat di perpustakaan UNP Periode Tahun 2015 – 2019

2) Sarana

Menyadari bahwa kemandirian organisasi merupakan satu-satunya alternatif yang harus dipilih UNP untuk tetap berperan di masa depan, maka upaya mempersiapkan pengelolaan kelembagaan yang kokoh, dinamis dan adaptif terus dilakukan. Saat ini, kampus UNP beserta filial-nya dikelola oleh satu sistem pengelolaan memanfaatkan teknologi informasi sebagai *mediator system* manajemen yang ada. Adanya tiga biro yang mewadahi pelaksanaan tugas teknis, yaitu Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Biro Umum dan Keuangan (BUK), serta Biro Perencanaan, Administrasi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BPAKHM) dengan tenaga administrasi yang cukup handal dan memadai, dapat menunjukkan bahwa secara umum tatakelola dan organisasi di lingkungan UNP telah berjalan cukup baik. Komputerisasi administrasi akademik juga telah memanfaatkan *information technology* (IT) sebagai basis pengembangan data akademik mahasiswa. Di samping itu dalam bidang keuangan dan inventarisasi aset telah dikembangkan pula SAI (Sistem Akutansi Instansi) dan SABMN (Sistem Akutansi Barang Milik Negara).

Kebijakan penggunaan ruang kuliah di UNP tidak dibatasi oleh fakultas. Dengan demikian FIS UNP dapat menggunakan semua ruang kuliah yang dibutuhkan dan relevan dengan tujuan pembelajaran. Saat ini, UNP memiliki ruang kuliah seluas 17.203,56 m^2, ruang workshop/labor 20.723,78 $m^{2,}$ perpustakaan seluas 5.039,15 $m^{2,}$ ruang administrasi 7,691,85 m^2, dan ruang dosen 2.700,35 m^2. Pengelolaan ruangan ini dilakukan secara bersama maupun diserahkan pada fakultas. Kapasitas kelas berkisar 40-60 orang mahasiswa. Selain itu, UNP juga memiliki ruang dosen yang sekaligus dapat menjadi ruang sidang jurusan. Pada setiap jurusan, dilengkapi dengan ruang pimpinan jurusan, ruang staf administratif, ruang laboratorium yang sekaligus berfungsi sebagai ruang baca, dan ruang tamu.

Untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran semua jurusan yang ada memiliki laboratorium. Laboratorium yang ada dimanfaatkan di samping sebagai kegiatan perkuliahan, juga dimanfaatkan sebagai media melayani guru-guru dan masyarakat yang membutuhkan berbagai konsultasi, penyuluhan, pelatihan, dan workshop sebagai upaya peningkatan kualitas mereka serta pelayanan lain, seperti uji material bidang keteknikan. Laboratorium juga telah melakukan pertemuan-pertemuan ilmiah, baik berupa seminar berskala lokal maupun nasional dan internasional. Begitu juga, laboratorium telah menginisiasi berbagai dialog dengan pakar, meskipun masih bersifat insidentil.

Dilihat dari segi fasilitas, ruang laboratorium memiliki fasilitas yang relatif mencukupi walaupun dibeberapa program studi, masih perlu memenuhi standar minimal laboratorium untuk LPTK. Secara umum laboratorium telah dilengkapi dengan komputer yang sangat dibutuhkan dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan program laboratorium dan berbagai peralatan praktikum sesuai dengan bidang keilmuannya. Selain itu laboratorium juga dilengkapi dengan peralatan penunjang kegiatan perkuliahan seperti LCD/in focus.

Selain sarana perkuliahan dan fasilitas penunjangnya, UNP juga memiliki sarana prasarana lain guna menunjang dan menjamin kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan pendidikan dan administrasi. Perkembangan sarana prasarana ini dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada sistem manajemen data dan informasi (penjaringan, pengolahan, dan penyajian) yang berlaku di UNP saat ini, telah memanfaatkan jasa teknologi manajemen dan informasi yang mutakhir, seperti melalui telepon, internet/website, dan faksimili. Selain itu saat ini juga dilakukan pengembangan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Tingkat capaian sasaran pengembangan saat ini 80%. Pengembangan yang dilakukan melibatkan/bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti PT. Telkom dan Gama Tekno. Walau masih disadari bahwa kelemahan-kelemahan awal belum diatasi secara maksimal (performan jaringan karena banyaknya pemakai), namun saat ini sistem layanan informasi akademik sudah tersedia secara on-line dengan dilengkapi banyak aplikasi, seperti registrasi, penelitian, digital library, hingga *e-Learning system.*

Berdasarkan renstra dan renop yang telah dirumuskan maka pengembangan aset dilakukan secara bertahap sesuai dengan sasaran dan kemampuan anggaran institusi setiap tahunan. Alokasi anggaran dalam pengembangan sarana dan prasana mengalami peningkatan setiap tahun. Hal itu disebabkan oleh adanya dana hibah Luar Negeri dari *Islamic Development Bank* (IDB) untuk rekonstruksi sarana dan prasana di UNP yang selesai pada tahun 2016.

Komponen terbesar dari proyek ini memang terdiri dari pembangunan 8 buah gedung awal yang akhirnya ditambah lagi dengan 3 buah gedung tambahan sebagai hasil dari penghematan dan pengajuan amandemen kontrak ke IDB pada 14 Januari 2015. Dengan demikian, Bangunan yang berhasil dibangun dan dimanfaatkan secara eksklusif oleh Fakultas Ilmu Sosial terdiri dari:

1. **Infrastruktur**, berupa jalan, instalasi listrik, selokan, pompa dan genset Nilai Rp. 22.959.857.764
2. **Integrated Classroom A** Luas Bangunan 4000 m2, Nilai Rp. 21.999.508.222
3. **Integrated Classroom B** Luas Bangunan 4000 m2, Nilai Rp. 21.780.121.799,99

Dengan telah selesainya pembangunan ini, diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh UNP kepada publik di masa-masa yang akan datang. UNP selayakanya berkontribusi kepada antisipasi kita pada fenomena bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada dekade ke depan.

Proyek ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan kepada peningkatan UNP dalam 2 tahun terakhir. Untuk pertama kalinya UNP mendapatkan akreditasi unggul yaitu A, peningkatan status menjadi Badan Layanan Umum, untuk pertama kalinya pula UNP mencapai peringkat 77 nasional (berada pada cluster 2), peringkat 105 menurut *Webomatrics* dan peringkat 46 menurut *UniRank*. Pembangunan fisik untuk penyelenggaraan pendidikan yang sedang dilaksanakan adalah seperti terlihat dalam Tabel 8.

Tabel 8. Bangunan sedang Dikerjakan Periode 2014 – 2019

No	Nama Bangunan	Perkiraan Biaya (Rp)	Penggunaan Biaya (Rp) s/d 2019	Tahun Mulai	Tahun Perkiraan Selesai	Sumber Dana
1	Pemb. Sport Center	60.611.196.000	43.456.305.000	2014	~	PNBP/BLU/RM
2	Pemb. Laboratorium FBS	30.015.479.906	26.619.806.906	2014	2020	PNBP/BLU/RM
3	Pemb. Dekanat FIP	22.288.812.000	17.957.788.400	2014	2020	PNBP/BLU/RM
4	Pemb. Labor Micro Teaching (Gedung C)	25.417.138.000	22.540.289.000	2012	2019	PNBP/BLU/ RM (Sarpras)
5	Pemb. Laboratorium Pariwisata & Perhotelan	51.468.594.617	3.629.875.640	2012	~	PNBP/BLU
6	Pemb Labor Olahraga	18.250.669.600	11.263.782.250	2018	~	PNBP/BLU
7	Pusat Informasi dan Perpustakaan	101.093.526.000	634.760.000	2018	2021	PNBP/BLU

Penguatan tata kelola dan organisasi secara terus menerus diupayakan dan ditingkatkan untuk menghasilkan mutu kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien, dengan secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip partisipatif-demokratis, transparan dan akuntabel. Kerjasama serta organisasi yang dinamis dan saling menguntungkan dengan pihak-pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik internal maupun eksternal, juga terus dibudayakan secara luas. Badan normatif (Senat Universitas dan Senat Fakultas) berperan sangat signifikan dalam mengarahkan dan menetapkan peraturan-peraturan internal kelembagaan secara umum, dan memproyeksikan UNP menuju perguruan tinggi berbadan hukum secara khusus, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Infrastruktur jaringan

ICT yang memadai merupakan faktor pendukung yang kuat dan utama dalam implementasi rencana dan pengembangan institusi.

3) Laboratorium

Saat ini, UNP memiliki 24 unit laboratorium yang terdapat dari berbagai fakultas, dengan luas total lebih kurang 33,34 M^2. Laboratorium-laboratorium ini melayani proses pembelajaran, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pengelolaan laboratorium-laboratorium ini dilakukan oleh universitas, fakultas, dan program studi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Penyebaran laboratorium tidak sama antar fakultas, hal itu tergantung kebutuhan dan aktivitas laboratorium.

Prasarana laboratorium di lingkungan UNP saat ini telah memiliki kemampuan untuk melayani praktikum dari masing-masing mata kuliah sesuai dengan tujuan mata kuliah tersebut. Namun demikian, beberapa peralatan yang tersedia sudah mulai usang ditinjau dari sisi kecanggihan dan sebagian berada dalam kodisi rusak sehingga tidak dapat dipakai lagi, baik untuk praktikum mahasiswa maupun untuk mendukung penelitian tugas akhir mahasiswa serta penelitian dosen. UNP berupaya secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasaran laboratorium guna peningkatan efisiensi dan produktivitas dalam pembelajaran dan penelitian. Berikut daftar laboratorium yang ada di UNP.

Setiap jurusan di FIS UNP memiliki laboratorium pembelajaran. Jurusan Geografi bahkan memiliki beberapa laboratorium yang cukup aktif digunakan baik untuk kegiatan pembelajaran, penelitian maupun kerjasama. Karena jurusan Geografi memiliki program D3 Teknologi Penginderaan Jauh, maka laboratorium itu merupakan kebutuhan penting dari penyelenggaraan pendidikan vokasi juga telah dilengkapi dengan sejumlah peralatan interpretasi penginderaan jauh, sistem informasi geografi, dan survei pemetaan, drone, ploter, dan masih banyak peralatan lainnya yang dapat mendukung keberlangsungan praktikum yang dilakukan para mahasiswa. Untuk tahun 2020, FIS akan membangun sebuah gedung baru berlantai 4 yang akan dinamakan Gedung Labor Ilmu Sosial yang akan menjadi homebase bagi para dosen berdasarkan kelompok keahlian yang dimiliki.

4) Kinerja Sarana dan Prasarana

Kampus UNP terdiri dari enam lokasi yaitu: (1) Kampus Utama di Air Tawar Padang, (2) Kampus Lubuk Buaya Padang, (3) Kampus Ulu Gadut, (4) Kampus Limau Manis, (5) Kampus Bukittinggi, (6) Kampus Pariaman (Prodi Keperawatan). Pemanfaatan dan perlengkapan sarana penunjang pendidikan atau perbaikan-perbaikan pada sarana gedung dikelola oleh UNP. Semua bangunan yang ada di lingkungan UNP dapat dimanfaatkan secara bersama oleh semua fakultas, kecuali bangunan khusus yang spesifik untuk unit-unit tertentu.

1) Ruangan Administrasi, Kuliah, dan Praktikum

Penggunaan ruang kuliah dan laboratorium untuk kegiatan akademik program studi dilakukan di bawah pengendalian langsung oleh fakultas. Luas ruang yang tersedia bila dibanding dengan jumlah mahasiswa belum mencukupi untuk pelaksanaan proses pembelajaran, sehingga efisiensi pemanfaatan ruang perlu diatur dengan sistem monitoring efisiensi pemanfatan ruang, namun *Monitoring resource sharing* belum sepenuhnya dilakukan. Seluruh ruang perkuliahan dimanfaatkan secara optimal dalam 5 hari kerja secara bergantian mulai 7.00 s.d 18.00 WIB,

walaupun ada juga yang memanfaatkannya pada hari Sabtu untuk hal-hal khusus, seperti kuliah tambahan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap efisiensi pemanfaatan seluruh ruang masih perlu dilakukan. Berikut daftar gedung yang ada di Universitas Negeri Padang. Kampus FIS UNP terdiri dari 7 unit bangunan dengan luas 7.124 m2.

7. Pendidikan/Pembelajaran

a. Layanan Akademik dan Kemahasiswaan

Layanan akademik dan kemahasiswaan Universitas Negeri Padang secara kontiniu selalu ditingkatkan. Layanan dilakukan dengan meningkatkan seluruh aspek baik inernal maupun internal. Secara internal UNP berupaya melengkapi kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana serta penggunaannya secara optimal. Selain itu, untuk mengikuti perkembangan dunia kerja dan menjawab tantangan di era revolusi 4.0 UNP juga berupaya mengembangkan diri dengan membuka fakultas dan program studi baru. Secara eksteral UNP membuka akses pendidikan kepada masyarakat, dengan meningkatkan jumlah penerimaan mahasiswa, melakukan kerjasama baik luar maupun dalam negeri. Untuk melihat kepuasan layanan akademik dan kemahasiswaan dilakukan survey kepuasan kepada masyarakat dengan 10 butir indikator. Bedasarkan hasil servey kepuasan diperoleh nilai kepuasan 90.46 (A) dengan kategori Sangat Baik, seperti terlihat pada Gambar 18.

Jumlah Nilai Per Unsur	746	758	756	760	758	753	751	753	788.5	775	
NRR per Unsur = Jmh Nilai per Unsur : Jmh Kuisioner Terisi	3.552	3.610	3.600	3.619	3.610	3.586	3.576	3.586	3.755	3.690	
NRR Tertimbang per Unsur = NRR per Unsur x 0,1	0.355	0.361	0.360	0.362	0.361	0.359	0.358	0.359	0.375	0.369	3.618
Indeks per Unsur	88.810	90.238	90.000	90.476	90.238	89.643	89.405	89.643	93.869	92.262	
Mutu per Unsur	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	

NRR = Nilai Rata-rata

IKM = Jmh NRR IKM tertimbang x 25

IKM UNP = 90.458

Mutu Pelayanan = A

Kinerja Unit Pelayanan SKPD = Sangat Baik

Gambar 18. Hasil Servey Kepuasan Layanan Akademik dan Kemahasiswan

kepada Sivitas Akademika

Sejak dilaksanakan kebijakan perluasan mandat dari Institut Keguruan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas Negeri Padang, dimulai dari tahun 1999 jumlah jurusan/program studi di Universitas Negeri Padang terus bertambah dari yang semula 27 jurusan/program studi menjadi 103 program studi dan 8 fakultas pada tahun 2018. Penyelenggaraan program-program pendidikan akademik di UNP, dimulai dari Diploma III (DIII), Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1), Strata 2 (S2), dan Strata 3 (S3), pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi. Dengan didirikannya Lembaga Pengembangan Tenaga Profesional (LPTP) pada tahun 2007, Universitas Negeri Padang membuka diri secara lebih luas untuk melayani kegiatan pengembangan profesi tenaga kependidikan dan non kependidikan dalam berbagai bidang yang dibutuhkan masyarakat, termasuk penyelenggaraan program sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan.

Sejak 2013 UNP dipercaya menyelenggarakan Program Profesi Guru (PPG) dengan jumlah prodi penyelenggara hanya 4 prodi. Tahun 2018 UNP dipercaya menyelenggaraan PPG sebanyak 13 prodi, tahun 2019 meningkat menjadi 19 prodi. Peningkatan prodi pelaksana PPG tiap tahun merupakan prestasi buat UNP. Untuk menyiapkan tenaga guru di kawasan asia tenggara semenjak tahun 2017 UNP membuat kelas inernasional untuk 15 prodi kependidikan yang tersebar di delapan fakultas dengan prodi kelas internasional terbanyak berada di FMIPA. Secara rinciannya, UNP memiliki 53 prodi S1, 22 prodi S2, dan 7 prodi S3. Di samping itu, UNP memiliki prodi vokasi sebanyak 15 prodi D3 dan 3 prodi D4. UNP memiliki satu prodi profesi konselor. Penambahan jumlah prodi sebanding dengan peningkatan jumlah mahasiswa. Tabel 9 di bawah ini menampilkan jumlah mahasiswa UNP menurut jenjang program studi pada tahun terakhir.

Tabel 9. Jumlah Mahasiswa FIS UNP Menurut Jenjang Program Studi Tahun 2019

No	Program Studi	Jumlah
1	Ilmu Administrasi Negara (S1)	868
2	Pendidikan Geografi (S1)	580
3	Pendidikan Sejarah (S1)	651
4	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	527
5	Pendidikan Sosiologi- Antropologi (S1)	687
6	Geografi (S1)	596
7	Pendidikan Geografi (S2)	31
8	Ilmu Administrasi Negara (S2)	53
9	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S2)	46
10	Pendidikan Keagamaan Islam (S1)	469
11	Teknologi Penginderaan Jauh (D III)	311
	Total	**4.819**

Dilihat dari perkembangan jumlah mahasiswa FIS dan UNP pada umumnya lima tahun terakhir memperlihatkan terjadi peningkatan jumlah mahasiswa. Peningkatan yang paling tajam terjadi pada tahun 2018 meningkat dari tahun sebelumnya, ini dikarenakan telah selesainya pembangunan 11 gedung baru UNP bantuan IDB, semakin lengkapnya sarana dan prasarana dan juga sumber daya manusia serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan pendidikan dan pengajaran juga pelayanan administrasi. Besarnya peningkatan jumlah mahasiswa dari tahun ke tahun menunjukkan UNP membuka akses yang semakin luas untuk melayani keinginan masyarakat melanjutkan pendidikan.

b. Mutu dan Relevansi Layanan Akademik

Universitas Negeri Padang telah melakukan berbagai upaya untuk peningkatan mutu dan relevansi layanan akademik, seperti melaksanakan evaluasi dan revisi kurikulum, meningkatkan akreditasi program studi, memperbaiki sistem penerimaan mahasiswa baru, membentuk Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), meningkatkan mutu pembelajaran yang bermuara kepada peningkatan indeks prestasi akademik dan mempercepat masa studi mahasiswa, dan meningkatkan mutu layanan administrasi akademik. Perbaikan layanan akademik mempunyai relevansi yang kuat dengan mutu akademik, hal ini terlihat dengan makin meningkatnya IPK mahasiswa dan mempercepat masa studi mahasiswa.

c. Evaluasi dan Revisi Kurikulum

Program studi di Universitas Negeri Padang secara periodik melakukan evaluasi dan revisi kurikulum. Perubahan kurikulum pada tingkat program studi didasari atas kajian komprehensif dari berbagai pihak pemangku kepentingan baik dari luar institusi Universitas Negeri Padang (external stakeholders) maupun pihak terkait dalam lingkungan Universitas Negeri Padang (*internal stakeholders*). Masukan dari pemangku kepentingan yang berasal dari luar institusi, misalnya kebijakan pemerintah terkait pendidikan tinggi, tuntutan dan dinamika yang terjadi pada dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan masukan dari alumni. Masukan dari pemangku kepentingan yang berskala internal institusi, misalnya saran dari dosen dan mahasiswa. Gagasan fikiran, pendapat, dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut dihimpun melalui *tracer study*, penyelenggaraan seminar, dan rapat kerja yang dilakukan oleh program studi. Kearifan lokal yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Minangkabau juga menjadi acuan pengembangan kurikulum. Moto UNP, Alam Takambang Jadi Guru, diambil dari falsafah hidup masyarakat Minangkabau. Revisi tidak saja dilakukan pada mata kuliah yang ditawarkan dalam kurikulum, perangkat perkuliahan juga dikembangkan dan direvisi secara berkala seperti Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan bahan ajar untuk setiap mata kuliah.

Pengembangan kurikulum yang dilakukan UNP berpedoman kepada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah (Kemendiknas, Kemendikbud, dan Kemenristekdikti), visi, misi, dan tujuan UNP, serta visi dan misi program studi. Sebelum terbentuknya Kemenristekdikti, penyusunan kurikulum pada UNP berpedoman kepada Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/47/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, dan SK Mendiknas Nomor 045/4/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.

Sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan diterbitkannya Permendikbud Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi serta berpedoman kepada Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka UNP telah melakukan evaluasi dan revisi terhadap kurikulum program studi dengan mengacu kepada ketiga peraturan pemerintah tersebut. Pada tahun akademik 2016/2017 semua program studi yang ada di UNP menerapkan kurikulum yang mengacu kepada KKNI.

Semenjak tahun 2017 pembelajaran di UNP menggunakan peerkuliahan dengan sistem daring (*Blended Learning*). Penerapan pembelajaran dengan sistem daring dapat mengatasi kekurangan ruang kelas dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar lebih optimal dalam menggunakan teknologi informasi dalam mencari sumber belajar. Semester Januari-Juni 2019 fakultas terbanyak menggunakan pembelajaran sistem daring adalah Fakultas Ekonomi (62,98%) diikuti oleh FBS (38,25%) dengan peresentase terendah berada pada PPs. Persentase penggunaan sistem daring dalam perkuliahan semester Juli-Desember 2019 setiap fakultas terlihat pada Gambar 19.

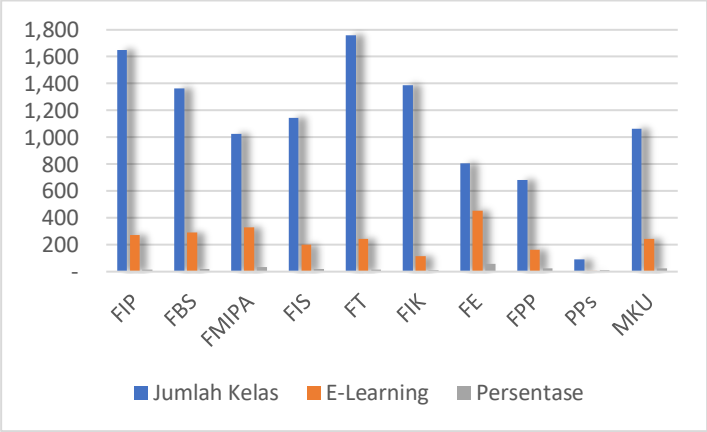

Gambar 19. Persentase penggunaan sistem daring dalam perkuliahan semester Juli-Desember 2019

d. Akreditasi Program Studi

Komitmen UNP untuk menjamin mutu layanan akademik tercermin dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai akreditasi institusi dan program studi. Nilai program studi mencerminkan mutu layanan akademik pada sebuah program tersebut. Menyadari pentingnya akreditasi program studi, UNP menjadikan kegiatan tersebut sebagai program prioritas baik pada tingkat rektorat, fakultas, maupun program studi. Keseriusan UNP terhadap akreditasi program studi diwujudkan dengan pembentukan Lembaga Penjaminan Mutu, yang salah satu program prioritasnya adalah mempersiapkan program studi terakreditasi dengan nilai terbaik. Jumlah akreditasi program studi yang menperoleh akreditasi unggul mengalami peningkatan yang luar biasa, Tahun 2015 jumlah terakreditasi A hanya 14 meningkat tajam menjadi 34 pada tahun 2018. Tahun 2019 prodi yang telah terakreditasi A meningkat menjadi 41 prodi.

Keadaan tahun 2019 menunjukkan dari 103 program studi, 43 (40,59%)

program studi terakreditasi A, 45 (44,55%) program studi terakreditasi B, dan 15 (14,85%) program studi terakreditasi C, terutama bagi program studi yang baru dibuka.. Sebagaimana tabel yang sudah dicantumkan sebelumnya dari 11 prodi di bawah naungan FIS, hanya 1 buah yang masih terakreditasi C, karena menunggu proses visitasi asesor BAN PT, 6 program studi terakreditasi B (Baik) dan 4 program studi terakreditasi A (Unggul). Tahun ini beberapa program studi diusulkan untuk mendapatkan akreditasi internasional yaitu:

Tabel 10: Usulan Akreditasi Internasional Program Studi di Lingkungan FIS UNP

No	Nama Program studi	usulan akreditasi internasional	tahun
1	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	AUN-QA	2020
2	Pendidikan Sosiologi	AUN-QA	2021
3	Pendidikan Sejarah	AUN-QA	2021
4	Geografi	ASIIN	2021
5	Pendidikan Geografi	ASIIN	2021
6	Ilmu Administrasi Negara	AQAS	2022
7	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (S1)	AQAS	2022

e. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

Mutu layanan akademik yang dilakukan oleh UNP tercermin dari sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara ketat, terbuka, dan mudah diikuti. Seleksi penerimaan mahasiswa baru UNP dilakukan melalui tiga jalur, yaitu: (1) Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN); (2) Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN); dan (3) Seleksi Masuk Mandiri (SMM) yang dilaksanakan secara online. Alokasi penerimaan dari masing-masing jalur sesuai dengan Permendikbud Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru jenjang program sarjana (S1) dengan rincian: SNMPTN 50%, SBMPTN 30%, dan mandiri 20%. Tahun 2017 Kemenristek mengambil kebijakkan baru dengan megeluarkan Permenristek Nomor 90 tahun 2017 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru jenjang program sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dengan rincian: SNMPTN 30%, SBMPTN 40%, dan mandiri 30%.

Tingkat keketatan penerimaan mahasiswa baru di UNP sangat baik. Peminat Program studi bidang Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) lebih ketat dari pada program studi bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)/Sainstek. Hal ini sangat membanggakan karena minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tinggi pada Universitas Negeri Padang sangat tinggi. Program Studi IAN merupakan prodi yang memiliki peminat paling tinggi di FIS. Pada tingkat UNP, prodi ini selalu merupakan 5 besar dengan keketatan tertinggi di UNP

f. Peningkatan Mutu Pembelajaran

Mutu layanan akademik juga dilakukan dengan meningkatkan mutu pembelajaran melalui penerapan metode dan teknik pembelajaran yang aktif

interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAIKEM) yang bermuara kepada peningkatan kreativitas mahasiswa, dan kemandirian mahasiswa untuk mengembangkan diri. Upaya peningkatan mutu pembelajaran dilakukan melalui berbagai kegiatan akademik seperti diskusi berkala dosen, pengampu mata kuliah, seminar pada tingkat program studi dan pelatihan dosen. Peningkatan mutu pembelajaran berdampak kepada indeks prestasi mahasiswa dan lama masa studi. Tabel 11 menampilkan indeks prestasi mahasiswa FIS lima tahun terakhir. Tabel 12 menampilakn rata-rata penyelesaian studi mahasiswa UNP.

Tabel 11. Rata-rata IPK Lulusan FIS UNP Tahun 2015 - 2019

Fakultas	Tahun Lulus				
	2015	2016	2017	2018	2019
Fakultas Ilmu Sosial	3,28	3.28	3.24	3.33	3,28
Rata-rata UNP	**3,33**	**3.34**	**3.33**	**3.37**	**3,34**

Tabel 12. Rata-rata Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Tahun 2015-2019

Jenjang Program Studi	Rata-rata Lama Masa Penyelesaian Studi Mahasiswa Dalam Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Strata tiga (S3)	4,78	5.56	4,46	6.6	6,2
Strata dua (S2)	2,87	2.98	2,83	2.9	3,6
Starata satu (S1)	4,49	4.57	4,40	4.8	4,64
Diploma tiga (D3)	3,45	3.74	4,01	4	3,8

Rata-rata lama masa studi mahasiswa terutama jenjang program Strata satu (S1), tahun 2015- 2018 cukup baik dengan rata-rata lama masa studi 4,40 Hal ini mengambarkan percepatan rata-rata lama masa studi mahasiswa jenjang program S1. Disamping itu rata-rata lama masa studi mahasiswa jenjang Diploma tiga (D3), Strata dua (S2) dan Strata tiga (S3) masih melebihi lama masa studi yang ditetapkan dalam kurikulum masing-masing jenjang program studi. Tahun 2018 terjadi perlambatan penyelesaian studi dikarenakan tidak berimbangnya jumlah mahasiswa yang dibimbing dengan jumlah pembimbing. Tahun 2018 Rektor membuat kebijakkan dengan peraturan rektor nomor 11 tahun 2018 tentang penyelesaian tugas akhir. Efek dari peraturan ini mengakibatkan tahun 2019 kembali terjadi percepatan penyelesaian studi mahasiswa pada jenjang strata S3 , S1 dan D3, kecuali Strata S2. Perlambatan pada S2 terjadi karena adanya mahasiswa yang menunda karena habisnya masa akreditasi.

g. Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Akademik

Peningkatan mutu akademik juga dilakukan melalui peningkatan layanan administrasi akademik kepada mahasiswa dan dosen. Mutu layanan administrasi akademik bermuara kepada peningkatan mutu akademik secara kesuluruhan. Layanan administrasi akademik yang dilakukan oleh UNP baik untuk mahasiswa maupun dosen dipermudah melalui pemanfaatan media teknologi informasi yang dilaksanakan secara online. Bentuk layanan administrasi akademik tersebut adalah:

a) Melaksanakan proses seleksi mahasiswa baru mulai dari proses pendaftaran sampai pemberitahuan hasil seleksi;
b) Pengisian lembar rencana studi dan pemberitahuan hasil studi mahasiswa;
c) Pengisian hasil belajar mahasiswa oleh dosen;
d) Pemberitahuan informasi akademik kepada mahasiswa dan dosen;
e) Bimbingan akademik oleh Penasehat akademik (PA) kepada mahasiswa dilakukan secara tatap muka dan komunikasi melalui media online;
f) Proses surat menyurat seperti undangan seminar, ujian sebagian fakultas sudah berjalan secara online
g) Beberapa progam studi sudah mulai melaksanakan perkuliahan melalui Blended Learning.
h) Seminar akademik pada setiap jurusan dengan memfasilitasi pendanaan dan nara sumber
i) Workshop menghadirkan nara sumber industry sesuai dengan bidang keahlian pada masing prodi di fakultas pariwisata dan perhotelan.

8. Penelitian

UNP sebagai salah satu Perguruan Tinggi tugas dan fungsi utamanya adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, sumber dana berasal dari dana Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan DRPM. Sebagai PT berstatus Badan Layanan Umum (SK Kemenkeu RI No:335/KMK.05/2015), UNP wajib menganggarkan dana penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebanyak 15% dari Dana PNBP. Tahun 2020 UNP meningkatkan status peneltian dari tingkat unggul ke mandiri

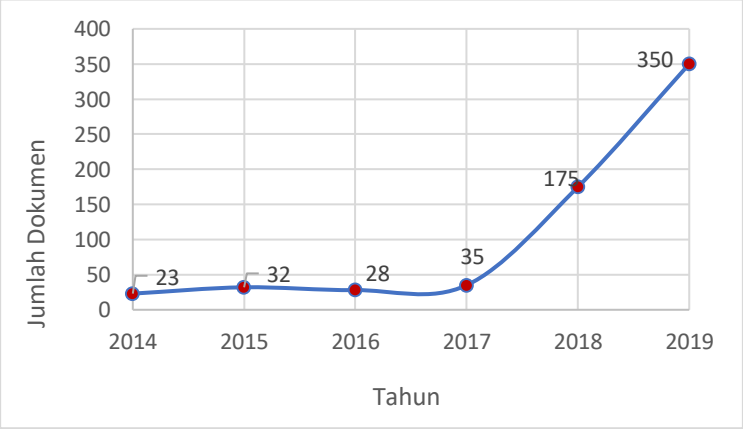

Gambar 20. Jumlah dokumen UNP terindek scopus

Ada bentuk lain yang sebenarnya memberikan identifikasi kepada hasil

penelitian dan karya inovatif seperti berbagai bentuk penghargaan. Salah satu bentuk diseminasi hasil kajian dan penelitian secara personal adalah penerbitan buku oleh dosen yang bersangkutan. Universitas mengalokasikan dana yang cukup signifikan melalui UNP Press untuk memfasilitasi penerbitan buku oleh dosen. Direktorat Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRPM) tahun 2018 memberikan dana untuk UNP sebanyak Rp. 6.044.815,- untuk 66 judul penelitian.

9. Pengabdian Kepada Masyarakat

Pusat Pengabdian kepada Masyarakat di bawah LP2M merupakan penanggung jawab yang bertugas mengkoordinasikan, memantau dan menilai semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen-dosen UNP. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh dana yang berasal dari PNBP dan DRPM.

Peralihan UNP dari Saker menjadi BLU mewajibkan UNP menganggarkan dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat cukup besar. Tahun 2014, UNP menganggarkan dana pengabdian sebesar 1,391 Miliar rupiah dan terus naik hingga mencapai 5,62 miliar rupiah pada tahun 2018. Kenaikan jumlah anggaran juga diikuti dengan naiknya jumlah judul kegiatan pengabdian pada masyarakat yaitu 133 judul pada tahun 2014 dan naik menjadi 279 pada tahun 2018. Sementara itu, dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari DRPM bervasiari tiap tahun mulai dari yang terendah 98,95 juta rupiah tahun 2017 dan tertinggi tahun 2015 yaitu 1,491 Miliah rupiah. Jumlah dana pengabdian yang diperoleh dari DRPM masih termasuk rendah, hal ini dikarenakan semakin ketatnya persyaratan dan skema pengabdian yang ditawarkan oleh DRPM. Distribusi skema pengabdian kepada masyarakat yang diperoleh UNP pada tahun 2018 ditampilkan pada Gambar 21. Dalam tahun 2018, ada 4 skema kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berhasil diraih oleh dosen UNP. Empat skema tersebut antara lain Program Kemitraan Masyarakat (PKM), Program Pengembangan Kewirausahaan (PPK), Program Pengembangan Unit Produk Intelektual Kampus (PPUPIK), dan Program Pengembangan Desa Mitra (PPDM).

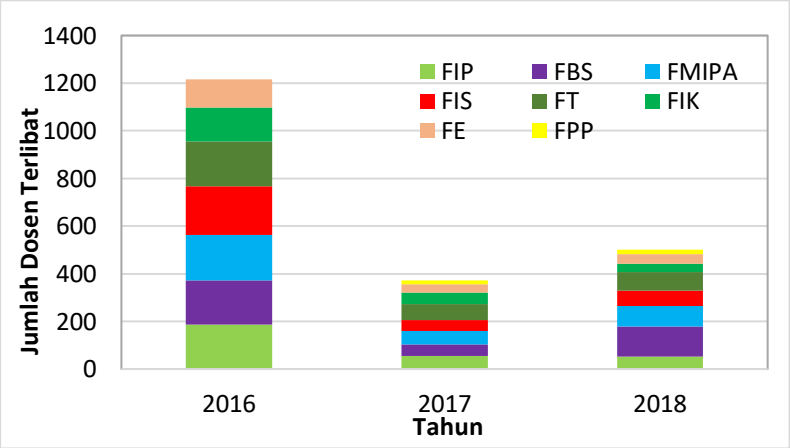

Gambar 21. Jumlah dosen terlibat kegiatan pengabdian kepada masyarakat

10. Luaran dan Capaian Tridharma

Luaran yang dimaksud di sini adalah lulusan dan salah satu komponen keberhasilan perguruan tinggi adalah kualitas lulusan. Kualitas alumni dapat dilihat dari hasil evaluasi terhadap kualitas kurikulum yang digunakan. Evaluasi tersebut

dapat dilakukan dengan studi pelacakan alumni (*Tracer study*) secara berkala.

Oleh karena itu, pemahaman tentang aspek manajemen dan riset dari *tracer study* merupakan faktor penentu *keberhasilan pelaksanaan tracer study (http://tracerstudy.dikti.go.id/). Tracer study* adalah studi mengenai lulusan lembaga penyelenggara pendidikan tinggi (Schomburg, 2003) dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk mengevaluasi hasil pendidikan dan selanjutnya digunakan untuk meningkatkan kualitas lembaga bersangkutan. *Tracer study* juga menyediakan mengenai hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja, menilai relevansi pendidikan, memberi informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), dan merupakan kelengkapan persyaratan akreditasi perguruan tinggi. Fokus *Tracer study* adalah kualitas luaran pembelajaran (learning outcome) atau kompetensi lulusan dengan mendata kepuasan *stakeholders* terhadap pekerjaan lulusan dan hubungan antara bidang ilmu yang dipelajari dan jenis pekerjaan yang diperoleh atau yang ditekuni

Untuk itulah UNP selalu melakukan *tracer study* setiap tahun untuk memenuhi tuntutan pasar, khususnya tenaga kerja, dan untuk meningkatkan daya saing lulusan di tingkat nasional dan internasional. Beberapa informasi yang digali dari *tracer study* adalah masa tunggu alumni dalam mendapatkan pekerjaan, relevansi pekerjaan dengan latar belakang pendidikan, dan daya saing alumni dalam berkompetisi dengan lulusa perguruan tinggi lain. Di samping itu, *tracer study* juga menggali informasi dari *stakeholders* tentang kinerja lulusan. Pada tahun 2017 dan 2018, UNP melakukan *tracer study* untuk mendapatkan informasi tentang lulusan dan pengguna lulusan. Informasi yang berkaitan dengan lulusan meliputi informasi akademik, aktivitas pekerjaan, riwayat pekerjaan, gaji pertama yang diterima, masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan pertama, relevansi program studi dengan pekerjaan, keterlibatan alumni dalam pengembangan *networking*, dan kepuasan alumni terhadap pelayanan lembaga.

Informasi dari pengguna lulusan adalah aspek integritas, keahlian bidang kerja (profesionalisme), kemampuan berbahasa, berkomunikasi, penggunaan teknologi informasi, kerja sama dalam tim, dan pengembangan diri. Tracer study dilakukan secara terpadu melalui daring (unp.ac.id/tracer) Tracer Studi yang Berkaitan dengan Lulusan UNP. 31,6% alumni membutuhkan waktu lebih kurang satu hingga tiga bulan untuk mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya 21.8% dalam rentang kurang dari satu bulan, 16,8% antara tiga bulan hingga enam bulan. Selanjutnya 16,8% dalam rentang enam bulan sampai dengan satu tahun. Terakhir, alumni yang membutuhkan waktu tunggu lebih dari satu tahun sebanyak 13,7%. Hasil penelusuran tersebut.

1) Masa Tunggu dalam mendapatkan pekerjaan

Dari 683 responden yang bekerja diketahui bahwa 21.8% membutuhkan waktu kurang dari satu bulan untuk mendapatkan pekerjaan, 31,6% satu hingga tiga bulan, 16,8% tiga bulan hingga enam bulan, 16,8% enam bulan sampai dengan satu tahun, dan 13,7% alumni membutuhkan lebih dari satu tahun. Hasil penelusuran tersebut memperlihatkan bahwa lulusan UNP tidak memerlukan waktu lama dalam mendapatkan pekerjaan terutama lulusan prodi kependidikan. Hal itu disebabkan banyaknya lapangan pekerjaan yang tersedia dan bagusnya kompetensi lulusan. Data tersebut terlihat pada Gambar 22.

Gambar 22. Waktu Tunggu Alumni

Dibandingkan dengan unversitas lain, misalya, Universitas Indonesia dan Unversitas Gajah Mada, hasil *tracer study* mereka tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa masa tunggu lulusan mereka relatif sama dengan UNP, yaitu rata-rata satu sampai tiga bulan. Ini berarti bahwa lulusan UNP juga memiliki kompetensi yang unggul dan dibutuhkan dalam duni kerja.

2) Jenis Pekerjaan Lulusan

Hasil *tracer study* menunjukkan bahwa dari 866 responden, persentase terbesar yaitu 32,1% bekerja sebagai freelance/honorer. Sebagian besar alumni UNP adalah dari program studi kependidikan dan mereka memilih menjadi guru honorer sebelum mendapat pekerjaan tetap. Selanjutnya 24,9% bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta 9,7% berwirausaha, dan selain itu, sekitar 8% bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Pada tahun 2018, sekitar 500 orang lulusan UNP diterima sebagai ASN yang ditempatkan di seluruh Indonesia baik sebagai guru maupun sebagai tenaga profesional lainnya. Data tersebut dapat dilihat pada Gambar 23.

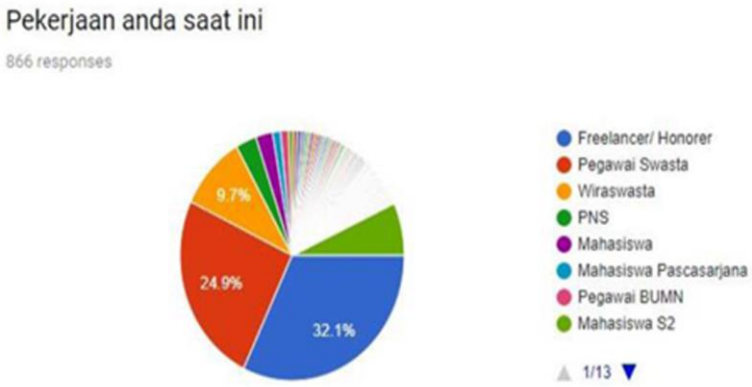

Gambar 23: Pekerjaan Alumni

Alumni yang bekerja pada instansi pemerintah tidak semuanya berstatus PNS. Sebagian mereka ada yang menjadi guru di sekolah negeri dengan status guru honorer atau kontrak. Hasil evaluasi dalam lima tahun terakhir menunjukan bahwa alumni yang bekerja sesuai dengan bidangnya semakin meningkat terutama sebagai

pendidik pada sekolah dan lembaga-lembaga swasta seperti Bimbingan Belajar di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat. Bahkan ada sebagian mereka yang sudah bekerja pada saat masih menduduki semester akhir. Beberapa tahun ke depan, diperkirakan, kesempatan semakin terbuka bagi lulusan UNP karena kecenderungan jumlah guru yang pension relatif besar. Kemampuan profesional alumni non-kependidikan dalam melaksanakan tugas yang diberikan cukup tinggi di samping kepribadian dan integritas yang bagus. Pada umumnya alumni bekerja pada instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, Swasta, dan banyak juga yang berwiraswasta.

Berdasarkan hasil *tracer study* yang dilakukan pada tahun 2017/2018, lulusan UI lebih banyak berkerja pada perusahaan swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

3) Jumlah Gaji Pertama

Hasil *tracer study* tentang gaji pertama yang didapatkan oleh lulusan UNP berkisar antara Rp 750.00 sampai Rp 3.000.000 sesuai dengan jenis pekerjaan dan tempat bekerja. Di samping mencari pekerjaan, sebanyak 10% dari lulusan S1 melanjutkan pendidikan ke jenjang S2. Kalau dibandingkan dengan lulusan Universitas Indonesia, gaji pertama lulusan UNP relatif rendah. Hasil *tracer study* pada tahun2017/2018 menunjukkan bahwa sebagian besar (di atas 40%) lulusan UI mendapatkan gaji pertama antar tiga sampai enam juta rupiah perbulan. Bahkan 41% lulusan Fakultas Psikologi mendapatkan gaji pertama sebanyak enam sampai sembilan juta rupiah. Gaji pertama lulusan UNP lebih rendah karena UNP berada di daerah yang tidak banyak memiliki industri atau perusahaan yang berskala nasional dan internasional. Sebaliknya UI terletak di kota besar dan memungkinkan lulusannya mendapatkan kesempatan dan gaji lebih besar.

4) Kesesuaian Pekerjaan dengan Latar Belakang Pendidikan

Relevansi antara pendidikan dengan pekerjaan adalah hal yang sangat penting karena pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan mahasiswa memasuki dunia kerja baik karyawan ataupun wirausahawan. Kesesuaian ilmu yang diperoleh dengan pekerjaan yang digeluti akan membuat lulusan dapat berkembang dengan baik dan bekerja dengan lebih profesional.

Gambar 21: Kesesuaian Pekerjaan

Hasil *tracer study* menunjukkan bahwa lebih kurang 338 orang responden atau

49,4% dari 684 responden menyatakan bahwa pekerjaan mereka sangat sesuai dengan latar belakang pendidikan, 109 responden atau 15,9% menyatakan sesuai dan sebanyak 110 responden cukup sesuai. Walaupun begitu, masih ada ketidak sesuaian antara latar belakang pendidikan alumni dengan pekerjaan yang digelutinya. Gambaran tentang kesesuaian pekerjaan dengan latar belakang pedidikan terlihat pada Gambar 21 di atas. Hal itu berarti bahwa sebagian besar lulusan UNP memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka.

a. Tracer Studi yang Berkenaan dengan Pengguna Lulusan Universitas Negeri Padang

Penelusuran kepada pengguna lulusan dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang meliputi aspek integritas, keahlian bidang kerja (profesionalisme), kemampuan berbahasa, berkomunikasi, penggunaan teknologi informasi, kerja sama dalam tim, dan pengembangan diri. Berikut adalah respon *stakeholder* terhadap lulusan UNP.

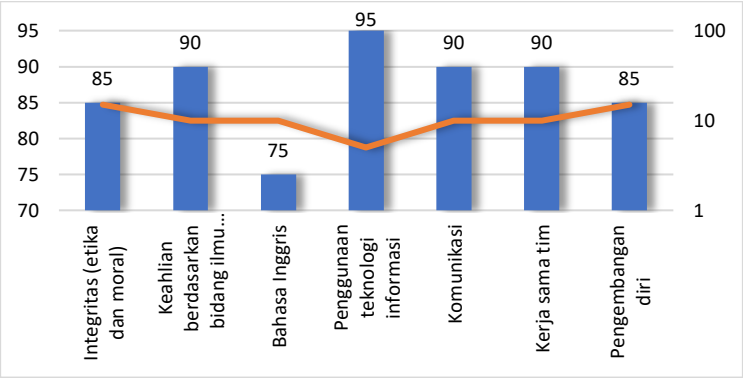

Gambar 22. Hasil Akumulasi *Tracer Study* terhadap Pengguna pada Prodi

Berdasarkan Gambar 22, dapat disimpulkan bahwa kompetensi lulusan UNP dinilai sangat baik dimata pengguna lulusan. Hal yang perlu ditingkatkan adalah kemampuan berbahasa Inggris. Untuk itu yang telah mensyaratkan nilai TOEFL 400 bagi lulusan semua program studi. Upaya peningkatan kemampuan bahasa Inggris juga dilakukan dengan mengadakan pelatihan bahasa Inggris di Balai Bahasa UNP, pelatihan debat bahasa Inggris, dan pelatihan bahasa Inggris bagi mahasiswa penerima beasiswa Bidikmisi.

Tingkat kepuasan alumni terhadap lembaga dan fasilitas yang dimiliki berada pada taraf baik dengan nilai 3,7 pada skala 1 sampai 4. Sementara itu, hasil evaluasi terhadap pengguna dalam tujuh aspek yang dimintakan juga baik. Hasil pelacakan terhadap pengguna alumni lima tahun terakhir terlihat dalam Gambar 23.

Hasil penelusuran tersebut memperlihatkan kelebihan dan kelemahan lulusan UNP. Secara keseluruhan, lulusan UNP mendapatkan nilai baik dari pengguna. Kemampuan pengembangan diri termasuk kemampuan yang harus ditingkatkan ketika dalam pendidikan. Kemampuan pengembangan diri ini termasuk kreativitas dengan mengikuti pelatihan yang relevan.

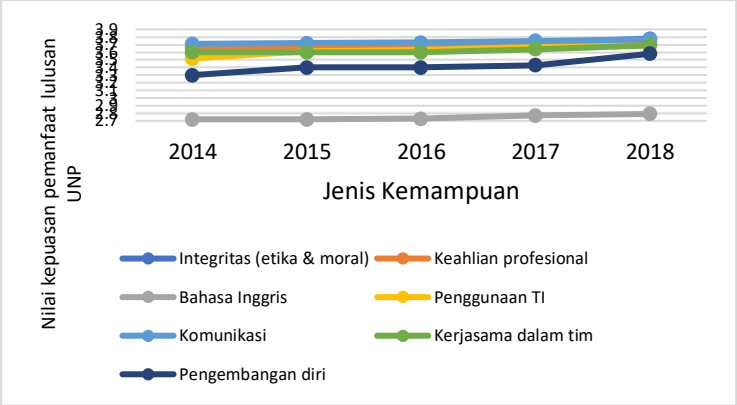

Gambar 23. Indeks kepuasan pemanfaat lulusan UNP (2014-2018)

B. Kondisi Eksternal

Faktor eksternal merupakan kondisi di luar BLU UNP yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi keberhasilan BLU dalam mencapai tujuannya. UNP tidak mampu mengendalikan dinamika dan faktor eksternal sesuai dengan apa yang diinginkan di masa yang akan datang. Cakupan analisis kondisi eksternal tersebut dapat tergambarkan pada bidang pelayanan, keuangan, organisasi, dan SDM serta bidang sarana dan prasarana. Semua itu dapat dipengaruhi oleh:

1. Perubahan regulasi

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk peningkatan layanan publik atau *public service agency*. Peraturan perundang-undangan layanan dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri dan lain-lain kebijakan yang diterbitkan pemerintah.

2. Persaingan (kompetisi)

Arus globalisasi membuat persaingan di berbagai bidang termasuk bidang pendidikan tidak dapat dielakkan. Pihak asing diberi kesempatan untuk mendirikan lembaga pendidikan di Indonesia di samping berkembangnya kuantitas dan kualitas perguruan tinggi yang ada di sekitar UNP. Ini merupakan ancaman sekaligus peluang. Jika UNP tidak melakukan pembenahan dan inovasi secara terus menerus, maka semua itu akan mengancam keberadaan UNP di masa depan.

3. Keadaan ekonomi

a. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,19, sedangkan tahun 2018 menurun menjadi 5,18%, selanjutnya tahun 2019 kwartal pertama hanya sebesar 5,07%. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2019 ditetapkan sebesar 5,3 persen.

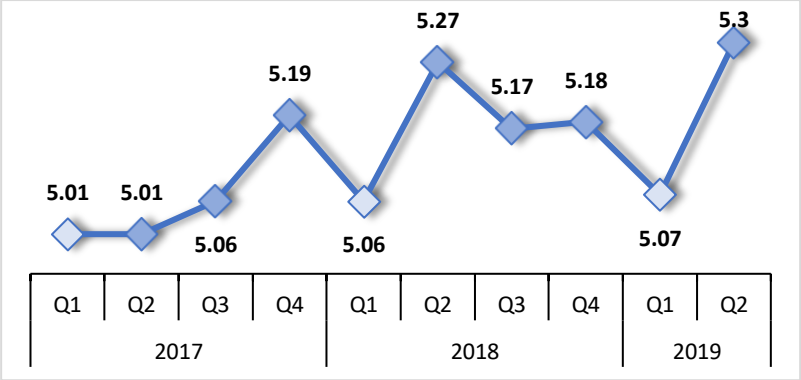

Gambar 24. Pertumbuuhan Ekonomi Indonesia

b. Secara umum pertumbuhan ekonomi pada beberapa wilayah meningkat. Ekonomi wilayah Sumatera tumbuh 4,5%, pulau Jawa 5,7%, bali dan nusa tenggara 4,6%, Kalimantan 5,3%, dan Sulawesi 6,5%. Sedangkan maluku dan papua mengalami penurunan sebesar 10,4%.

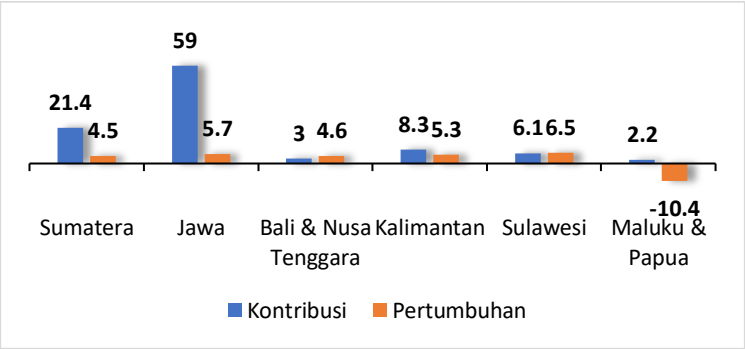

Gambar 25. Pertumbuhan dan Kontribusi Ekonomi Parsial

c. Salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional relatif stabil, dari 4,82% tahun 2015 menjadi 5,07% triwulan pertama tahun 2019. Sedangkan pertumbuhan sektor industri manufaktur non-migas relatif fluktuatif dan konstan. Pertumbuhan sektor industri manufaktur lebih kecil dibanding pertumbuhan PDB setiap tahun. Artinya kondisi ekonomi Indonesia ditunjang oleh sektor konsumsi.

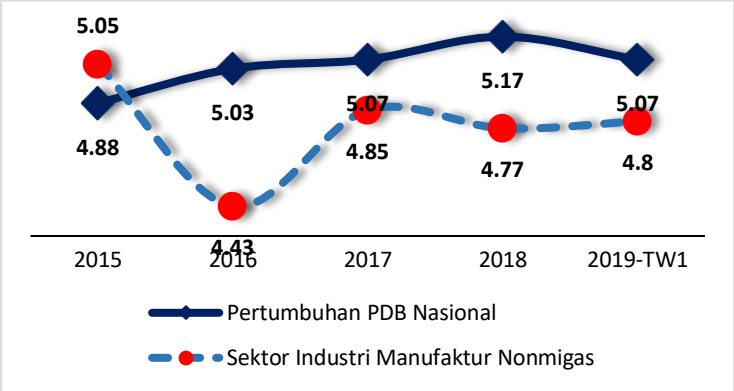

Gambar 26. Pertumbuhan Industri Pengolahan Nonmigas

d. Gambar 27 menunjukkan Ekspor Produk Industri tiga tahun terakhir yaitu tahun

2017 sampai Kuwartal 1 tahun 2019. Tahun 2017 terjadi fluktuasi antar kwartal. Tahun 2018 pertumbuhan ekspor produk industry relatif stabil dari kwartal 1 sampai kwartal 4, dan justru kwartal 4 terjadi penurunan. Demikian juga dengan kwartal pertama tahun 2019 terjadi penurunan atau minus 6,6%.

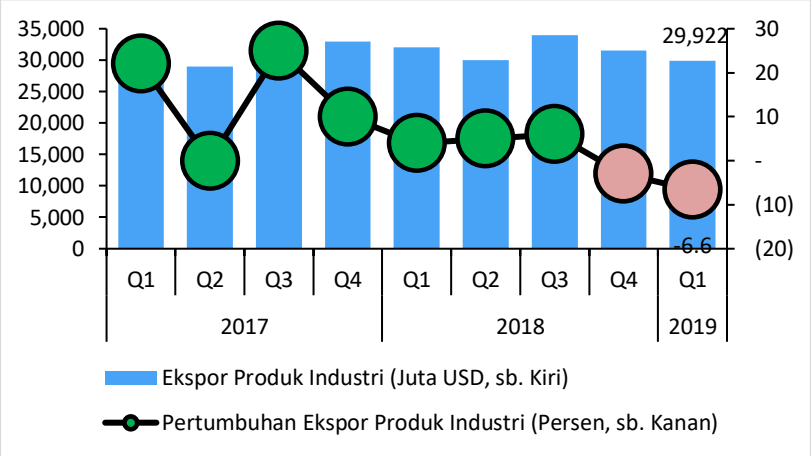

Gambar 27. Ekspor Produk Industri

e. Investasi Domestik (PMDN) Sektor Industri; Investasi PMDN dalam 3 tahun terakhir terjadi fluktuasi. Tahun 2017 terjadi penurunan sejak kwartal pertama sampai kwartal ke 4. Kemudian kwartal kedua tahun 2018 meningkat tajam, namun menurun sampai kwartal pertama tahun 2019 menjadi minus 24,78%

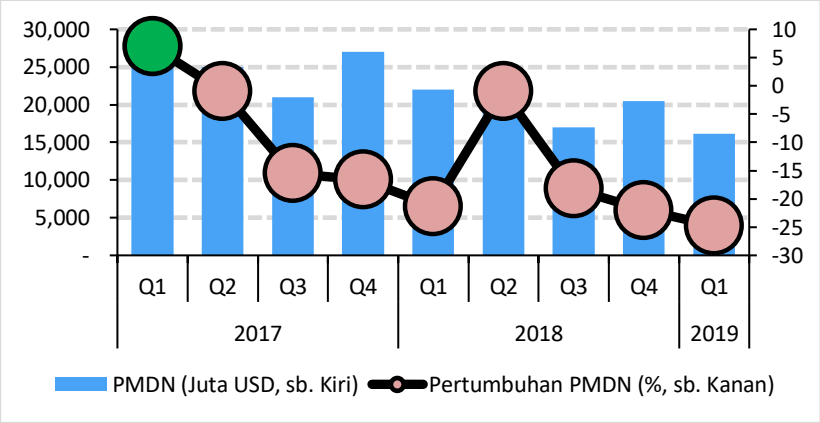

Gambar 28. Investasi Domestik (PMDN) Sektor Industri

f. Perkembangan Investasi Asing (PMA) sektor industri juga relatif fluktiatif, mulai kwartal pertama tahun 217 sampai kwartal pertama tahun 2019. Kwartal pertama tahun 2017 relatif rendah, kemudian kwartal 2 tahun 2017 meningkat. Selanjutnya kuartal pertama dan kedua menurun drastis walaupun kwartal pertama tahun 2018 meningkat tajam. Demikian selanjutnya pada kwartal kedua dan ketiga tahun 2018 dan kemudian meningkat pada kwartal keempat. Pada kwartal pertama tahun 2019 menurun drastis mencapai minus 39,4%.

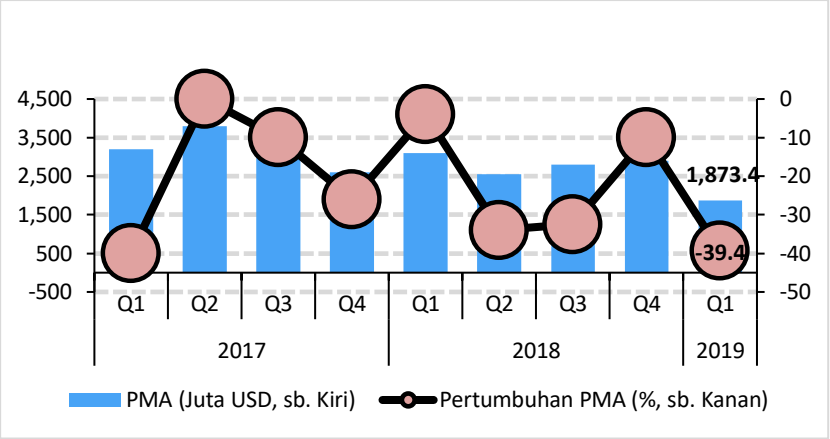

Gambar 29. Investasi Asing (PMA) Sektor Industri

g. Pada Tabel 13 tergambar bahwa ekspor Indonesia menurun dari tahun 2017 ke 2018 dan kwartal pertama tahun 2019. Kondisi ini menuntut peningkatan daya saing produk nasional baik melalui peningkatan kualitas, inovasi produk dan peningkatan efisiensi sehingga daya saing nasional meningkat.

Tabel 13. Nilai dan Tingkat Pertumbuhan Ekspor

Kategori	2018 Tw-I	2018 Tw-IV	2019 Tw-I
Nilai Ekspor (Juta USD)	**44.272,9**	**44.977,3**	**40.510,2**
Migas	4.052,5	4.654,4	3.437,8
Minyak Mentah	1.224,7	1.116	349,3
Hasil Minyak	354,3	391	249,6
Gas	2473,5	3,147	2.838,9
Nonmigas	40.220,4	40.322,9	37.072,4
Pertanian	774,0	934,2	785,8
Industri	32.039,5	32.396,2	29.922,4
Pertambangan & Lainnya	7.406,9	6.992,5	6394,2
Pertumbuhan Ekspor (YoY%)	**8,79**	**-1,01**	**-8,50**
Migas	1,80	8,98	-15,17
Minyak Mentah	-12,59	-23,25	-71,48
Hasil Minyak	-19,24	0,35	-29,57

Kategori	2018 Tw-I	2018 Tw-IV	2019 Tw-I
Gas	15,52	29,69	14,77
Nonmigas	9,44	-2,05	-7,73
Pertanian	-9,41	-0,76	1,53
Industri	4,50	-1,30	-6,51
Pertambangan & Lainnya	41,51	-5,17	-14,07

4. Perkembangan Sosial Budaya

Perkembangan sosial budaya di Indonesia sangat strategis. Letak geografis Indonesia yang diapit dua benua, yakni Benua Asia dan Benua Australia dan dua samudera yakni Samudra Pasific dan Samudra Indonesia sangat berpengaruh pada perkembangan sosial budaya sehingga mudah berubah dan berkembang. Lintasan ini dapat dilihat dari keadaan pasar pariwisata yang membawa budaya baru di samping warga Indonesia yang mudah beradaptasi dengan budaya luar.

5. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi yang pesat sangat berpengaruh positif pada pelayanan baik pada skala nasional maupun internasional. Dengan perkembangan peralatan TI ini, berbagai informasi mudah diakses dan cepat diperoleh sehingga informasi bisa diterima dengan instan sehingga sangat membantu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang bermutu.

Sebagian sarana dan prasarana fisik yang rusak akibat gempa bumi 7,6 SR pada tanggal 30 September 2009 sudah diperbaiki dan sebagian lagi perlu direkonstruksi dan direhabilitasi. Pada saat itu, sebagian besar gedung pendidikan, laboratorium, dan fasilitas pendidikan di UNP mengalami rusak berat.

Pembangunan kembali kampus modern dengan fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan *master plan* pembangunan kampus UNP untuk tumbuh dan berkembang menuju keunggulan sangat memerlukan dukungan dana yang besar. Dukungan ini telah didapatkan dari *Islamic Development Bank* (IDB) dan tahun 2011 dinyatakan sebagai awal dimulainya Proyek Rekonstruksi dan Peningkatan UNP *(Project of Reconstruction and Upgrading of State University of Padang).* Proyek ini terlaksana dalam periode tahun 2011-2015.

Untuk penguatan tatakelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik, UNP secara terus-menerus mengupayakan dan meningkatkan mutu kinerja kelembagaan secara konsisten dengan menerapkan prinsip *good university governance* yang partisipatif, demokratis, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel, serta membina kerja sama yang dinamis dan saling menguntungkan dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*). Badan-badan normatif, yaitu Senat Universitas dan Senat Fakultas mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mengarahkan dan menetapkan peraturan-peraturan internal kelembagaan secara umum, dan secara khusus memproyeksikan UNP menuju perguruan tinggi yang mandiri dan modern sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya UU Sisdiknas No. 20 tahun 2003 dan UU Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2012, Renstra Kemendiknas 2010-2014, Renstra Pendidikan Tinggi, materi Renstra UNP terdahulu (tahun 2011-2015) dan hasil-hasil pengembangan yang telah dicapai serta kondisi UNP dewasa ini, UNP merasa perlu mengadakan berbagai perubahan dan penyesuaian rencana strategis untuk kurun waktu 2015-2019 dengan mengacu kepada renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 2015-2019.

6. Persaingan Kerja

a. Persaingan perguruan tinggi semakin tajam baik bagi lulusan, maupun kelembagaan. Tingkat pengangguran menurut pendidikan tertinggi menunjukkan peningkatan pengangguran program diploma meningkat dari tahun 2016 sebesar 6,04% menjadi 6,88% tahun 2018. Demikian juga dengan lulusan Universitas meningkat dari 4,87% tahun 2016 mejnadi 5,18% pada tahun 2018. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran program diploma (vokasi) lebih tinggi dari lulusan sarjana (S1). Hal ini menunjukkan bahwa lulusan diploma belum memiliki sertifikat kompetensi sebagai indikator ketrampilan lulusan vokasi.

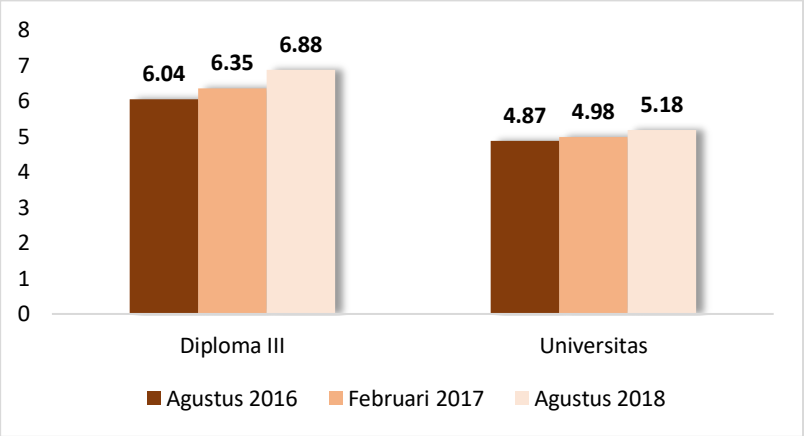

Gambar 30. Tingkat Pengangguran

b. Ketidakselarasan (mismatch) lulusan pendidikan tinggi dengan penyerapan tenaga kerja di pasar kerja juga terjadi. Terdapat mismatch lulusan program diploma 1 sebesar 58,3%, diploma II sebesar 51,4%, dan Diploma IV/Sarjana sebesar 41,1%. Hal ini terjadi karena (1) kurikulum program diploma tidak relevan dengan keterampilan yang dibutuhkan lapangan pekerjaan, (2) karena dosen yang membina mata kuliah di program diploma tidak memiliki kompetensi yang memadai. Umumnya dosen yang membina perkuliahan di program diploma sama saja dengan dosen di program sarjana. oleh sebab itu diperlukan perubahan manajemen dengan merevitalisasi dosen program diploma menjadi dosen professional dan memperbanyak *teaching industry*.

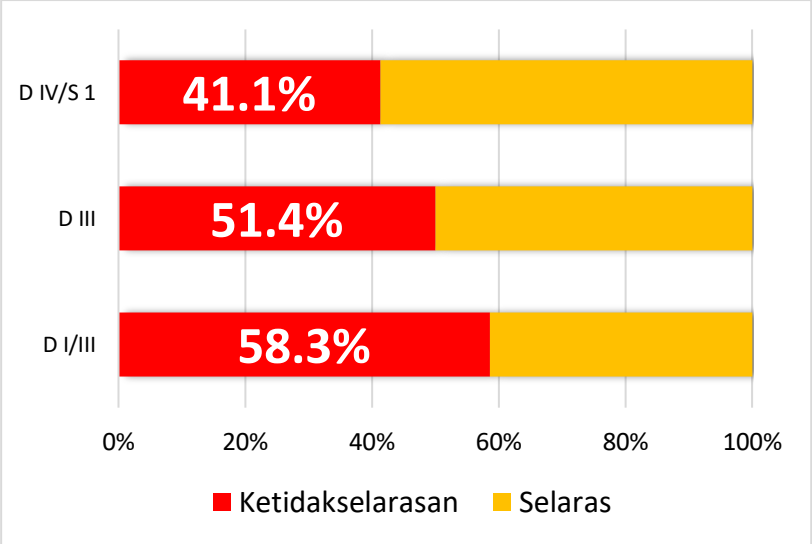

Gambar 31. Ketidakselarasan (*mismatch*) lulusan dengan Penyerapan Tenaga Kerja

c. Data tingkat pendidikan dan bidang pekerjaan dapat dilihat pada gambar 32, 9 sektor pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa mayoritas lulusan perguruan tinggi (PT) bekerja pada sektor jasa kemasyarakatan (sosial dan perorangan), sektor perdagangan dan rumah makan, dan jasa akomodasi. Artinya lulusan perguruan tinggi (PT) relatif sedikit yang bekerja di sektor industri, listrik, dan konstruksi.

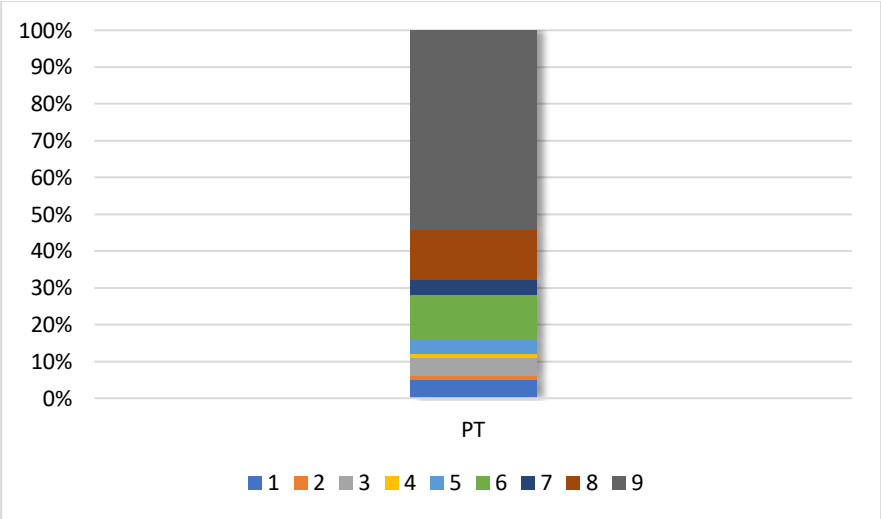

Gambar 31. Data Tingkat Pendidikan dan Bidang Pekerjaan

Ket:
1. Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri
4. Listrik, Gas, dan Air Minum
5. Konstruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi
7. Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan
9. Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang merupakan turunan dan rencana implementasi dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Negeri Padang. Sesuai dengan Renstra UNP tahun 2020-2024, maka ditetapkan sebagai berikut:

A. Visi UNP

MENJADI UNIVERSITAS UNGGUL DAN BERMARTABAT DI ASIA

B. Misi UNP

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan riset berbasis inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama yang produktif dan bereputasi global;

C. Tujuan Strategis UNP

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter (M1);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset berbasis inovasi (M2);
3. Menguatkan kapasitas inovasi (M2);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (M2);
5. Meningkatkan kontribusi UNP untuk kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (M3);
6. Mewujudkan tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (M4);
7. Mewujudkan universitas yang mandiri (PTN-BH) (M4); dan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang produktif dan bereputasi global (M5).

D. Sasaran Strategis UNP

Tujuan :

1. Mewujudkan pembelajaran yang bereputasi dan berkarakter (T1)
   Sasaran strategisnya adalah:
   a. Pembelajaran yang pemanfaatan elearnig, akses sumber belajar daring, metode pembelajaran berbasis digital)
   b. Sarana-prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
   c. Pembelajaran inovatif berbasis riset (buku ajar berbasis riset, jumlah sumber belajar dari jurnal internasional bereputasi)
   d. Rasio lama studi aktual terhadap lama studi menurut kurikulum
2. Meningkatkan kualitas kemahasiswaan (T2)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   a. Lulusan yang profesional (IPK, Bahasa asing, Bekerja sesuai bidangnya)
   b. Mahasiswa yang mampu bersaing dan berwirausaha (masa tunggu kerja,

jumlah mahasiswa berwirausaha, ketepatan pekerjaan, prestasi mahasiswa)
   c. Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal dan kurang mampu secara ekonomi
   d. Jumlah mahasiswa asing yang belajar di UNP

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (T4)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   a. Jumlah Doktor, Guru Besar dan Lektor Kepala
   b. Profesionalisme dosen dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi (rekognisi dosen)
   c. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa
   d. Profesionalisme tenaga kependidikan

4. Mewujudkan sivitas akademika yang beradab dan berkarakter bangsa
   Sasaran strategisnya adalah: (T1 dan T4)
   a. Lulusan yang memiliki budaya dan berkarakter bangsa yang tangguh
   b. Toleransi sivitas akademika atas perbedaan di kampus
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset (T2)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   a. Jumlah riset DRPM dan kerjasama dosen baik nasional, internasional, pemerintah serta dunia usaha
   b. Keterlibatan dosen dalam penelitian
   c. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian

6. Meningkatkan produktivitas publikasi di jurnal ilmiah bereputasi (T2)
   Sasaran strategisnya adalah:
   a. Jumlah publikasi nasional dan internasional bereputasi
   b. Jumlah HKI dan sitasi karya ilmiah dosen;

7. Meningkatkan kontribusi UNP dalam pembangunan bangsa (T5)
   Sasaran strategisnya adalah:
   a. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan keterlibatan dosen dan mahasiswa
   b. Keterlibatam UNP dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, politik, agama dan kondisi darurat/bencana)
   c. Keterlibatan UNP dalam mengembangkan perekonomian (UMKM)
8. Meningkatkan kapasitas inovasi untuk mendukung revolusi industri 4.0 (T3)
   Sasaran strategisnya adalah:
   a. Jumlah penelitian inovatif yang dimanfaatkan masyarakat
   b. Jumlah Prototype Riset & Development dan Prototype industry
   c. Jumlah Paten yang dimiliki

9. Mewujudkan tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (T5)
   Sasaran strategisnya adalah:
   a. Rangking UNP dalam peringkat PT nasional dan internasional
   b. Jumlah dana selain biaya pendidikan dari mahasiswa
   c. Jumlah Akreditasi Program Studi Unggul
   d. Kuantitas dan kualitas akreditasi labor dan perpustakaan

e. Taman sains dan teknologi serta Pusat Unggulan Iptek (PUI)

10. Mewujudkan universitas yang mandiri (PTNBH) (T7)
    Sasaran strategisnya adalah:
    a. Terwujudnya PTNBH
    b. Laporan keuangan (WTP)
    c. Transparansi, efektifitas dan efisiensi pengelolaan Universitas
    d. Nilai LAKIN A
    e. Kualitas implementasi reformasi birokrasi
    f. Kualitas implementasi keterbukaan informasi publik

11. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional (T8)
    Sasaran strategisnya adalah:
    a. Jumlah kerjasama lokal, nasional dan internasional
    b. Kualitas implementasi dan manfaat kerjasama bagi kemajuan UNP

Karena itu, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Fakultas Ilmu Sosial UNP periode 2020-2024 adalah:

E. Visi FIS

MENJADI PUSAT PENGKAJIAN DAN PENDIDIKAN ILMU SOSIAL YANG TERKEMUKA DAN BERDAYA SAING TINGGI DI TINGKAT ASIA PADA TAHUN 2024

F. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas;
2. Melaksanakan penelitian dan pengkajian berbasiskan inovasi;
3. Mentransformasikan hasil riset untuk peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Menerapkan tata kelola universitas yang baik; dan
5. Menyelenggarakan kerjasama dan kemitraan yang produktif dan bereputasi global;

G. Tujuan Strategis FIS

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter (M1);
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset berbasis inovasi (M2);
3. Menguatkan kapasitas social problem solving dalam penelitian dan pengabdian pada masyarakat (M2);
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (M2);
5. Meningkatkan kontribusi UNP untuk kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (M3);
6. Mewujudkan tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (M4);
7. Berkontribusi dalam mewujudkan universitas yang memiliki kemandirian (M4); dan
8. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama yang produktif dan bereputasi global (M5).

H. Sasaran Strategis FIS

Tujuan :

1. Mewujudkan pembelajaran yang bereputasi dan berkarakter (T1)
   Sasaran strategisnya adalah:
   e. Pembelajaran yang pemanfaatan elearnig, akses sumber belajar daring, metode pembelajaran berbasis digital)
   f. Sarana-prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan IPTEK
   g. Pembelajaran inovatif berbasis riset (buku ajar berbasis riset, jumlah sumber belajar dari jurnal internasional bereputasi)
   h. Rasio lama studi aktual terhadap lama studi menurut kurikulum
2. Meningkatkan kualitas kemahasiswaan (T2)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   e. Lulusan yang profesional (IPK, Bahasa asing, Bekerja sesuai bidangnya)
   f. Mahasiswa yang mampu bersaing dan berwirausaha (masa tunggu kerja, jumlah mahasiswa berwirausaha, ketepatan pekerjaan, prestasi mahasiswa)
   g. Mahasiswa yang berasal dari daerah terdepan, terluar, tertinggal dan kurang mampu secara ekonomi
   h. Jumlah mahasiswa asing yang belajar di UNP
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (T4)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   e. Jumlah Doktor, Guru Besar dan Lektor Kepala
   f. Profesionalisme dosen dalam melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi (rekognisi dosen)
   g. Rasio dosen tetap dengan mahasiswa
   h. Profesionalisme tenaga kependidikan
4. Mewujudkan sivitas akademika yang beradab dan berkarakter bangsa
   Sasaran strategisnya adalah: (T1 dan T4)
   c. Lulusan yang memiliki budaya dan berkarakter bangsa yang tangguh
   d. Toleransi sivitas akademika atas perbedaan di kampus
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas riset (T2)
   Sasaran strataegisnya adalah:
   d. Jumlah riset DRPM dan kerjasama dosen baik nasional, internasional, pemerintah serta dunia usaha
   e. Keterlibatan dosen dalam penelitian
   f. Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian
6. Meningkatkan produktivitas publikasi di jurnal ilmiah bereputasi (T2)
   Sasaran strategisnya adalah:
   c. Jumlah publikasi nasional dan internasional bereputasi
   d. Jumlah HKI dan sitasi karya ilmiah dosen;
7. Meningkatkan kontribusi UNP dalam pembangunan bangsa (T5)
   Sasaran strategisnya adalah:
   d. Jumlah pengabdian kepada masyarakat dan keterlibatan dosen dan

mahasiswa

e. Keterlibatam UNP dalam memecahkan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, hukum, politik, agama dan kondisi darurat/bencana)
f. Keterlibatan UNP dalam mengembangkan perekonomian (UMKM)

8. Meningkatkan kapasitas inovasi untuk mendukung revolusi industri 4.0 (T3)
   Sasaran strategisnya adalah:
   d. Jumlah penelitian inovatif yang dimanfaatkan masyarakat
   e. Jumlah Prototype Riset & Development dan Prototype industry
   f. Jumlah Paten yang dimiliki

9. Mewujudkan tata kelola Universitas yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil (T5)
   Sasaran strategisnya adalah:
   f. Rangking UNP dalam peringkat PT nasional dan internasional
   g. Jumlah dana selain biaya pendidikan dari mahasiswa
   h. Jumlah Akreditasi Program Studi Unggul
   i. Kuantitas dan kualitas akreditasi labor dan perpustakaan
   j. Taman sains dan teknologi serta Pusat Unggulan Iptek (PUI)

10. Mewujudkan universitas yang mandiri (PTNBH) (T7)
    Sasaran strategisnya adalah:
    g. Terwujudnya PTNBH
    h. Laporan keuangan (WTP)
    i. Transparansi, efektifitas dan efisiensi pengelolaan Universitas
    j. Nilai LAKIN A
    k. Kualitas implementasi reformasi birokrasi
    l. Kualitas implementasi keterbukaan informasi publik

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjasama tingkat lokal, nasional dan internasional (T8)
   Sasaran strategisnya adalah:
   c. Jumlah kerjasama lokal, nasional dan internasional
   d. Kualitas implementasi dan manfaat kerjasama bagi kemajuan UNP

I. Tata Nilai

UNP sebagai lembaga pendidikan tinggi berkembang dengan budaya dan tata nilai yang ditanamkan dan diaksanakan secara terus menerus. Tata nilai merupakan norma dasar bagi seluruh sivitas academika dalam perilaku untuk melaksanakan tridharma Perguruan Tinggi. Tata nilai yang disepakati untuk menjadi norma dasar bagi seluruh sivitas akademika adalah ***kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil.***

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan

Dalam Rencana Strategis tahun 2020–2024, arah kebijakan FIS sebagai bagian dari UNP adalah:

1. Arah kebijakan peningkatan kualitas Pembelajaran dan Kemahasiswaan :
   a. Peningkatan kualitas seleksi masuk calon mahasiswa;
   b. Peningkatan jumlah pelatihan model pembelajaran inovatif bagi dosen;
   c. Pelaksanaan Revisi kurikulum yang bermuara kepada mutu lulusan dan kebutuhan pasar kerja;
   d. Pengembangan pembelajaran berbasis e-learning;
   e. Penyediaan perangkat pendukung pembelajaran yang berkualitas;
   f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan minat, bakat, dan kesejahteraan mahasiswa.
   g. Fasilitasi kegiatan kemahasiswaan mengikuti forum ilmiah pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional;
   h. Fasilitasi dosen mengikuti kegiatan ilmiah pada tingkat nasional dan internasional;
   i. Penyediaan sarana pendukung pembelajaran yang berkualitas seperti perpustakaan, pusat komputer, laboratorium, bengkel kerja, balai bahasa, dan ruang baca;
   j. Penyiapan perangkat pembelajaran yang berkualitas seperti silabus, satuan acara perkuliahan (SAP), dan modul pembelajaran.
2. Arah kebijakan peningkatan kualitas Kelembagaan Universitas Negeri Padang, adalah:
   a. Peningkatan akreditasi program studi (80% prodi terakreditasi A) dan institusi;
   b. penjaminan mutu peneyelenggaraan pembelajaran;
   c. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi pemerintah dan industri;
   d. Menciptakan berbagai peluang untuk *income generating* institusi. Mengembangkan berbagai bentuk usaha baik yang ada dalam lingkungan kampus atau usaha lain di luar kampus;
   e. Menyiapkan kelas internasional untuk beberapa program studi;
   f. Menyiapkan beberapa program studi yang sudah terakreditasi A mengikuti akreditasi internasional
   g. Membuka program studi baru yang dibutuhkan masyarakat;
   h. Meningkatkan mutu layanan akademik dan non-akademik;
   i. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan tenaga kependidikan dalam memberikan layanan;
   j. Merancang skema pemeberian renumerasi bagi staf akademik dan tenaga kependidikan;

k. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi dalam negeri, peruguran tinggi di negara-negara ASEAN, dan negara lainnya;
l. Membuka peluang program pertukaran dosen dan mahasiswa dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri.
m. Meningkatkan pendapatan lembaga melalui berbagai kerjasama dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, pelatihan, konsultan, dan pemberdayaan aset.
n. Pengembangan Pusat Data Informasi dan Kearsipan
o. Optimalisasi Peran Humas

3. Arah kebijakan peningkatan relevansi, kualitas dan kuantitas Sumber daya adalah sebagai berikut:
   a. Peningkatan kualitas dosen melalui pendidikan lanjut (S3) dan jabatan fungsional Guru Besar;
   b. Mewujudkan sivitas akademika yang beradab dan berkarakter bangsa
   c. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifkasi profesi keahlian
   d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi keahlian
   e. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pertemuan organisasi profesi
   f. Peningkatan kerjasama dalam peningkatan pendapatan unit-unit kerja, pusat pelatihan bersertifikasi (Balai Bahasa, workshop dll).
   g. Menyediakan sarana pusat karier untuk mahasiswa dan dosen dalam pengembangan karir.
   h. Meningkatkan jumlah dosen yang memiliki sertifkasi profesi keahlian
   i. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga sertifikasi keahlian
   j. Meningkatkan keterlibatan dosen dalam pertemuan organisasi profesi
   k. Peningkatan kerjasama dalam peningkatan pendapatan unit-unit kerja, pusat pelatihan bersertifikasi (Balai Bahasa, workshop dll).
   l. Menyediakan sarana pusat karier untuk mahasiswa dan dosen dalam pengembangan karir.
   m. Penguatan peranan dan fungsi Unit-unit di UNP
   n. Peningkatan layanan perpustakaan, laboratorium, studio dan workshop.
   o. Peningkatan harmonisasi dan lingkungan sekitar kampus.
   p. Peningkatan daya saing dan daya tampung
   q. Optimalisasi kapasitas dan program kegiatan lembaga kemahasiswaan
   r. Melaksanakan program sertifikasi profesi

4. Arah kebijakan peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan adalah:
   a. Peningkatan publikasi internasional
   b. Peningkatan kekayaan intelektual yang didaftarkan
   c. Peningkatan sitasi karya ilmiah
   d. Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks global
   e. Peningkatan jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional
   f. Peningkatan jumlah prototipe penilaian dan pengembangan (R&D)
   g. Peningkatan jumlah prototipe industri

5. Arah kebijakan penguatan kapasitas inovasi adalah sebagai berikut:
   a. Pembentukan Pusat Unggulan Iptek (PUI)

b. Peningkatan Jumlah produk inovasi
c. Peningkatan Jumlah penguatan kualitas inovasi (Komersialisasi)
d. Jumlah pendapatan yang berasal dari industri

6. Arah kebijakan peningkatan tata kelola yang baik adalah sebagai berikut:
   a) Meningkatkan implementasi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
   b) Penuntasan dan penerapan SOTK baru pada seluruh Fakultas dan unit-unit selingkungan UNP
   c) Mewujudkan Universitas Negeri Padang sebagai PTN-BH
   d) Peningkatan kualitas pelayanan akademik, keuangan, pengadaan barang, distribusi dan pelaporan barang, sumberdaya manusia dan aset dengan sistem teknologi informasi.
   e) Peningkatan pengelolaan aset yang belum termanfaatkan.
   f) Peningkatan peranan dan fungsi Dewan Pengawas, SPI (Satuan Pengawasan Internal) dan BPMI (Badan Penjamin Mutu Internal) UNP.
   g) Peningkatan Layanan Sistem Informasi Akademik (SIA) UNP
   h) Peningkatan Layanan Sistem Informasi keuangan dan kepegawaian.
   i) Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
   j) Peningkatan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa melalui LPSE

B. Strategi

Untuk mencapai sasaran di atas, dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan pembelajaran berbasis standar internasional dan daring
2. Meningkatkan kualitas lulusan yang inovatif dan mampu bersaing secara di Asia
3. Meningkatkan budaya penelitian dan publikasi internasional bereputasi global pada dosen UNP
4. Meningkatkan penelitian inovasi dosen sehingga berkontribusi bagi pembangunan ekonomi daerah dan bangsa
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga terbangun rekognisi dosen dan universitas secara global
6. Meningkatkan peran UNP dalam pembangunan bangsa Indonesia
7. Meningkatkan menajemen universitas sehingga transparan, adil dan mandiri
8. Mewujudkan Universitas Negeri Padang sebagai PTN-BH
9. Meningkatkan implementasi kerjasama nasional dan internasional sehingga berdampak positif bagi perkembangan UNP.

C. Kerangka Regulasi

Sumber referensi untuk menyusun rencana strategis UNP tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Undang-undang NOmor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan dan Pemindahan dan Pemberhentian Pengawai Negeri Sipil
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
16. Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas.
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenanangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Pembentuan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum.
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bagi Perguruan Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi yang diselenggarakan Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2015 Tanggal 23 April 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
25. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 Tanggal 8 Mei 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019.
26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun

2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

28. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
29. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP
30. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
31. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penentapan Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
32. Keputusan Rektor Universitas Negeri Padang Nomor 493/UN35/PR/2018 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Negeri Padang Tahun 2015-2019.

D. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang .

Sasaran Program (*Outcome*)/Indikator Kinerja Program		Target					Ket
		2020	2021	2022	2023	2024	
SP (*Outcome*) 1: Meningkatnya kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan							
IKP	Indeks kepuasan mahasiswa terhadap PBM	83,29%	86,21%	88,14%	90,79%	93,14%	
	Persentase Mata Kuliah yang Menggunakan Pembelajaran Daring	80%	90%	95%	96%	98%	
	Jumlah Mahasiswa Asing	5	10	15	20	25	
	Jumlah mahasiswa yang berwirausaha	100	150	200	250	300	
	Persentase lulusan bersertifikat kompetensi & profesi	48,83%	52,08%	54,50%	57,75%	63,08%	
	Persentase lulusan yang langsung bekerja	38%	41,33%	45%	49,44%	55%	
	Tingkat Kepuasan pengguna lulusan	83%	84,6%	86%	88,6%	91,2%	
	Tingkat Kemampuan Bahasa Inggris (Skor TOEFL)	419	424	429	435	450	
	Jumlah mahasiswa berprestasi (akademik dan non akademik)	50	75	100	125	150	
	Rasio lulusan tepat waktu	52,83%	56,83%	60%	63,67%	70%	
	Masa tunggu lulusan mendapatkan pekerjaan pertama ≤ 3 bulan	36%	39,43%	43,14%	47,29%	52,57%	
	Rata-rata IPK lulusan Sarjana	3,32	3,39	3,43	3,45	3,51	
	Rata-rata IPK lulusan Magister	3,49	3,54	3,59	3,62	3,68	
	Rata-rata IPK lulusan Doktor	3,47	3,5	3,53	3,56	3,59	
	Rata-rata IPK lulusan Vokasi	3,14	3,2	3,26	3,33	3,39	
	Persentase Mahasiswa penerima beasiswa	31,50%	33,75%	35,25%	37,25%	38,75%	
	Persentase Mahasiswa diterima melalui jalur talenta (Pengurus OSIS/OSIM, Prestasi)	6,19%	9%	10,81%	12,5%	14,5%	
	Tingkat Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru Program Sarjana	1:5	1:7	1:10	1:12	1:15	

	Tingkat Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru Program Magister	1:1	1:1,5	1:2	1:2,2	1:2,5	
	Tingkat Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru Program Doktor						
	Tingkat Keketatan Seleksi Mahasiswa Baru Program Vokasi	1:5	1:7	1:10	1:12	1:15	
	Jumlah Daerah Asal Mahasiswa Baru	10	12	15	17	20	
SP (*Outcome*) 2: Meningkatnya wawasan global mahasiswa							
IKP	Jumlah mahasiswa yang mengikuti aktifitas global	2	5	7	10	15	
SP (*Outcome*) 3: Meningkatnya reputasi pembelajaran							
IKP	Persentase PBM berstandar internasional	20,6%	26,4%	33%	38,4%	43,8%	
SP (*Outcome*) 4: Meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan							
IKP	Jumlah HKI yang didaftarkan	2	4	6	8	10	
	Jumlah publikasi nasional	50	75	100	125	150	
	Jumlah publikasi nasional terakreditasi	50	75	100	125	150	
	Jumlah publikasi internasional	50	75	100	125	150	
	Jumlah sitasi karya ilmiah	1000	1200	1300	1400	1500	
	Jumlah prototype R & D	1	2	3	4	5	
	Jumlah prototype industry	0	1	2	3	4	
	Jumlah jurnal bereputasi terindeks nasional	12	15	19	23	27	
	Jumlah jurnal bereputasi terindeks global	2	3	7	8	10	
	Persentase dana masyarakat yang dipergunakan untuk penelitian	13,67%	15%	16,67%	20,33%	24,33%	

	Jumlah keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan penelitian	75	80	90	100	120	
	Jumlah buku ber-ISBN	5	8	10	12	15	
	Jumlah Bahan Ajar dan Buku Berbasis Riset	10	15	20	25	30	
SP (*Outcome*) 5: Menguatnya kapasitas inovasi							
IKP	Jumlah produk inovasi	1	1	2	2	4	
	Jumlah penguatan kualitas inovasi (Komersialisasi)	1	1	2	2	4	
	Jumlah industri yang berkontribusi terhadap pendapatan UNP						
SP (*Outcome*) 6: Meningkatnya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya							
IKP	Persentase dosen berkualifikasi S3	28,83%	28,9%	25,76%	32,08%	33,73%	
	Persentase dosen bersertifikat pendidikan	73,13%	79%	81%	83%	84,75%	
	Persentase dosen bersertifikat kompetensi/profesi	38,50	40,5%	44%	47,25%	50,5%	
	Rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa						
	Persentase dosen dengan jabatan Lektor Kepala	20,8%	22,72%	22,58%	26%	29,5%	
	Persentase dosen dengan jabatan Guru Besar	6,22%	6,33%	7,75%	8,15%	9,25%	
	Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan rekognisi dosen	1	2	3	4	5	
	Jumlah tendik yang mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi	1	1	2	2	4	
	Jumlah Dosen Asing	1	2	2	4	4	
	Jumlah *International Research Network*	2	2	4	4	6	
	Jumlah artikel publikasi terindeks scopus	5	10	15	20	25	

	Jumlah dosen bereputasi internasional	1	2	3	4	5	
	Persentase dosen yang mengikuti kegiatan profesional	10,00%	13,33%	15,00%	18,33%	20,00%	
SP (*Outcome*) 7: Peningkatan Motivasi dan Kinerja							
IKP	Pemberian Insentif dan Penghargaan atas kinerja dosen	120%	123,33%	136,67%	140%	143,33%	
	Pemberian Insentif dan Penghargaan atas kinerja tendik	81,67%	83,67%	96%	98,33%	100,67%	
	Pemberian Insentif Dosen Berpretasi	1	1	2	2	3	
	Pemberian Insentif Tendik Berprestasi	1	2	2	2	3	
SP (*Outcome*) 8 : Meningkatnya peran UNP dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan							
IKP	Persentase dana masyarakat yang dipergunakan untuk pengabdian	5,33%	5,67%	6,33%	7%	8,33%	
	Jumlah keterlibatan civitas akademika dalam kegiatan pengabdian	2.415	2.745	2.965	3.185	3.430	
	Jumlah mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian	412	445	477	536	595	
	Jumlah keterlibatan UNP dalam lembaga pendidikan / Kesehatan / Ekonomi/saintek/soshum	408	426	446	458	468	
	Jumlah pengabdian masyarakat	126	139	153	167	188	
SP (*Outcome*) 9: Terwujudnya tata kelola yang baik							
IKP	Opini penilaian laporan keuangan oleh auditor publik	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	
	Indeks kepuasan pelayanan	87%	89%	91%	93%	95%	
	Persentase kelengkapan laporan PDDIKTI	100%	100%	100%	100%	100%	

	Pemeringkatan Reformasi Birokrasi	82,5	85	87,5	90	92	
	Pemeringkatan keterbukaan publik	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	Menuju Informatif	
	Pemeringkatan Lakin	BB	A	AA	AA	AA	
	Persentase kuantitas tindak lanjut temuan BPK	88%	90%	100%	100%	100%	
	Persentase tindak lanjut bernilai rupiah temuan BPK	37,5%	50%	52,5%	57,5%	62,5%	
	Jumlah dosen yang terlibat dalam kepemimpinan publik	5	8	10	12	15	
	Persentase pengembangan sistem informasi terpadu	90%	100%	100%	100%	100%	
	Layanan Perkantoran	2	2	3	4	4	
SP (*Outcome*) 10: Meningkatnya kualitas kelembagaan							
IKP	Status kelembagaan PTN-BH	PK-BLU	PTNBH	PTNBH	PTNBH	PTNBH	
	Jumlah pembukaan fakultas baru	0	0	0	0	0	
	Jumlah pembukaan lembaga baru	0	0	0	0	0	
	Jumlah pembukaan jurusan baru	0	0	0	0	0	
	Jumlah pembukaan Prodi baru	1	2	1	1	1	
	Jumlah pembukaan labor / Studio / Bengkel baru	1	1	1	1	0	
	Jumlah pembukaan pusat baru pada lembaga	0	0	0	0	0	
	Kualitas UPT	1	1	1	1	1	
	Peringkat PT nasional	24	23	22	21	20	
	Ranking PT Internasional	4.500	4.000	3.500	3.250	3.000	
	Akreditasi institusi	A	A	A	A	A	
	Persentase prodi terakreditasi unggul	46,33%	53,33%	66,00%	71,50%	73,33%	

	Jumlah prodi bersertifikasi dan akreditasi internasional	0	1	2	3	6	
	Laboratorium / Studio / Bengkel yang bersertifikat	0	1	1	1	1	
	Perpustakaan terakreditasi	B	B	B	B	B	
	Jumlah unit bisnis	9	12	15	17	20	
	Kelengkapan dan implementasi dokumen SPMI	Terbaik I	Terbaik I	Terbaik I	Terbaik I	Terbaik I	
	sekolah laboratorium terakreditasi	A	A	A	A	A	
	Poliklinik Terakreditasi	Poliklinik Pratama	Poliklinik Pratama	Poliklinik Pratama	Poliklinik Pratama	Poliklinik Pratama	
	Sertifikasi *Hospitality centre*	3	3	3	3	3	
	Jumlah Pusat/Unit Baru	2	2	2	2	2	
SP (*Outcome*) 11: Meningkatnya reputasi akademik UNP							
IKP	*Academic Reputation Index* (Keketatan Persaingan + Jurnal-jurnal)						
SP (*Outcome*) 12: Meningkatnya kerjasama yang produktif dan bereputasi nasional dan global							
IKP	Kerjasama Internasional	47	57	72	81	99	
	Kerjasama Nasional	163	178	194	209	225	

BAB IV
TARGET KINERJA

A. Target Kinerja

Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan Fakultas Ilmu Sosial UNP periode 2020-2024 maka ditetapkan juga Sasaran Program (SP)/Indikator Kinerja Utama dan juga menetapkan Indikator Kinerja Program (IKP), serta penetapan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara lebih rinci target Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

Gambaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

1. Untuk mencapai sasaran program Pembelajaran dan Kemahasiswaan, ditetapkan kegiatan dan indikator kinerja kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

2. Untuk mencapai sasaran program peningkatan wawasan global mahasiswa, indikator kegiatan ditetapkan sebagai berikut: (terlampir)

3. Untuk mencapai sasaran program peningkatan reputasi pembelajaran, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

4. Untuk mencapai sasaran program peningkatan relevansi dan produktivitas riset dan pengembangan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

5. Untuk mencapai sasaran program penguatan kapasitas inovasi, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

6. Untuk mencapai sasaran program peningkatan relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

7. Untuk mencapai sasaran program peningkatan peran UNP dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

8. Untuk mencapai sasaran program peningkatan peran UNP dalam penyelesaian masalah kemasyarakatan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

9. Untuk mencapai sasaran program peningkatan kualitas kelembagaan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

10. Untuk mencapai sasaran program peningkatan kualitas kelembagaan, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

11. Untuk mencapai sasaran program peningkatan kerjasama yang produktif dan bereputasi nasional dan global, ditetapkan kegiatan dan indikator kegiatan sebagai berikut: (terlampir)

B. Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan program dan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan di atas, setiap tahun Universitas Negeri Padang mendapatkan pendanaan yang berasal dari Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Semua pendanaan tersebut masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DIPA UNP setiap tahun. Kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan akan berbeda setiap tahun tergantung pada velume dan banyaknya kegiatan yang akan dilaksanakan. Secara lebih rinci Kerangka Pendanaan tertuang dalam lampiran. Selain pendanaan yang telah dialokasikan dalam APBN atau DIPA UNP, universitas, fakultas dan unit-unit juga dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kerjasama baik dengan berbagai Perguruan Tinggi, Pemerintah, instansi swasta, maupun masyarakat.